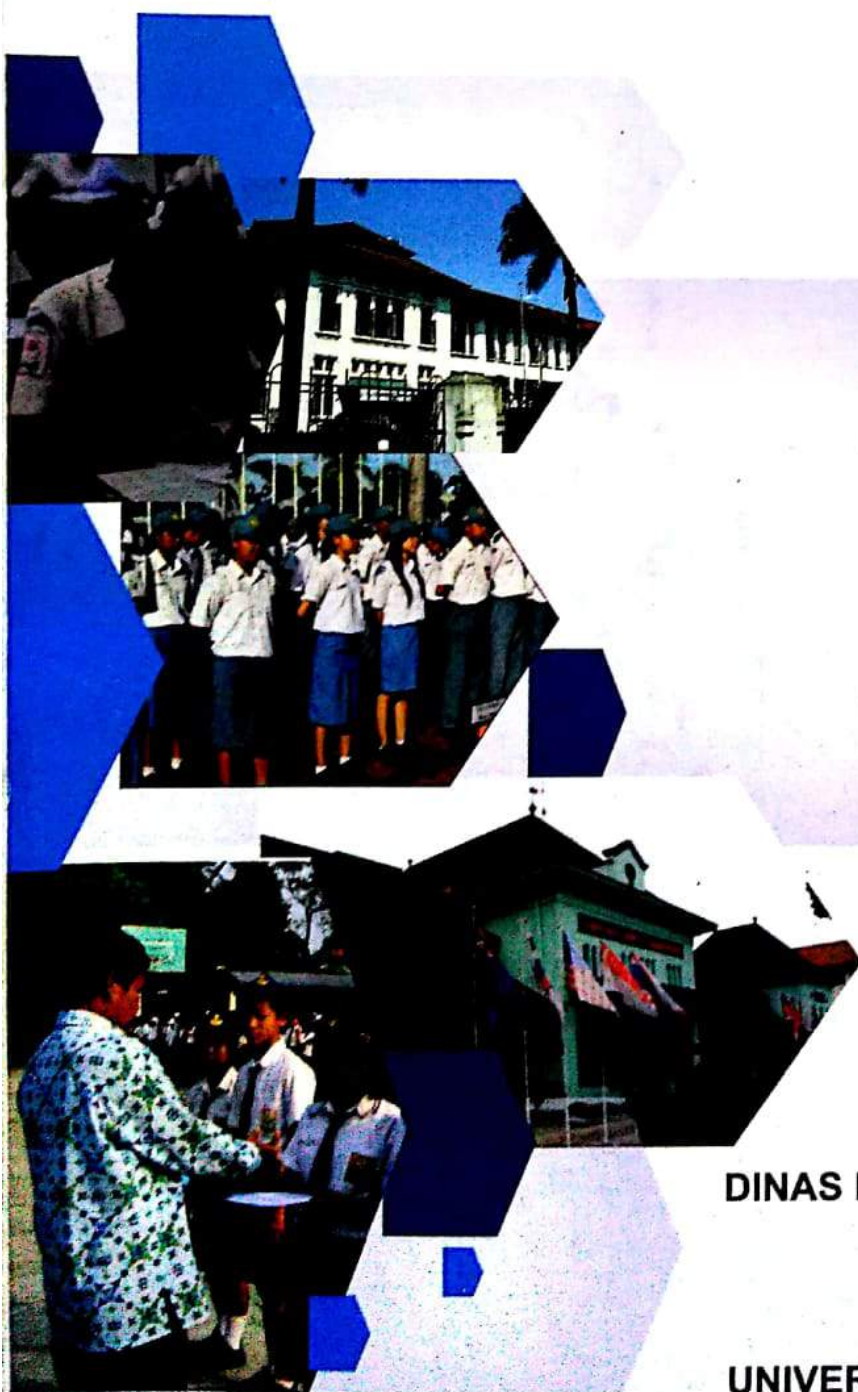


LAPORAN KAJIAN

PEMETAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS KEPENDUDUKAN DAN KEWILAYAHAN



KERJASAMA :

DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

LAPORAN KAJIAN

PEMETAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS KEPENDUDUKAN DAN KEWILAYAHAN



KERJASAMA :

DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
Kata Pengantar	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sasaran.....	9
1.5. Ruang Lingkup.....	9
1.6. Keluaran	10
1.7. Sistematika Laporan	10
Bab II Gambaran Umum Wilayah dan Obyek Kajian.....	12
2.1. Kondisi Geografis dan Demografi Kota Bandung.....	12
2.2. Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung	16
2.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	19
2.3. Kebijakan Pendidikan di Kota Bandung.....	22
2.3.1. Kebijakan Pendidikan Dalam RPJMD	23
2.3.2. Kebijakan Pendidikan Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung.....	30
2.3.3. Perda Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	37
2.4. Tinjauan Sekolah di Kota Bandung	39
2.4.1. Jumlah Sekolah di Kota Bandung	39
2.4.2. Jumlah Murid dan Jumlah Guru PNS di Kota Bandung	40

2.4.3. Ketersediaan Ruang Kelas di Kota Bandung	41
2.5. Tinjauan Kependudukan Kota Bandung.....	43
2.6. Tinjauan Kewilayahan Kota Bandung.....	43
BAB III Metodologi dan Pendekatan	49
3.1. Pendekatan Kajian	49
3.2. Metode Kajian	50
3.2.1. Kerangka Analisis.....	50
3.2.2. Data Yang Digunakan	51
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	52
3.2.4. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	52
3.2.5. Teknis Analisis Data.....	53
3.3. Kerangka Pikir Kajian.....	55
BAB IV Tinjauan Literatur.....	57
4.1. Teori Lokasi	57
4.2. Teori Fasilitas Sosial	60
4.2.1 Fasilitas Pendidikan	60
4.3 Standar Sarana-Prasarana Pendidikan.....	62
4.3.1 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI	62
4.3.2 Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Menurut Cipta Karya untuk Perumahan Sederhana	63
4.3.3 Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Departemen Dalam Negeri.....	64
4.3.4 Standar dan Ketentuan Mengenai Daerah Layanan Fasilitas Pendidikan Menengah	64
4.3.5 Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Menurut Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum	67

BAB V ANALISA DATA	69
5.1. Kondisi Eksisting Sekolah di Kota Bandung	69
5.1.1. Kondisi Sekolah, Siswa, Kelas dan Guru di Kota Bandung	69
5.1.2. Daya Tampung Sekolah.....	90
5.2 Analisa Kependudukan di Kota Bandung.....	92
5.2.1 Pemecahan Penduduk Usia Lima Tahunan.....	93
5.2.1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar	100
5.2.1.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama.....	103
5.2.1.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan.....	105
5.2.2 Proyeksi Siswa.....	107
5.2.3 Proyeksi Kebutuhan Sekolah dan Ruang Kelas.....	109
5.2.3.1 Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas Berdasarkan Perhitungan.....	109
5.2.3.2 Proyeksi Kebutuhan Sekolah Berdasarkan Aspek Normatif.....	111
 BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
6.1. Temuan Kajian	152
6.2. Kesimpulan	155
6.3. Rekomendasi.....	158
6.3.1. Rekomendasi Kebijakan	158
6.3.2. Rekomendasi Teknis	159

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat serta anugerahNya tim konsultan dapat menyusun laporan pendahuluan pekerjaan Kajian Pemetaan Sekolah Berbasis Kependudukan dan Kewilayahan di Kota Bandung Tahun 2015.

Studi ini didasarkan atas beberapa persoalan yang muncul terkait kebijakan pemerataan akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan di Kota Bandung. Persoalan mana terjadi pada tataran kebijakan dan praktek di lapangan. Agar tercipta pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan-persoalan dimaksud, tim pengkaji mendesain kajian yang dilakukan dengan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif.

Laporan pendahuluan ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Wilayah dan Objek Studi, serta Metodologi dan Pendekatan

Tim Pengkaji berharap bahwa apa yang diuraikan dalam Laporan Pendahuluan ini dapat menjawab kebutuhan pemberi pekerjaan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung yang pada gilirannya menjadi pijakan awal dari rangkaian tahapan studi secara keseluruhan.

Semoga bermanfaat, Salam.

Bandung, November 2015

Ketua
Lembaga penelitian
Universitas Pasundan Bandung



Dr. Yaya Mulyana, M.Si



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung A Rektorat Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lemlitunpas@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : 019/Lemlit-Unpas/DISDIK/X1/2015

Kepala Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bpung dengan ini, menugaskatugaskan Penyusunan Kajian Pemetaan dan Pengembangan Sekolah Berbasis Kewilayahan dan Kependudukan Kota Bandung, serta membuat laporan pekerjaan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Adapun data personil yang kami Tugaskan antara lain :

PAJAK TENAGA AHLI PEMETAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS KEPENDUDUKAN DAN KEWILAYAHAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG TAHUN 2015	
1. Team Leader S3	Dr. Yaya Mulyana A Azis, Drs., M.Si
2. Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan	Dr. Tete Saepudin, SE, M.Si
3. Tenaga Ahli Bidang pengembangan S2	Dr. Ade Priangani., M.Si
4 Tenaga Ahli Bid. Pendidikan	DR. H. Uus Toharudin. M.Pd
5. Tenaga Ahli Administrasi Negara S2	Dr.H.Asep Kusdiman Jauhari, M.Si
6. Tenaga Ahli Kebijakan Publik S2	Dr. Thomas Bustomi, M.Si
7. Tenaga Ahli Tata Ruang S2/	Deden Syarifudin ST.MT
8. Tenaga Ahli Administrasi Pendidikan (S2)	Dr. Hen Erlangga.Mpd
9. Tenaga Ahli Sosial& Demografi S2	Dra. NR. Ruyani ,M.Si
10. Tenaga Ahli Management (S2)	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si., CFRM., DBA
10. Tenaga Ahli Management (S2)	Dr. H. Hem Setiawan Se., MM
11. Tenaga Ahli Hukum Pidana S2/	Agus Mulyono SH., M.Hum
12. Tenaga Ahli Sistem informasi S2	Sail Alas majapahit, SST.M.Kom
13. Tenaga ahli Statistik S2	Erti Dinihati M.Stat,
14. Tenaga Ahli Komputer S2/S1 Gol III a	Muhammad Tirta Mulia ST., MT
15 Tenaga Administrasi S1	Yanti Purwanti S.Sos., M.Si
16. Tenaga Surveyor S1	Dede Hikmat S.Sos
17. Tenaga Surveyor Si	Syarief Hidayat

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 11 November 2015

Ketua Lembaga penelitian
Universitas Pasundan Bandung



Dr. YAYA MULYANA A. AZIS, M.SI

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang dan perumusan masalah, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, keluaran serta sistematika studi yang dilakukan

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pendidikan akan seiring sejalan dengan dinamika masyarakatnya, karena ciri masyarakat selalu berkembang. Ada kelompok masyarakat yang berkembang sangat cepat, tetapi ada pula yang lambat. Dalam kondisi seperti ini perubahan-perubahan di masyarakat terjadi pada semua aspek kehidupan. Efek perubahan di masyarakat akan berimbas pada setiap individu warga masyarakat, pengetahuan, kecakapan, sikap, kebiasaan bahkan pola-pola kehidupan.

Mobilitas yang tinggi mempercepat segala aspek kehidupan dan pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah. Komunikasi yang sangat cepat, lancar, dan akurat memudahkan seseorang memperoleh informasi yang sangat berharga bagi kepentingan bisnis, pemerintahan dan pendidikan, serta dalam kehidupan sosial lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, urusan

pemerintahan yang tidak termasuk dalam kewenangan desentralisasi adalah mengenai politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah merupakan bentuk kewenangan yang diberikan pada masing-masing daerah untuk mengembangkan daerahnya tanpa harus melibatkan kewenangan pusat tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dan didasarkan pada landasan hukum yang berlaku.

Perkembangan otonomi daerah yang ditetapkan di Indonesia sejak tahun 2001 ini diharapkan dapat menjadikan masing-masing propinsi, Kabupaten/Kota mengalami pertumbuhan pesat dan dapat berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kewenangan yang telah diberikan semenjak otonomi daerah tersebut sekan membuat masing-masing provinsi, Kabupaten/Kota bersaing dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah hingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa tujuan diterapkannya otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah sehingga dapat tercipta pembangunan berkelanjutan. Namun, pada kenyataannya tidak seluruh daerah dapat menggapai tujuan yang ditetapkan. Berbagai bidang yang diatur dalam usaha mengoptimalkan kondisi daerah oleh pemerintah daerah tidak serta merta dapat berjalan dengan lancar. Berbagai halangan untuk mengoptimalkan kondisi daerah dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial terus terjadi.

Harapan yang akan didapatkan dari otonomi daerah ini pada awalnya berupa optimalisasi kondisi daerah dan peningkatan di seluruh aspek kehidupan tetapi pemahaman yang berkembang adalah memaksimalkan sumber daya yang terdapat di daerah tersebut, terutama sumber daya alam hingga melebihi daya dukung lingkungan. Orientasi dasar yang keliru mengenai optimalisasi daerah yang seakan-akan hanya dapat diukur dari segi ekonomi saja membuat aspek lingkungan dan sosial menjadi hal yang terabaikan. Salah satu hal yang merupakan momok utama permasalahan dapat dilihat dari bidang pendidikan. Sebagaimana diketahui, pendidikan merupakan langkah awal masing-masing individu agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, perkembangan penduduk Indonesia yang semakin pesat akan memunculkan berbagai lapis generasi yang tentunya harus didukung dengan perkembangan pendidikan.

Oleh karena itu, guna meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia yang jika dikaitkan dengan otonomi daerah, maka masing-masing daerah harus memiliki tujuan dan skenario pendidikan yang terintegrasi untuk beberapa tahun mendatang. Jadi, seperti halnya perencanaan sektoral di bidang lain, maka perencanaan pendidikan juga harus dilakukan dengan matang agar terwujud pendidikan yang sesuai etika bangsa. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap kondisi masyarakat dan wilayah tersebut, terutama dalam pelayanan dan ketersediaan sarana pendidikan hingga pada akhirnya dapat mengangkat derajat masyarakat daerah sehingga dapat mempertahankan eksistensi di antara ketatnya persaingan dengan melalui otonomi pendidikan yang bermutu dan produktif.

Sekolah merupakan sarana utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Untuk itu sekolah harus terletak pada posisi yang strategis dan tersebar merata diseluruh daerah. Perkembangan wilayah pemukiman dan jumlah penduduk yang terus meningkat menimbulkan beberapa masalah diantaranya daya tampung sekolah tidak memadai, jalur akses menuju sekolah kurang, fasilitas pendukung yang tidak lengkap dan lain sebagainya.

Sistem pendidikan nasional selalu menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan perubahan terarah dan berkesinambungan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan. Bertolak dari sistem pendidikan tersebut, maka Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kota Bandung memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan Kehidupan bangsa .

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai kebijakan baik dalam kerangka regulasi, kerangka anggaran maupun program dibuat dari sisi input, proses maupun output pendidikan. Terkait kerangka regulasi Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian aturan dan pedoman seperti UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan

Pemerintah No 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan serangkaian aturan teknis kementerian terkait lainnya. Sedangkan dari kerangka anggaran Pemerintah memastikan ketersediaan dan pengalokasian anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN maupun APBD sebesar 20 % sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan serangkaian aturan teknis kementerian terkait. Adapun yang berupa program Pemerintah menyangkut program Wajib Belajar 9 hingga 12 Tahun, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sertifikasi Guru, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan lain-lain.

Namun demikian, kondisi objektif dunia pendidikan dewasa ini sesungguhnya masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan mendasar. Permasalahan tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat permasalahan utama yakni ; **Pertama**, terkait dengan kualitas pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator utama yakni proses pembelajaran yang masih konvensional, kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal, jumlah dan kualitas buku di sekolah yang belum memadai. **Kedua**, pemerataan pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator utama yakni kerusakan sarana dan prasarana ruang kelas, keterbatasan aksesibilitas dan daya tampung serta kekurangan tenaga guru. **Ketiga**, efisiensi pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator yakni penyelenggaraan otonomi pendidikan yang belum optimal (MBS belum optimal), keterbatasan anggaran (kemampuan pemerintah yang terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat), dan mutu SDM pengelola pendidikan. **Keempat**, relevansi pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator yakni kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia

Industri (DUDI) yang belum optimal, kurikulum yang belum berbasis masyarakat dan potensi daerah, serta kecakapan hidup (*life skill*) yang dihasilkan belum optimal.

Permasalahan tersebut di atas hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Kota Bandung tidak terkecuali. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2014 – 2019 teridentifikasi beberapa masalah terkait pendidikan di kota Bandung. Salah satunya adalah mengenai akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Permasalahan yang menyangkut aksesibilitas pendidikan bagi setiap lapisan masyarakat di Kota Bandung adalah dengan diberlakukannya klaster sekolah per wilayah. Tujuan awal pengklasteran adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi siswa disuatu wilayah dengan pelayanan cakupan pendidikan dari sekolah yang tersedia di wilayah tersebut. Sayangnya pemberlakuan klaster sekolah per wilayah belum mengantisipasi wilayah pemukiman dan jumlah penduduk usia sekolah yang terus meningkat. Muncul beberapa masalah diantaranya daya tampung sekolah tidak memadai, jalur akses menuju sekolah kurang, fasilitas pendukung yang tidak lengkap dan lain sebagainya. Dengan kata lain , klaster tersebut menunjukkan adanya disparitas kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada di suatu sekolah, serta menunjukkan adanya perbedaan tingkat layanan dalam pendidikan.

Adanya pengklasteran sekolah yang memiliki tingkatan 1 hingga 3, serta ketimpangan kualitas sekolah pada klaster yang berbeda menyebabkan adanya penumpukan minat siswa di suatu sekolah pada saat PSB (Penerimaan Siswa Baru). Akibat adanya penumpukan minat masuk tersebut maka penerapan sistem

passing grade seperti persyaratan mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa pengklasteran ternyata telah menutup akses bagi kelompok siswa yang membutuhkan peningkatan kualitas pendidikannya tetapi tidak mampu mengakses akibat adanya persaingan dalam sistem yang belum terevaluasi objektivitasnya.

Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah antar klaster baik dari sisi perangkat keras (*hardware*) terkait infrastruktur sekolah dan sarana prasarana pendidikan maupun perangkat lunak (*software*) terkait peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemberlakuan standar manajemen yang sama, hingga menjalankan rotasi dan mutasi guru/kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. Diharapkan dengan berkurangnya ketimpangan kualitas pendidikan antar klaster sekolah, maka para siswa dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dalam setiap klasternya.

Pada titik inilah dibutuhkan pemetaan dan pengembangan sekolah berbasis kewilayahan dan kependudukan di kota Bandung. Pemetaan pendidikan merupakan salah satu penyuplai informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan. Gambaran nyata dari suatu kondisi di wilayah tertentu, menjadi titik tolak perencanaan pembangunan pendidikan. Secara jangka panjang, kebijakan yang dihasilkan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, mutu relevansi, kesetaraan, dan kepastian dalam memperoleh layanan pendidikan di Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan studi tentang "Pengembangan Sekolah Berbasis

Kewilayahan dan Kependudukan” dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di Kota Bandung. Hal tersebut sejalan dengan apa yang tertuang di dalam Visi dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung 2014-2018 yakni “Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Bermutu, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana terungkap di atas, rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Belum terpetakannya pengembangan sekolah berbasis kewilayahan dan kependudukan di Kota Bandung ;
2. Belum terumuskan kebijakan pengembangan sekolah dengan basis kewilayahan dan kependudukan di Kota Bandung

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan yang dirumuskan atas dasar penelaahan teoritis disiplin ilmu yang pada gilirannya memperkuat argumentasi akademis bagi pengambilan kebijakan selanjutnya. Adapun tujuan dari kajian adalah sebagai berikut :

1. Untuk melakukan pemetaan pengembangan sekolah melalui analisa sebaran sekolah yang dikaitkan dengan dinamika kependudukan dan kondisi geografis (kewilayahan)
2. Untuk memperoleh masukan bahan-bahan bagi kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bandung khususnya dalam

pengembangan sekolah dengan basis data kependudukan dan kewilayahan.

1.4. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan pelaksanaan kegiatan kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Teridentifikasi dan terinventarisasi kebutuhan pengembangan sekolah melalui analisa berbasis dinamika kependudukan dan kewilayahan di kota Bandung ;
2. Tersusunnya pemetaan pengembangan sekolah berbasis kependudukan dan kewilayahan di Kota Bandung ;
3. Tersusunnya basis data dan informasi bagi kebijakan pengembangan sekolah di Kota Bandung selanjutnya

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah kajian yang dilakukan mencakup analisa sebaran sekolah, sarana dan prasarana sekolah, dan aksesibilitas sekolah berdasarkan dinamika kependudukan dan kewilayahan di Kota Bandung

1.6. Keluaran

Hasil akhir dari pelaksanaan pekerjaan kajian ini adalah adanya dokumen Pemetaan Pengembangan Sekolah Berbasis Wilayah dan Kependudukan Kota Bandung dengan keluaran sebagai berikut:

1. Gambaran pemetaan sekolah berbasis kependudukan dan kewilayahan di Kota Bandung ;

2. Kesimpulan dan rekomendasi sebagai bahan masukan bagi evaluasi kebijakan dan program kerja Dinas Pendidikan di Kota Bandung dalam upaya meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan baik sarana prasarana atau dalam pelaksanaan program kerja lainnya.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan kajian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang dan perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, keluaran, serta sistematika penulisan laporan pendahuluan.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN OBJEK STUDI

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum wilayah kajian berupa: kondisi geografis dan demografi Kota Bandung, Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Bandung, kebijakan pendidikan di kota Bandung serta gambaran umum objek kajian yakni tinjauan sekolah, tinjauan kependudukan dan kewilayahan kota Bandung.

BAB III METODOLOGI DAN PENDEKATAN

Bab ini berisi pendekatan metodologi yang digunakan dalam melaksanakan kajian. Kesemuanya kemudian dirangkum dalam skema kerangka pikir kajian yang akan dilakukan

BAB IV TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi literatur terpilih yang dinilai relevan dengan latar belakang dan perumusan masalah, maksud dan tujuan , ruang lingkup serta keluaran studi yang hendak di hasilkan . Tinjauana literatur ini akan memberikan pendalaman teoritis /akademis dalam proses analisa data baik data primer maupun data skunder yang dikumpulkan

BAB V ANALISA DATA

Bab ini akan menguraikan data yang diperoleh beserta hasil analisa data yang dilakukan sesuai dengan kerangka dan metode analisa yang telah ditetapkan sebelumnya

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan. Selanjutnya kesimpulan-kesimpulan tersebut akan diberikan rekomendasi baik yang bersifat kebijakan maupun teknis

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN OBJEK KAJIAN

Dalam bab ini di uraikan tentang gambaran umum Wilayah Kajian : Kondisi Geografis dan Demografi Kota Bandung, Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kebijakan Pendidikan di Kota Bandung, serta Gambaran Umum Objek Kajian

2.1. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Bandung

Kota Bandung terletak pada posisi 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha. Perhitungan luasan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu:

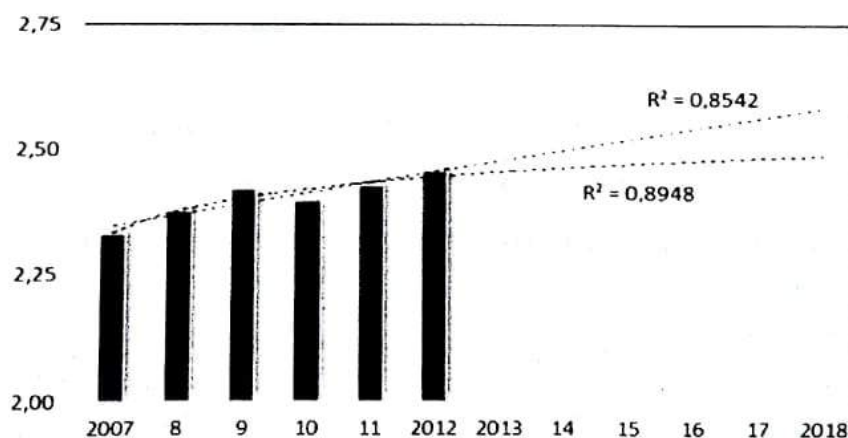
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Secara topografis, Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi berada di

demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk Kota Bandung pada tahun 2012 adalah sebanyak 2.455.517 jiwa (BPS Kota Bandung). Dari tahun 2007-2012 rata-rata pertumbuhan penduduk adalah 1,06%. Tingkat pertumbuhan tersebut relatif menurun bila dibandingkan rata-rata tahun 2003-2008 sebesar 1,1%. Dengan luas wilayah sekitar 16.730 ha, maka kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 2008 adalah 142 jiwa/ha meningkat menjadi 147 jiwa/ha pada tahun 2012

Berdasarkan data tersebut, maka jumlah penduduk cenderung mengalami peningkatan. Dengan pertumbuhan linier, maka diperkirakan penduduk Kota Bandung tahun 2018 mencapai 2,6 juta jiwa, sedangkan dengan pola proyeksi non linier (relatif lebih valid), menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat, sehingga tahun 2018 diperkirakan berjumlah 2,5 juta jiwa.

Gambar 2.2
Sebaran Penduduk Kota Bandung RPJMD 2014-2018



Sumber : RPJMD Kota Bandung 2014 – 2018

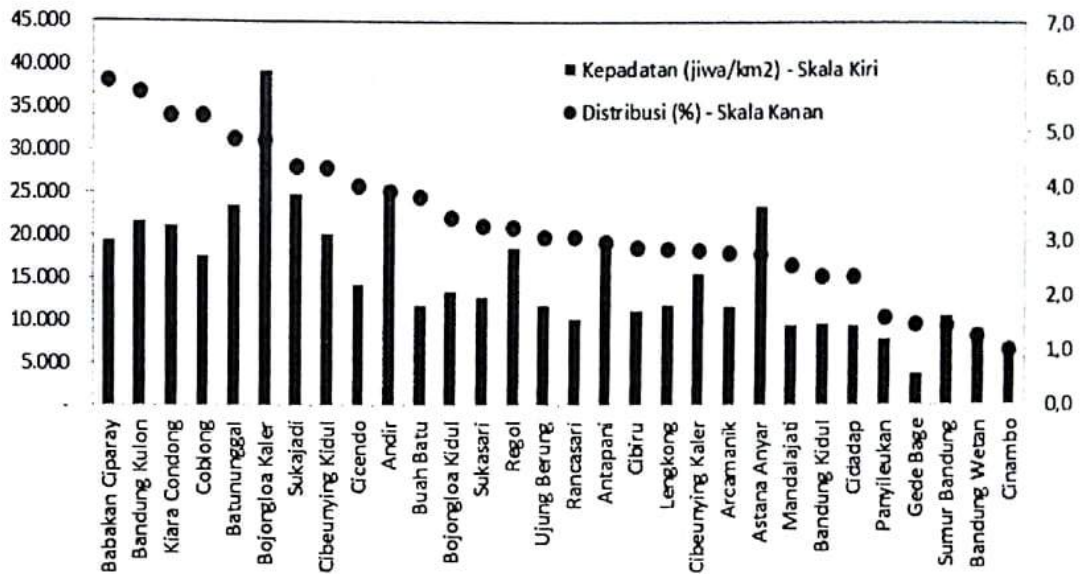
Proyeksi melambatnya pertumbuhan jumlah penduduk di atas, tidak serta merta mengurangi beban daya dukung wilayah

Kota Bandung. Sebagai pusat kegiatan penting, maka di sekitar Kota Bandung berkembang daerah-daerah hinterland seperti Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, wilayah Kabupaten Sumedang bagian barat, serta Kota Cimahi yang dihuni oleh penduduk yang berjumlah besar pula, yaitu sekitar 6 jutaan. Pertumbuhan kegiatan komersial di Kota Bandung yang mendorong meningkatkan harga properti, menyebabkan lokasi-lokasi perumahan bergeser keluar kota Bandung. Keluarga-keluarga muda akan cenderung tinggal di luar kota untuk menyesuaikan daya beli terhadap rumah. Karena itulah jumlah penduduk di Kota Bandung cenderung tumbuh lambat dan bahkan pernah berkurang.

Sebaran penduduk di Kota Bandung terbesar adalah di Kecamatan Babakan Ciparay, yaitu hampir 6% dari seluruh penduduk Kota Bandung. Diikuti oleh Kecamatan Bandung Kulon, Kiara Condong, Coblong, Batununggal dan Bojongloa Kaler. Jumlah penduduk paling sedikit ada di Cinambo, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Gede Bage dan Panyileukan. Kepadatan penduduk terbesar ada di Kec. Bojongloa Kaler dengan tingkat kepadatan mencapai 39.282 jiwa/km², Andir dan Astana Anyar. Kepadatan penduduk terkecil adalah di Gedebage, Cinambo dan Panyileukan juga. Lebih jelasnya dapat dilihat pada aambar berikut ini:

Gambar 2.3

Kepadatan Penduduk Kota Bandung Per Kecamatan Tahun 2014-2018



Sumber: RPJMD Kota Bandung 2014 – 2018

2.2. Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan kewajiban tersebut Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan kewenangan daerah sebagai daerah otonom yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom. Dan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, telah ditetapkan pula Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13

Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Pembangunan bidang pendidikan di Kota Bandung terus dilakukan, dan merupakan salah satu program prioritas dari tujuh program prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bandung yang meliputi : (1) Bidang Pendidikan, (2) Bidang Kesehatan, (3) Bidang Kemakmuran, (4) Bidang Lingkungan Hidup, (5) Bidang Seni dan Budaya dan (6) Bidang Olahraga/prestasi, (7) Bidang Agama. Upaya meningkatkan SDM terus dikembangkan, diantaranya melalui Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu suatu upaya penanganan anak sejak dini pada masa *golden age*. Demikian juga pada setiap jenjang pendidikan, terus diupayakan pengembangan infrastruktur dan sarana pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan peningkatan kreativitas kegiatan siswa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai sub sistem

dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Khusus pembentukan dan susunan organisasi Dinas daerah di kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung ;
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung ; dan
3. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

2.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Walikota Bandung Nomor 411 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung. sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas. Maka Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD). Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP). Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK). Pendidikan Non Formal dan Informal;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

(PSMP), Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK) serta Pendidikan Non Formal dan Informal

4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pendidikan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

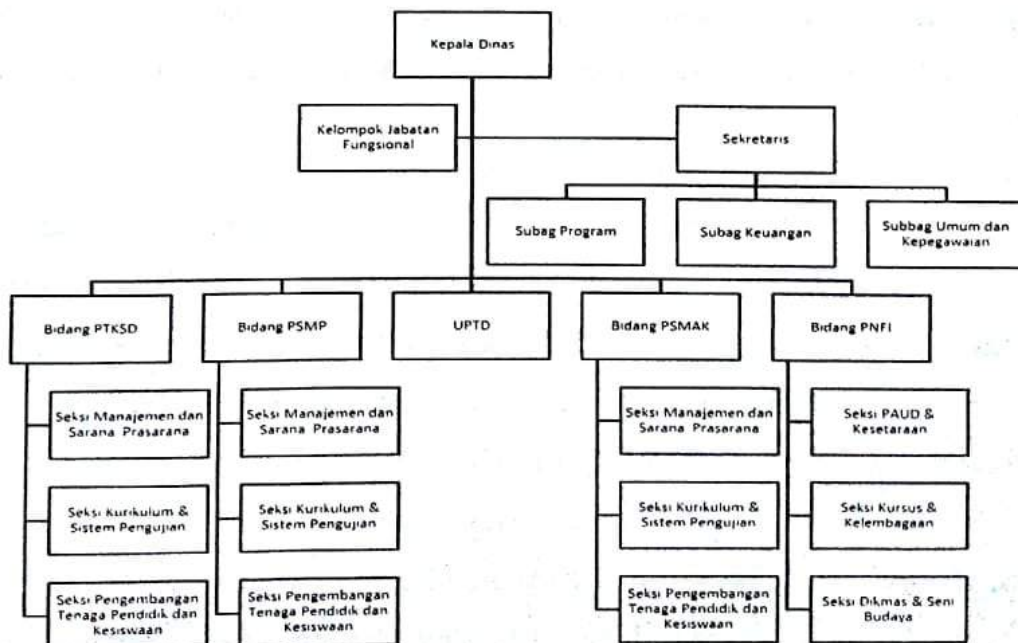
c. Struktur Organisasi

Sesuai dengan kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas. maka Struktur Organisasi Dinas Pendidikan yang berlaku sekarang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi:
 - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b). Sub Bagian Program.
 - c). Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD), membawahi:
 - a) Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana.
 - b) Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian.
 - c) Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan.
4. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), membawahi:
 - a) Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana.
 - b) Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian.

- c) Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan.
- 5. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK), membawahi:
 - a) Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana.
 - b) Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian.
 - c) Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan.
- 6. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal:
 - a). Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan.
 - b). Seksi Kursus dan Kelembagaan.
 - c). Seksi Pendidikan Masyarakat dan Seni Budaya.
- 7. Unit Pelayanan Teknis Kegiatan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.4
Struktur Organisasi
Dinas Pendidikan Kota Bandung



2.3. Kebijakan Pendidikan di Kota Bandung

Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah **perencanaan pendidikan (educational planning)**, rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*) namun istilah-istilah tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. (Arif Rohman, 2009: 107-108).

Di kota Bandung, terdapat beberapa produk kebijakan terkait pendidikan yang tertuang dalam dokumen-dokumen sebagai berikut berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018
2. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung (RENSTRA) Tahun 2013 – 2018.
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

2.3.1. Kebijakan Pendidikan dalam RPJMD

Kebijakan pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2014 – 2018 diformulasikan berdasarkan identifikasi masalah pendidikan sebagai berikut :

1. Tantangan di masa 5-10 tahun ke depan adalah jumlah anak usia pendidikan dasar menengah akan meningkat.;
2. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
3. Perbedaan pelayanan melalui pembentukan “cluster” sekolah menengah sehingga membentuk persepsi orang tua mengenai mutu pendidikan di sekolah tertentu yang menyebabkan keinginan untuk menyekolahkan di sekolah favorit sekalipun lokasinya jauh dari pemukiman.
4. Operasionalisasi sekolah mengalami permasalahan akibat tingginya jumlah siswa, termasuk yang berasal dari luar Kota Bandung, sehingga kekurangan ruang kelas baru pada pendidikan dasar masih banyak;
5. Lokasi dan sarana prasarana sekolah umumnya belum memadai kebutuhan tumbuh dan kembang anak;
6. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan mantap dan sesuai harapan;
7. Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya masing-masing daerah;
8. Rendahnya kepekaan terhadap warisan budaya daerah nenek moyang sebagai bagian dari perekat budaya nasional;
9. Kompetensi tenaga pendidik yang masih dibawah standar;
10. Rendahnya pemanfaatan IT;
11. Belum optimalnya tata kelola sekolah menyangkut alokasi DAK untuk ruang kelas baru, dana BOS, DSP/SSP;
12. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran lembaga pendidikan masih rendah;

13. Pergerakan anak bersekolah yang lintas wilayah, sehingga beban pelayanan pendidikan tidak seimbang;
14. Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan masih perlu ditingkatkan mutunya;
15. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
16. Nasib sekolah pinggiran yang masih minim sarana dan prasarana;
17. Inkonsistensi dan tertutupan dalam Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
18. Biaya pendidikan sekolah menengah masih membebani orang tua peserta didik;
19. Masih ada pelayanan lembaga pendidikan yang belum sesuai dengan standar nasional;
20. Kemampuan siswa Bandung sebagai bagian dari siswa Indonesia dalam skala internasional masih rendah dalam hal bernalar, analisa kritis, dan kreativitas hanya mampu berpikir dalam level analisa tingkat rendah dengan cara menghafal;
21. Pelaksanaan MBS belum sepenuhnya sesuai dengan Permendiknas No.19 Tahun 2007;

Permasalahan di atas kemudian ditempatkan dalam agenda kebijakan (*agenda setting*) dengan mengaitkannya pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terurai dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Agenda Setting Kebijakan Pendidikan Dalam
RPJMD Kota Bandung

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA	<u>Misi Ketiga</u> Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.	Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka.	Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global

Sumber : RPJMD Kota Bandung Tahun 2014 – 2018, diolah

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditempuh guna mewujudkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan dinas Pendidikan
Di Kota Bandung

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBLIJAKAN
Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global	Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun pada tahun 2018. 2. Pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantuan Siswa Miskin (Tingkat SMA/SMK/MA/ dan Warga Belajar) 3. Perluasan sekolah inklusif SD/SMP/SMA 4. Penuntasan buta aksara 5. Pengembangan PAUD 6. Pembangunan Ruang Kelas Baru 7. Pembangunan Unit

Kajian Pemetaan Sekolah
Berbasis Kependudukan dan
Kewilayahan Kota Bandung - 2015

		<p>Sekolah Baru</p> <p>8. Pengembangan standar pelayanan pendidikan - mengacu pada standar pendidikan nasional</p>
	Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan (penyediaan penggunaan sumberdaya utama (digital library infrastruktur, ICT, perpustakaan sekolah dan laboratorium) 2. Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru. 3. Pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran 4. Melaksanakan Kemitraan Global 5. Standar kualifikasi dan kompetensi guru 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 7. Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak 8. Peningkatan kualitas pendidikan non-formal dan informal 9. Peningkatan kepekaan terhadap warisan budaya daerah nenek moyang dan lingkungan
	Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pendidikan kejuruan yang luwes dan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah. 2. Membangun sistem terpadu pendidikan kejuruan (STPK) yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan telah berkembang pada SMK dan program-program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kewirausahaan)

	Tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran stakeholders dalam fungsi pengawasan. 2. Sistem informasi berbasis ICT untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua stakeholder. 3. Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dan guru yayasan.
--	--	---

Sumber : RPJMD Kota Bandung Tahun 2014 – 2018, diolah

Dari strategi dan arah kebijakan pendidikan sebagaimana dirumuskan di atas kemudian disusun program dan indikator kinerja (outcome) sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Program dan Indikator Kinerja Pendidikan di Kota Bandung

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
(1) Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun pada tahun 2018;	Pendidikan Anak Usia Dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini
	Pengembangan Sekolah Gratis	Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 12 Tahun
	Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun	APK Pendidikan Dasar 9 Tahun

ARAH KEBLJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	
(2) pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantuan Siswa Miskin (Siswa Miskin untuk Tingkat SMA/SMK/MA/ dan Warga Belajar); (3) Perluasan sekolah inklusif (4) Penuntasan buta aksara; (5) Pengembangan PAUD (6) Pembangunan Ruang Kelas Baru ; (7) Pembangunan Unit Sekolah Baru (8) Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada standar pendidikan nasional	Pendidikan Menengah	APK Pendidikan Menengah	
	Pendidikan Non Formal	APK Pendidikan Non Formal	
	Program Peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase guru yang memiliki kualifikasi Pendidikan lanjutan dan Sertifikat Pendidik	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase Satuan Pendidikan yang menerapkan prinsip - prinsip MBS	
(1) Penyediaan dan penggunaan sumberdaya utama (digital library, infrastruktur, ICT, perpustakaan sekolah, dan laboratorium); (2) Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru; (3) Pengembangan kurikulum serta kualitas materi dan metode pembelajaran; (4) Mengadopsi standar pendidikan global; (5) Mengadopsi standar global kualifikasi dan kompetensi guru (6) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; (7) Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak; (8) Peningkatan kualitas pendidikan nonformal	Pendidikan Anak Usia Dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini	
	Pengembangan Sekolah Gratis	Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 12 Tahun	
	Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun	APK Pendidikan Dasar 9 Tahun	
	Pendidikan Menengah	APK Pendidikan Menengah	
	Pendidikan Non Formal	APK Pendidikan Non Formal	
	Program Peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase guru yang memiliki kualifikasi Pendidikan lanjutan dan Sertifikat Pendidik	

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
<p>dan informal; (9) Peningkatan kepekaan terhadap warisan budaya daerah nenek moyang dan lingkungan</p>		
<p>(1) Mewujudkan pendidikan kejuruan yang luwes dan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah; (2) Membangun sistem terpadu pendidikan kejuruan (STPK) yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan telah berkembang pada SMK, dan program-program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan</p>	Pendidikan Menengah	APK Pendidikan Menengah
<p>(1) Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran stakeholders dalam fungsi pengawasan; (2) sistem informasi berbasis ICT untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua</p>	Program Manajemen pelayanan Pendidikan	Prosentase Satuan Pendidikan yang menerapkan prinsip - prinsip MBS

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
stakeholders;		
(3) Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dan guru yayasan;	Program Peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase guru yang memiliki kualifikasi Pendidikan lanjutan dan Sertifikat Pendidik

Sumber : RPJMD Kota Bandung Tahun 2014 – 2018, diolah

2.3.2. Kebijakan Pendidikan Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bandung

Rencana Strategis Dinas Pendidikan merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Dinas Pendidikan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap III Tahun 2013-2018, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 diidentifikasi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yakni sebagai berikut :

1. Permasalahan dalam peningkatan akses dan pemerataan pendidikan
 - a. Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah;
 - b. Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah yang ada;
 - c. Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
 - d. Masih adanya kendala budaya dan/atau tradisi yang hidup dimasyarakat yang kurang pentingnya pendidikan;

- e. Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.

2. Permasalahan peningkatan mutu pendidikan

- a. Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru dalam strategi, metode dan evaluasi pembelajaran belum dapat memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kompetensi siswa secara berkelanjutan belum berkembang pada semua sekolah;
- b. Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran;
- c. Belum terpenuhinya kesejahteraan minimal guru;
- d. Belum meratanya disiplin guru dalam melaksanakan tugas;
- e. Inovasi dalam perencanaan kurikulum belum merata pada semua sekolah, dan sekolah level bawah cenderung ketidaksiapannya semakin tinggi, sekolah mempersiapkan pelaksanaan BBE/Life Skills sebagai pendekatan tereduksi pada lingkup vokasional;
- f. Media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah;
- g. Internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik;
- h. Kebijakan dan implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah sebagai media belajar masih lemah;
- i. Kendali mutu kendali pembelajaran melalui efektivitas kinerja pengawas pembina dan kepala sekolah perlu dikembangkan melalui penetapan kebijakan bersama yang terprogram;
- j. Kolaborasi dalam pembaharuan kegiatan belajar melalui kerja sama antara guru belum berkembang

dengan baik sebagai bagian dari dinamika budaya



memenuhi kebutuhan perkembangan siswa terdapat permasalahan seperti belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan hal ini disebabkan karena:

1. Belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;
 2. Kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawasan;
 3. Belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi sebagai sumber data primer;
 4. Kurangnya dukungan dana operasional dan alat transportasi untuk pendataan
- e. sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategik dan program tahunan pada tingkat kota maupun tingkat sekolah belum berkembang baik;
- f. proses pelaksanaan tugas yang berbasis perencanaan masih sangat lemah;
- g. sekolah kurang dapat berfungsi optimal sebagai wahana belajar yang terencana;
- h. sistem evaluasi dapat berfungsi sebagai bahan perbaikan belajar-mengajar dan manajemen pelaporan untuk pengembangan data pada tingkat sekolah masih sangat lemah;
- i. permasalahan dalam bidang manajemen pendidikan adalah, tidak jelasnya konsep otonomi daerah dibidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999, masih tingginya peran pemerintah pusat dalam masalah-masalah teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
- j. masih rendahnya kinerja manajemen birokrasi pendidikan, kurang tersedianya data pendidikan yang mutakhir dan akuntabel yang bisa dijadikan acuan

- bagi perencanaan dan pengendalian program pendidikan;
- k. dana-dana pusat (APBN) untuk pengelolaan pendidikan dan pengalokasian seharusnya diberikan sepenuhnya kepada daerah itu sendiri agar pemanfaatannya akan lebih efisien dan efektif karena disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
 - l. verifikasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Sekolah belum melibatkan seluruh stake holders sekolah secara transparan, serta belum optimumnya dalam pengelolaan administrasi keuangan sekolah, lebih ditingkatkan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan yang dikelola dengan baik, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dana yang berasal dari masyarakat;
 - m. pengelolaan bantuan keuangan terhadap sekolah maupun siswa perlu terpantau dengan baik untuk meningkatkan pemberdayaan dana secara efektif;
 - n. belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatkan mutu pengorganisasian yang lebih efektif;
 - o. standar mutu kinerja personal dan lembaga belum ditetapkan sebagai bagian dari program lembaga yang juga tercermin dalam implementasi kegiatan dan evaluasi.

Permasalahan diatas kemudian ditempatkan dalam agenda kebijakan (*agenda setting*), dan mengaitkannya pada Visi, Misi, Tujuan sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagaimana terurai dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Agenda Setting Kebijakan Pendidikan Dalam
Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Bermutu, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan; 2. Mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu; 3. Meningkatkan sarana dan prasana pendidikan yang berwawasan lingkungan; 4. Meningkatkan profesionalisme dan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 5. Mengembangkan Pendidikan Karakter menuju good governance melalui manajemen pendidikan yang akuntabel dan transparan; 6. Penyelenggaraan Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja. 	Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sumber Daya yang cerdas sejak dini 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas akses penyelenggaraan pendidikan dasar 3. Meningkatnya kualitas akses pendidikan Non Formal 4. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 5. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang Pendidikan

Sumber : Renstra Disdik Kota Bandung Tahun 2014 – 2018, diolah

Strategi dan Arah Kebijakan yang ditempuh guna mewujudkannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pendidikan Kota Bandung

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun pada tahun 2017. 2. Pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMA/SMK/MA/ dan Warga Belajar. 3. Perluasan sekolah inklusif SD/SMP/SMA 4. Penuntasan buta aksara. 5. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). 7. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). 8. Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada Standar Pendidikan Nasional (SPN).
Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan dan penggunaan sumber daya utama (digital library infrastruktur, ICT, perpustakaan sekolah dan laboratorium). 2. Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru. 3. Pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran. 4. Melaksanakan Kemitraan Global. 5. Standar kualifikasi dan kompetensi guru. 6. Rehabilitasi Ruang Kelas yang

	Rusak. 7. Peningkatan kualitas pendidikan non-formal dan informal (PNFI).
Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pendidikan kejuruan yang luwes dan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah. 2. Membangun sistem terpadu pendidikan kejuruan (STPK) yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan telah berkembang pada SMK dan program-program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kewirausahaan).
Tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran <i>stakeholders</i> dalam fungsi pengawasan. 2. Sistem informasi berbasis ICT untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua <i>stake-holders</i>. 3. Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dan guru yayasan.

Sumber : Renstra Disdik Kota Bandung Tahun 2014 – 2018, diolah

2.3.3. Perda Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Formulasi kebijakan pendidikan dalam Perda Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dapat dilihat dari konsiderans “Menimbang” huruf c yang berbunyi :

“bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung agar lebih berdayaguna dan berhasil guna maka diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan dan pengendalian serta pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal”

Setidaknya terdapat 3 (tiga) kebijakan pendidikan yang hendak diimplementasikan di Kota Bandung yakni :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ;
2. Pengawasan dan pengendalian ; dan
3. Pemberian pelayanan pendidikan secara optimal

Pasal 8 Perda 15/2008 menyebutkan secara eksplisit strategi pembangunan pendidikan yang akan dilakukan di kota Bandung meliputi :

- a. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
- b. Pengembangan dan Pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
- c. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- d. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- e. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
- g. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
- h. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
- i. Pelaksanaan wajib belajar;
- j. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
- k. Pemberdayaan peran masyarakat;
- l. Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
- m. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

2.4. Tinjauan Sekolah di Kota Bandung

Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin yaitu: *skhole, scola, scolae* atau *skhola* yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang, dimana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni).

Sekolah adalah suatu lembaga yang memang dirancang khusus untuk pengajaran para murid (siswa) di bawah pengawasan para guru. Kebanyakan dalam sebuah negara mempunyai model sistem pendidikan formal yang mana hal ini sifatnya wajib. Selain itu sistem ini jugalah yang membuat para siswa bisa mengalami kemajuan dengan melalui serangkaian sekolah tersebut.

2.4.1. Jumlah Sekolah di Kota Bandung

Data menunjukkan bahwa jumlah sekolah di Kota Bandung baik negeri maupun swasta untuk tiap jenjang pendidikan relatif banyak. Menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Kota Bandung, jumlah sekolah di kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. SD Negeri dan Swasta sebanyak 820 sekolah ;
2. SMP dan Swasta sebanyak 232 sekolah ;
3. SMA Negeri dan swasta sebanyak 135 sekolah ;
4. SMK Negeri dan swasta sebanyak 126 sekolah

Adapun detail jumlah sekolah tiap kecamatan terurai dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Sekolah Tiap Kecamatan di Kota Bandung

NO	KECAMATAN	SD		JML	SMP		JML			JML			JML
		N	S		N	S		N	S		N	S	
1	Kec. Andir	19	18	37	4	15	19	2	14	16	0	4	4
2	Kec. Antapani	19	3	22	2	3	5	1	1	2	0	1	1
3	Kec. Arcamanik	18	7	25	1	9	10	0	3	3	0	2	2
4	Kec. Astananyar	30	6	36	1	5	6	0	2	2	0	6	6
5	Kec. Babakan Ciparay	37	7	44	3	2	5	1	0	1	0	0	0
6	Kec. Bandung Kidul	12	3	15	1	2	3	0	1	1	0	1	1
7	Kec. Bandung Kulon	32	9	41	0	6	6	0	3	3	0	3	3
8	Kec. Bandung Wetan	5	15	20	4	8	12	1	5	6	1	1	2
9	Kec. Batununggal	30	5	35	3	3	6	0	0	0	1	1	2
10	Kec. Bojong Loa Kaler	15	5	20	2	6	8	1	5	6	0	4	4
11	Kec. Bojong Loa Kidul	16	7	23	1	8	9	0	4	4	0	6	6
12	Kec. Buah Batu	23	3	26	2	4	6	1	2	3	5	4	9
13	Kec. Cibeunying Kaler	16	4	20	1	5	6	0	5	5	0	9	9
14	Kec. Cibeunying Kidul	37	6	43	2	5	7	2	1	3	1	3	4
15	Kec. Cibiru	23	1	24	1	5	6	1	5	6	0	5	5
16	Kec. Cicendo	30	14	44	3	15	18	2	8	10	2	7	9
17	Kec. Cidadap	11	6	17	1	5	6	0	3	3	0	2	2
18	Kec. Cinambo	6	0	6	0	2	2	0	0	0	0	2	2
19	Kec. Cobleng	36	8	44	2	10	12	3	10	13	0	3	3
20	Kec. Gedebage	9	1	10	1	0	1	1	0	1	1	1	2
21	Kec. Kiaracondong	38	3	41	2	6	8	2	3	5	0	11	11
22	Kec. Lengkong	17	12	29	2	11	13	3	9	12	4	14	18
23	Kec. Mandalajati	20	2	22	1	2	3	0	2	2	0	1	1
24	Kec. Panyileukan	8	2	10	0	6	6	0	1	1	0	2	2
25	Kec. Rancasari	13	2	15	2	1	3	1	0	1	0	0	0
26	Kec. Regol	28	9	37	4	8	12	1	5	6	0	3	3
27	Kec. Sukajadi	29	10	39	1	3	4	1	4	5	0	2	2
28	Kec. Sukasari	23	6	29	3	8	11	0	3	3	0	3	3
29	Kec. Sumur Bandung	18	9	27	2	7	9	2	5	7	1	5	6
30	Kec. Ujungberung	18	1	19	2	8	10	1	4	5	0	4	4
JUMLAH		636	184	820	54	178	232	27	108	135	16	110	126

Sumber : Dapodik Disdik Kota Bandung 2015

2.4.2. Jumlah Murid dan Jumlah Guru PNS di Kota Bandung

Penduduk usia sekolah di Kota Bandung dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok umur yaitu : usia 4 – 6 tahun untuk TK/TPA/KB/SPS, usia 7 – 12 tahun untuk SD/MI, usia 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs, dan usia 16 – 18 tahun untuk SMA/MA/SMK. Berikut jumlah murid per-Kecamatan di Kota Bandung.

Tabel 2.7
Jumlah Murid Per-Kecamatan Kota Bandung

NO	KECAMATAN	SISWA SD	SISWA SMP	SISWA SMA	SISWA SMK
1	Kec. Andir	10.401	7.968	3.990	2.872
2	Kec. Antapani	6.664	2.814	1.223	49
3	Kec. Arcamanik	8.873	3.219	516	1.058
4	Kec. Astananyar	9.231	1.837	410	3.415
5	Kec. Babakan Ciparay	11.539	3.834	1.055	-
6	Kec. Bandung Kidul	3.798	1.467	209	57
7	Kec. Bandung Kulon	11.947	2.337	453	1.065
8	Kec. Bandung Wetan	6.549	6.535	3.417	1.442
9	Kec. Batununggal	8.670	4.441	-	1.326
10	Kec. Bojong Loa Kaler	5.953	4.978	2.020	972
11	Kec. Bojong Loa Kidul	8.015	2.048	342	1.312
12	Kec. Buah Batu	7.657	3.697	1.311	7.207
13	Kec. Cibeunying Kaler	5.439	3.535	1.582	5.413
14	Kec. Cibeunying Kidul	10.247	4.905	2.648	2.521
15	Kec. Cibiru	8.758	1.808	2.209	1.111
16	Kec. Cicendo	11.145	6.648	4.907	4.816

17	Kec. Cidadap	4.211	2.053	242	429
18	Kec. Cinambo	2.076	214	-	158
19	Kec. Coblong	10.939	6.002	6.237	1.062
20	Kec. Gedebage	2.451	206	971	2.509
21	Kec. Kiaracondong	11.262	5.303	2.961	3.838
22	Kec. Lengkong	8.593	5.544	5.880	8.806
23	Kec. Mandalajati	6.470	1.488	356	321
24	Kec. Panyileukan	3.920	1.198	138	648
25	Kec. Rancasari	6.756	3.093	1.358	-
26	Kec. Regol	9.885	8.537	3.166	2.266
27	Kec. Sukajadi	9.287	1.725	1.831	785
28	Kec. Sukasari	7.944	6.030	1.083	759
29	Kec. Sumur Bandung	6.439	4.294	2.947	2.660
30	Kec. Ujungberung	7.392	5.751	1.907	387

Sumber: Dapodik Disdik Kota Bandung Tahun 2015, diolah

2.4.3. Ketersediaan Ruang Kelas di Kota Bandung

Ruang kelas adalah tempat pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan (Permendiknas 24 tahun 2007). Berikut ketersediaan ruang kelas berdasarkan jenjang pendidikan per-kecamatan di kota Bandung :

Tabel 2.8
Ketersediaan Ruang Kelas Per-Kecamatan
di Kota Bandung

NO	KECAMATAN	RUANG KELAS			
		SD	SMP		
1	Kec. Andir	267	224	147	20
2	Kec. Antapani	141	68	36	4
3	Kec. Arcamanik	216	90	21	35
4	Kec. Astananyar	187	62	15	112
5	Kec. Babakan Ciparay	179	81	30	-
6	Kec. Bandung Kidul	73	49	15	7
7	Kec. Bandung Kulon	221	50	21	6
8	Kec. Bandung Wetan	194	196	121	67
9	Kec. Batununggal	182	101	-	34
10	Kec. Bojong Loa Kaler	134	132	62	29
11	Kec. Bojong Loa Kidul	179	64	20	23
12	Kec. Buah Batu	134	106	51	118
13	Kec. Cibeunying Kaler	134	101	37	113
14	Kec. Cibeunying Kidul	195	106	80	62
15	Kec. Cibiru	136	64	81	31
16	Kec. Cicendo	308	203	179	89
17	Kec. Cidadap	121	48	9	6
18	Kec. Cinambo	46	7	-	7
19	Kec. Coblong	317	176	154	48
20	Kec. Gedebage	59	1	29	62
21	Kec. Kiaracondong	190	149	84	142
22	Kec. Lengkong	258	180	139	287
23	Kec. Mandalajati	96	28	16	3
24	Kec. Panyileukan	68	44	12	20
25	Kec. Rancasari	98	70	32	-
26	Kec. Regol	311	216	81	46
27	Kec. Sukajadi	242	52	58	30
28	Kec. Sukasari	238	140	35	29
29	Kec. Sumur Bandung	166	154	97	89
30	Kec. Ujungberung	89	132	59	13
JUMLAH		5.179	3.094	1.721	1.532

Sumber: Dapodik Disdik Kota Bandung Tahun 2015, diolah

2.5. Tinjauan Kependudukan Kota Bandung

2.5.1. Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Jumlah penduduk kota Bandung pada tahun 2014 adalah sebanyak 2.470.802 jiwa (Bandung Dalam Angka 2015, BPS Kota Bandung). Jumlah penduduk usia sekolah di Kota Bandung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Di Kota Bandung

Penduduk Usia Sekolah	
Usia	Jumlah
Usia 4-6 Tahun	129.195
Usia 7-12 Tahun	264.351
Usia 13-15 Tahun	139.583
Usia 16 -18 Tahun	137.417

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung 2014 - 2018

2.6. Tinjauan Kewilayahan Kota Bandung

Secara administratif pemerintahan, Kota Bandung terbagi dalam 30 kecamatan, 151 Kelurahan, 1567 Rukun Warga (RW) dan 9733 Rukun Tetangga (RT).

Sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, memiliki kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut:

- a. Mengembangkan 2 (dua) pusat primer yaitu Inti Pusat Kota yang berada di Alun-alun untuk wilayah Bandung Barat dan Gedebage untuk wilayah Bandung Timur.

- b. Membagi Wilayah kota menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), masing masing dilayani oleh satu pusat sekunder, terdiri dari pusat sekunder Setrasari, melayani WP Bojonegara; pusat sekunder sadang serang, melayani WP Cibeunying; Pusat Sekunder Kopo Kencana, melayani WP Tegalega; Pusat Sekunder Turangga, melayani WP Karees; Pusat Sekunder Arcamanik, melayani WP Ujungberung; dan Pusat Sekunder Margasari melayani WP Gedebage.

Beberapa pengembangan kawasan budidaya Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Kota Bandung

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	Kawasan Perumahan	<p>Perumahan Kepadatan Tinggi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Astanaanyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiaracondong, Antapani, dan Cibeunying Kidul <p>Perumahan Kepadatan Sedang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler, Mandalajati, Arcamanik, Rancasari, dan Cibiru <p>Perumahan Kepadatan Rendah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Cidadap, Ujung Berung, Gedebage, Cinambo, dan

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
		<p>Panyileukan</p> <p>Pengembangan secara vertikal diperkenankan pada kawasan perumahan kepadatan sedang sampai tinggi</p> <p>Pembatasan pembangunan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kawasan Bandung Utara.</p>
2	Kawasan Perdagangan Dan Jasa	<p>Kawasan Jasa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan ke wilayah Bandung Timur • Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, dan sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya <p>Pasar Tradisional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage • Pembangunan kembali kawasan Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom, dan pasar lainnya. • Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya dan relokasi pasar Lingkungan kelurahan/kecamatan • Pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Jalan Sukarno-Hatta. <p>Pusat Perbelanjaan :</p>

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pusat belanja di Wilayah Bandung Barat • Pengembangan pusat belanja ke Wilayah Bandung Timur • Pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor
3	Kawasan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi dan kota pada lokasi yang sudah berkembang • Mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage
4	Kawasan Industri dan Pergudangan	<p>Kawasan Industri Ringan dan Pergudangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan industri kecil yang ada di lingkungan perumahan • Mengembangkan industri kecil dan menengah ke Kecamatan Ujung Berung, Cibiru dan Gedebage • Kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran kota yang ditunjang oleh akses yang memadai akan dikembangkan ke lokasi yang memiliki akses jalan arteri primer dan/atau akses peti kemas Gedebage <p>Industri Rumah Tangga :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan dan pengembangan industri rumah tangga • Pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga • Revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
		industri rumah tangga
5	Kawasan Wisata Buatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah • Pembangunan obyek wisata di Wilayah Bandung Timur • Mempertahankan obyek wisata pendidikan dan wisata budaya kota • Pembangunan sarana konferensi ke arah Wilayah Bandung Timur • Pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan perumahan
6	Kawasan Pertanian	Mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di Kecamatan Mandalajati, Ujung Berung dan Cibiru.

Sumber: RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031

Kebijakan ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Perda No.18 Tahun 2011), adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Kebijakan Ruang Kota Bandung

Aspek	Penjelasan
Kebijakan struktur tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan dua PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur; • Membagi daerah menjadi delapan SWK, masing-masing dilayani oleh satu SPK; • Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata; • Menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala

Aspek	Penjelasan
	pelayanannya; dan <ul style="list-style-type: none"> • Menyeraskan sebaran fungsi kegiatan primer dan sekunder dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.
Arahan pengembangan pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian Timur; • Mengendalikan bagian Barat daerah yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi; dan • Membatasi pembangunan di Bandung bagian Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya.
Kebijakan pendukung struktur tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Menyempurnakan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana (jaringan) transportasi yang ada untuk mendukung perkembangan pusat primer dan sekunder; • Mengembangkan jalan alternatif dengan memprioritaskan jalan tembus yang sudah direncanakan; dan • Meningkatkan akses melalui pengembangan jalan bebas hambatan dalam kota, pembangunan jalan lingkar utara dan/atau akses utara selatan di Bandung Timur.

Sumber: RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031

BAB III

METODOLOGI DAN PENDEKATAN

Bab ini akan menguraikan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam melaksanakan kajian. Kesemuanya kemudian dirangkum dalam skema kerangka pikir kajian yang akan dilakukan

3.1. Pendekatan Kajian

Berdasarkan ruang lingkup studi sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, kajian ini akan menggunakan pendekatan campuran yakni kuantitatif dan kualitatif. Menurut Emzir (2009:28), pendekatan Kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma postpositivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Sehingga dalam penelitian kuantitatif, sesuai dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto:2006).

Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Emzir (2009:28), merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivist (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang secara sosial dan historis dibangun dengan maksud

mengembangkan suatu teori atau pola) atau pandangan advokasi/partisipatori (seperti orientasi politik, isu, kolaboratif, atau orientasi perubahan) atau keduanya. Pendekatan ini juga menggunakan strategi penelitian seperti naratif, fenomenologis, etnografis, studi grounded theory, atau studi kasus. Peneliti mengumpulkan data penting secara terbuka terutama dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari data. Sehingga dalam penelitian kualitatif menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini terjadi secara lamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjaringan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya (Arikunto:2006)

3.2. Metode Kajian

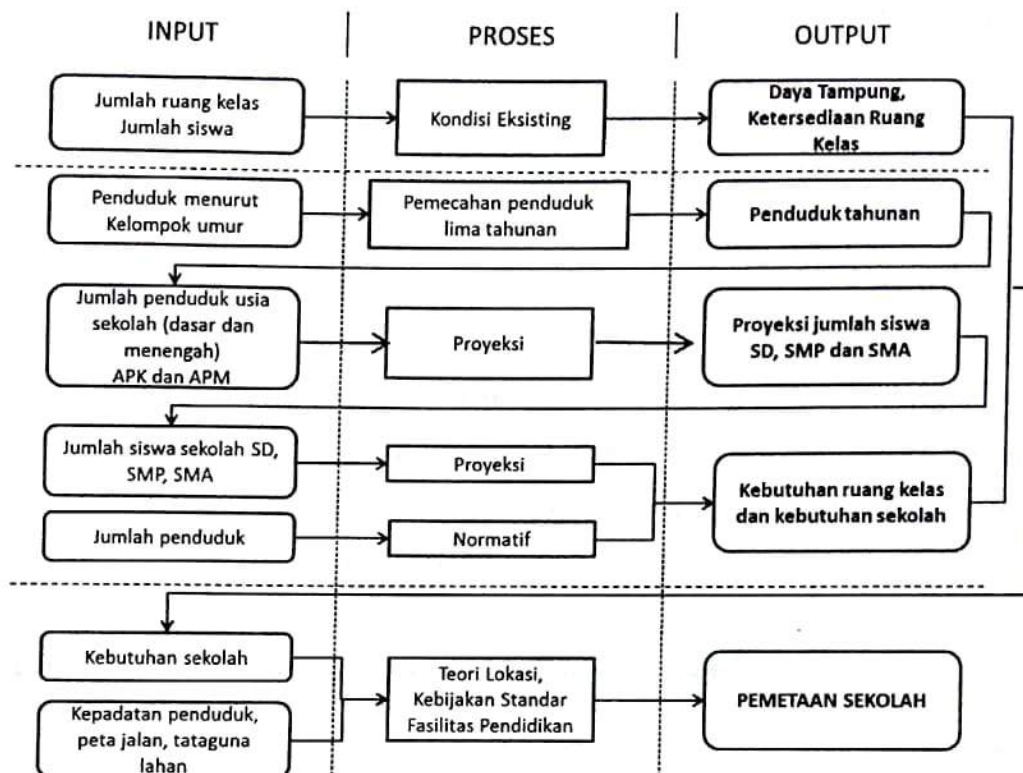
Yang dimaksud dengan metode kajian adalah metode pelaksanaan kajian yang digunakan dalam melakukan penelitian, berisi tentang kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, teknik sampling, dan teknik analisis data.

3.2.1. Kerangka Analisis

Kerangka analisis yang digunakan dalam kajian pemetaan sekolah berbasis kependudukan dan kewilayahan kota Bandung 2015 dapat diuraikan dalam gambar diagram analisis sebagai berikut :

Gambar 3.1.

Gambar Diagram Analisis



3.2.2. Data Yang Digunakan

Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian, dilakukan pengumpulan data terhadap objek yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan permasalahan di kawasan penelitian, data dimaksud ini terdiri dari:

- Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
- Data Sekunder, yakni data yang bersumber dari berbagai instrumen kebijakan, statistik, literatur serta data-data lainnya yang telah tersedia terkait obyek kajian.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan kajian. Adapun teknik pengumpulan data dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Primer

Data primer yang dibutuhkan dalam kajian ini akan didapatkan dengan cara observasi (pengamatan) di lapangan.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan peneliti dengan melalui penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek studi.

3.2.4. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan yang dilakukan masih merupakan data mentah. Agar data tersebut dapat digunakan untuk penelitian, maka perlu suatu pengolahan dan penyajian data. Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam teknik pengolahan dan penyajian data ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing. Editing merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap data yang masuk, apakah terdapat kekeliruan dalam pengisian atau kurang lengkap, palsu, tidak sesuai dan sebagainya. Editing dilakukan dengan harapan akan diperoleh data yang benar-benar valid dan reliable serta dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Coding. Coding merupakan proses pemberian tanda, simbol ataupun kode pada setiap yang masuk dalam kelompok yang sama. Tanda tersebut dapat berupa angka atau huruf.

- c. **Tabulating.** Tabulating yang merupakan tahap memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel silang, gambar, dan grafik. Sedangkan untuk data sekunder tidak diperlukan lagi pengolahan lebih lanjut, karena data tersebut telah disajikan secara sistematis dan untuk penyajiannya disesuaikan dengan analisis yang dilakukan.

3.2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik).

Teknik analisis yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari 2 (dua) yakni sebagai berikut :

- a. **Analisis Kualitatif**

Analisis kualitatif merupakan jenis analisis yang menjelaskan suatu masalah/ keadaan bukan dalam besaran angka/ nilai, namun berbentuk uraian, tanggapan kritis,

perbandingan/ komparasi. Jenis analisis kualitatif dibedakan menjadi :

- Deskriptif, yaitu menganalisis keadaan objek studi melalui uraian, pengertian ataupun penjelasan-penjelasan baik terhadap analisis yang bersifat terukur maupun tidak terukur ;
- Normatif, yaitu analisis terhadap keadaan yang seharusnya mengikuti suatu aturan atau pedoman ideal tertentu maupun landasan hukum atau lainnya.
- Komparatif, yaitu menganalisis kondisi objek studi melalui uraian dan penjelasan yang membandingkan antara satu dengan lainnya.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan analisis yang berhubungan dengan angka, bobot, nilai, jumlah dari suatu topik/bahasan. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung besarnya kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah penduduk, penduduk usia sekolah serta APK dan APM untuk sekolah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi, dengan menghitung proyeksi jumlah penduduk usia sekolah, APK, APM serta perhitungan kebutuhan ruang kelas dan kebutuhan sekolah.

3.3. Kerangka Pikir Kajian

Penyusunan dokumen kajian pemetaan sekolah berbasis kependudukan dan kewilayahan di Kota Bandung dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama yaitu Pra-Studi. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan, tujuan, ruang

lingkup serta rumusan keluaran yang akan dicapai. Tahap ini menyertakan juga *need assesment* (penilaian kebutuhan) dari pihak pemberi pekerjaan yakni Dinas Pendidikan Kota Bandung. Need Assesment akan memberikan umpan balik (*feedback*) bagi penyempurnaan rumusan identifikasi permasalahan, tujuan, ruang lingkup serta keluaran kajian.

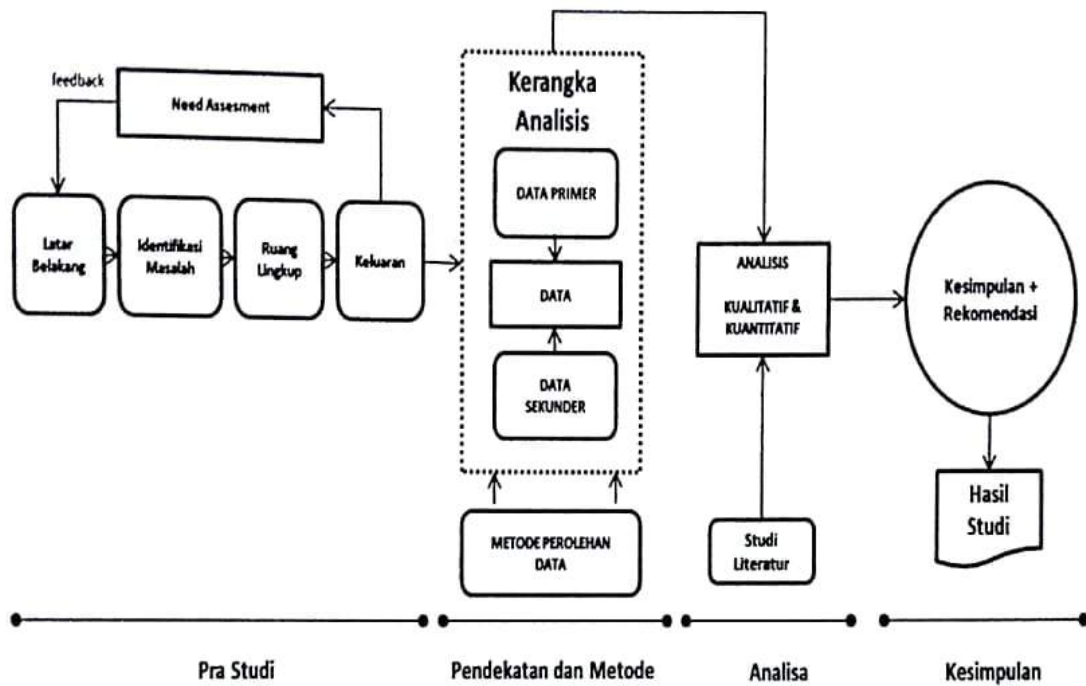
Tahap kedua adalah penentuan pendekatan dan metode berdasarkan tujuan dan ruang lingkup kajian. Dalam tahap ini data yang diperlukan dikumpulkan dengan teknik sesuai metode yang dipilih. Setelah itu dilakukan proses pengolahan dan penyajian data.

Selanjutnya masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga akan dilakukan telaahan/analisa berdasarkan teknik analisa kuantitatif dan kualitatif. Dalam proses ini secara simultan dilakukan studi literatur guna memperkaya analisa dengan landasan teoritis/akademis.

Setelah ketiga tahap di atas dilakukan, maka masuk ke tahap keempat dimana hasil analisa yang telah diperoleh diberikan kesimpulan-kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diformulasikan rekomendasi-rekomendasi bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung. Output dari tahap ini kemudian dituangkan dalam Laporan Akhir hasil kajian.

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai alur dan arah kajian yang akan dilakukan, berikut digambarkan kerangka pikir sebagaimana terurai di atas :

Gambar 3.2
Kerangka Pikir Kajian



BAB IV

TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi literatur terpilih yang dinilai relevan dengan latar belakang dan perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta keluaran studi yang hendak di hasilkan. Tinjauan literatur ini akan memberikan pendalaman teoritis / akademis dalam proses analisa data baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan

4.1 Pemetaan Sekolah

Pemetaan sekolah (*School Mapping*) dalam perencanaan pendidikan, semula dikembangkan oleh perencana pendidikan di Perancis tahun 1959, dalam usaha memecahkan persoalan pembaharuan struktur pendidikan di negara tersebut serta kegiatan riset untuk memenuhi kebutuhan riil. Kemudian secara intensif diuji coba oleh IIEP (*International Institute for Education Planning*). Akhirnya disadari dan diakui kegunaannya oleh UNESCO baik dalam rangka penggunaan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang terbatas secara seefisien mungkin, maupun untuk mendorong meningkatkan perlakuan yang sama atau pemerataan dalam suatu sistem pendidikan.

Pembuatan kebijakan pendidikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas memerlukan suatu dasar acuan yang jelas. Pemetaan pendidikan dimaksudkan sebagai kondisi nyata yang harus diperbaiki oleh pemegang kebijakan. Memperhatikan konsep perencanaan pendidikan komprehensif dari Banghart dan Trull (1973:120) paling sedikit ada empat sistem yang mendukung perencanaan pendidikan yang pada gilirannya akan dituangkan sebagai kebijakan. Sistem tersebut

meliputi sistem aktivitas pendidikan, sistem komunikasi pendidikan, sistem fasilitas pendidikan, dan sistem operasional pendidikan.

Pemetaan pendidikan dapat dijadikan dasar perencanaan pendidikan. Peran pemetaan sekolah sebagai dasar meningkatkan layanan pendidikan ini juga dikemukakan oleh Departemen Pendidikan Filipina (2012) *“School mapping is a set of techniques and procedures used to plan the demand for schools at the local level and to support decision-making on the planning, policy formulation, resource allocation and prioritization of future school development.”* Jelaslah bahwa pemetaan pendidikan ini dapat digunakan pemegang kebijakan, terlebih bagi pemerintah daerah, sebagai pendukung pembuatan keputusan dalam perencanaan, perumusan kebijakan, pengalokasian sumber daya, dan pengutamaan pengembangan sekolah untuk masa depan. Dengan pemetaan sekolah perencanaan pendidikan di daerah akan terbantu.

Pemetaan sekolah mencakup dua pengertian yaitu sebagai proses dan produk atau hasil. Jadi bukan hanya peta. Produk pemetaan yaitu gambaran tentang situasi pendidikan suatu daerah dalam hal variabel pendidikan yang kuantitatif, data demografi, keadaan geografis dan keadaan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Proses pemetaan merupakan kegiatan yang tahapannya meliputi:

- 1 Penyusunan data statistik yang diperlukan, data rutin dan yang bukan rutin;
- 2 Pengadaan peta dalam skala tertentu;
- 3 Penetapan standar tentang sekolah, luas ruangan dan peralatan yang diperlukan, sasaran yang harus dicapai pada waktu tertentu dan standar lain yang relevan;

- 4 Kegiatan mempersiapkan format-format;
- 5 Penganalisaan data yang dikumpulkan dan membandingkannya dengan standar untuk menyusun rekomendasi-rekomendasi tentang upaya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara kuantitatif dan kualitatif (pada tahap kegiatan inilah lokasi sekolah ditentukan).

Melihat luasnya masalah yang digarap dalam pemetaan sekolah dapat dipikirkan betapa banyaknya jenis disiplin atau ilmu pengetahuan yang turut memberikan bantuan. Pemetaan sekolah sangat tergantung kepada sistem pendidikan, peraturan-peraturan atau ketetapan yang ada, keadaan sosial ekonomi dan sebagainya.

School Mapping erat hubungannya dengan perencanaan alokasi dan lokasi sekolah. Yang dimaksud dengan alokasi sekolah adalah jumlah sekolah tertentu yang telah direncanakan atau ditentukan bagi suatu daerah untuk mencapai targetnya. Sedangkan yang dimaksud dengan lokasi sekolah yaitu letak atau *site* sekolah. Artinya menentukan letak fasilitas sekolah yang baru agar fasilitas itu dapat dipergunakan secara optimal sesuai dengan keadaan setempat. Perencanaan lokasi dan alokasi sekolah dapat mencapai sasaran yang optimal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) membangun Sekolah Dasar (SD) di tempat yang banyak anak usia SD,
- (b) membangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di mana terdapat banyak lulusan SD, dan
- (c) membangun Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK) pada jaringan yang terdapat banyak lulusan SMP.

Pemetaan sekolah dalam rangka penyediaan tempat belajar bagi mereka yang tergolong usia sekolah dan merencanakan perubahan struktur organisasi sistem persekolahan. Pemetaan sekolah adalah suatu pendekatan perencanaan makro atau regional yang mempergunakan peta geografis sebagai alat untuk meragakan dan menjelaskan rencana.

Penentuan suatu lokasi suatu sekolah perlu diperhatikan pemetaan sekolah. Pemetaan sekolah tidak hanya sekedar menunjukkan peta atau gambar lokasi lahan serta bangunan sekolah. Pemetaan sekolah tersebut dapat dipergunakan untuk menentukan lokasi sekolah secara tepat berdasarkan kepadatan penduduk dan keadaan jumlah usia anak sekolah serta sarana dan prasarana sekolah secara lengkap. Berkaitan dengan pemilihan lokasi ini maka letak suatu sekolah diharapkan dalam suatu lokasi yang baik dan optimal.

4.2. Penduduk dan Dinamikanya

Penduduk merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk di suatu wilayah merupakan bagian utama dalam suatu negara. Penduduk yang bersifat dinamis dapat mempengaruhi kuantitas penduduk yaitu dapat bertambah atau berkurang kuantitasnya. Menurut Moh. Yasin (1981:13) secara terus menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir, jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan, imigrasi (migrasi masuk) dan emigrasi (migrasi keluar).

Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan hidup penduduk di suatu daerah khususnya kota, timbul permasalahan yang beragam diantaranya permasalahan tata ruang, kepadatan penduduk, kesenjangan

sosial, kebutuhan fasilitas sosial dan hal yang lain yang terkait kebutuhan penduduk.

Pemenuhan kebutuhan penduduk di kota yang bersifat fasilitas sosial dan fasilitas umum menjadi tanggung jawab pemerintah. Fasilitas tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah, secara lebih luas yaitu:

1. Prasarana Lingkungan, adalah kelengkapan lingkungan yang meliputi antara lain: jalan, saluran, pembuangan limbah, serta saluran pembuangan air hujan.
2. Utilitas Umum, adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam area pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum, kebersihan (sampah), serta pemadam kebakaran.
3. Fasilitas Sosial, adalah fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam lingkungan permukiman antara lain: fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, rekreasi kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum

Penduduk di suatu pemukiman salah satunya membutuhkan fasilitas sosial diantaranya fasilitas pendidikan. Pendirian fasilitas pendidikan yang berupa sekolah dipengaruhi oleh kuantitas penduduk yaitu ambang batas minimal penduduk untuk berdirinya suatu sekolah.

4.3 Teori Lokasi

Ada beberapa pengertian tentang definisi lokasi. Hermawan (2009:77) menyebutkan bahwa lokasi adalah letak di permukaan bumi (Hermawan, 2009:77). Hagget dalam Hargito (2009:41-42) mengemukakan bahwa "lokasi merupakan tempat dalam suatu ruang yang dapat dideskripsikan dalam bentuk lokasi absolut dan lokasi relatif". Sedangkan Gunawan (dalam Iskandar, 2009) menyatakan bahwa lokasi merupakan suatu area yang secara umum dapat dikenali atau dibatasi, dimana terjadi suatu kegiatan tertentu.

Studi tentang lokasi adalah melihat kedekatan atau jauhnya satu kegiatan dengan kegiatan lain dan apa dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang berdekatan (berjauhan) tersebut (Tarigan, 2005:122). Menurut Daldjoeni dalam Miarsih mengemukakan bahwa terdapat tiga konsep mengenai lokasi kegiatan: (Miarsih, 2009:xviii)

- (a) Jangkauan (*range*), maksudnya seberapa jauh jarak yang mampu ditempuh untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu.
- (b) Batas ambang penduduk (*reshold*), biasanya jumlah penduduk minimal yang dibutuhkan/membutuhkan suatu fasilitas tertentu.
- (c) Tempat pusat (*central place*), yaitu suatu pusat yang melayani perkotaan dan perdesaan serta wilayah yang lebih besar lagi dari pada wilayahnya sendiri dengan masing-masing tempat pusat tersebut menawarkan batas ambang populasi dan jangkauan fungsi untuk wilayah komplemen yang dilayani

Dengan demikian bahwa lokasi dapat diartikan sebagai suatu tempat di muka bumi yang akan berkaitan dengan interaksi manusia dalam proses untuk mencapainya. Penentuan lokasi baik

secara absolut atau relatif mempertimbangkan dampak dari interaksi spasial untuk tercapainya ketepatan dan optimalnya suatu lokasi

Teori Lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidik alokasi geografis dari sumber - sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2006-122). Salah satu hal yang paling banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang berpergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut. Walter Christaller seorang geografi Jerman pada tahun 1933 mengemukakan teori lokasi yang dikenal sebagai "teori tempat sentral" atau dalam bahasa Inggris disebut "*Central Place Theory*". Christaller menulis buku dalam bahasa Jerman yang berjudul "*Die Zentrale Orte in Suddeutschland: ein Okonomisch-geographische Untersuchung uber die Gesetzmassigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit stadtischen Funktionmen*". Buku tersebut kemudian diterjemahkan oleh E.W. Baskin dengan judul "*Central Places in Southern Germany*". Dalam bukunya Christaller menerangkan pola lokasi berbagai tempat di Jerman Selatan, tempat-tempat tersebut masing-masing merupakan pusat kegiatan jasa tertentu, seperti jasa kesehatan, jasa pemenuhan kebutuhan, jasa tersebut dapat diketemukan berbagai skala (Djojodipuro 1991:134).

Walter Christaller memaparkan teorinya tentang sebaran dan besarnya pemukiman yang dapat diterangkan berdasarkan fungsi pelayanannya. Lima asumsi yang dikemukakan oleh Christaller untuk mengkonstruksikan teori yang sifatnya

keruangan di bidang ekonomi, sebagai berikut: (Dalam Daljoeni, 1992:108)

1. Karena para konsumen yang menanggung ongkos angkutan, maka jarak ke tempat pusat yang dinyatakan dalam biaya dan waktu, amat penting.
2. Karena konsumen yang memikul ongkos angkutan, maka jangkauan (*range*) suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu.
3. Semua konsumen dalam usaha mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, menuju ke tempat pusat yang paling dekat letaknya.
4. Kota-kota berfungsi sebagai *central place* bagi wilayah di sekitarnya. Artinya ada hubungan antara besarnya tempat pusat dan besarnya (luasnya) wilayah pasarana, banyaknya penduduk dan tingginya pendapatan di wilayah yang bersangkutan.
5. Wilayah tersebut digagaskan sebagai dataran dimana penduduknya tersebar merata dan ciri-ciri ekonomisnya sama (besar penghasilan sama)

Secara teoritis, ada dua faktor yang menurut Christaller dianggap berpengaruh terhadap jumlah, luas dan tingkat kepusatan (*central place*), yakni setiap pusat hirarki pasti memiliki dua hal, yaitu:

1. Batas ambang penduduk (*threshold population*) adalah minimum jumlah penduduk yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pelayanan suatu pusat sentral, atau minimum penduduk yang diperlukan untuk kelancaran *supplay* barang dan jasa. Jumlah penduduk pendukung

minimum suatu sarana akan berbeda untuk jumlah penduduk pendukung antar setiap jenis sarana.

2. Jangkauan pasar (*range of a good*) adalah jarak maksimal area suatu pelayanan terhadap lokasi antara tempat tinggal penduduk dengan lokasi tempat mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan, dimana penduduk masih bersedia menempuhnya. Lebih jauh dari jarak yang tersebut, mereka akan mengalihkan atau mencari tempat lain. Jadi jangkauan (*range*) merupakan jarak dari suatu tempat pelayanan dimana *demand* telah menjadi nol. Jarak jangkauan untuk suatu sarana akan berbeda dengan jarak jangkauan dari sarana lainnya tergantung pada jenis barang dan jasa yang dipasarkannya

Menurut Christaller, pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagon (segi enam). Keadaan seperti itu akan terlihat dengan jelas di wilayah yang mempunyai dua syarat: (1) topografi yang seragam sehingga tidak ada bagian wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan pengaruh alam lain dalam hubungan dengan jalur pengangkutan, (2) kehidupan ekonomi yang homogen dan tidak memungkinkan adanya produksi primer, yang menghasilkan padi-padian, kayu atau batu bara.

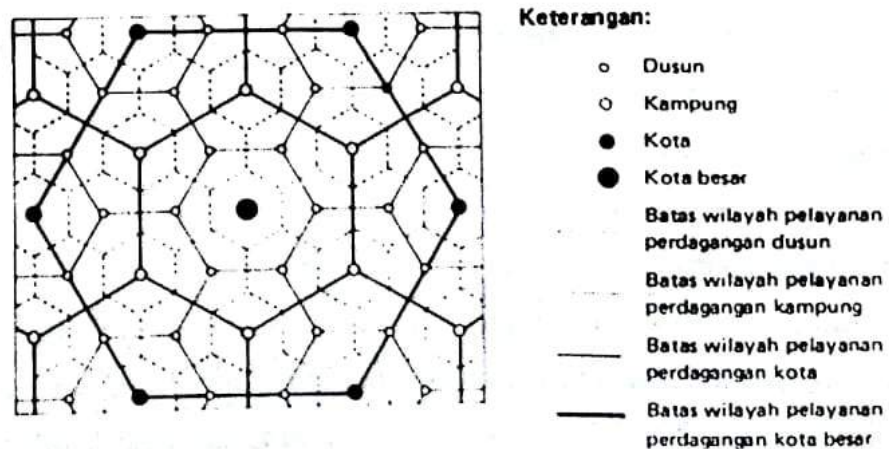
Dalam keadaan yang mempunyai kedua syarat seperti di atas itu akan berkembang tiga hal (Jayadinata, 1999:180) seperti diterangkan di bawah ini.

1. Ajang jasa (ajang niaga) akan berkembang secara wajar di seluruh wilayah dengan jarak dua jam berjalan kaki atau $2 \times 3,5 = 7$ km. Secara teori tiap pusat pelayanan melayani kawasan yang berbentuk lingkaran dengan radius 3,5 km

(satu jam berjalan kaki), jadi pusat wilayah layanan akan terletak di pusat kawasan tersebut. Teori ini disebut teori tempat pemusatan (*central place theory*).

2. Kawasan-kawasan berbentuk lingkaran yang saling berbatasan, walaupun bentuk lingkaran adalah paling efisien, akan mempunyai bagian-bagian yang bertumpang tindih atau bagian-bagian yang senjang (kosong), sehingga bentuk lingkaran itu tidak biasa digunakan untuk kawasan atau wilayahnya. Berhubung dengan itu Christaller mengemukakan bahwa pusat pelayanan akan berlokasi menurut pola heksagon, sehingga wilayah akan saling berbatasan tanpa bertumpang tindih.
3. Dalam wilayah akan berkembang ajang niaga dalam pola heksagon. Yang paling banyak adalah dusun-dusun sebagai pusat perdagangan yang melayani penduduk wilayah pedesaan. Satu dusun dengan dusun lainnya akan menempuh jarak 7 km.

Gambar 4.1
Hipotesis Christaller



Sumber : Jayadinata, 1999

Berdasar pada asumsi Christaller bahwa “orang akan berjalan ke tempat yang paling dekat tempat tinggalnya untuk mendapatkan barang kebutuhan”, maka bagi orang-orang yang tinggal di kawasan pengaruh tempat-tempat sentral yang bertampalan, mereka akan pergi ke tempat sentral yang paling dekat.

Tetapi pada kenyataannya penduduk tersebar secara tidak merata dan mereka harus memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa dari fasilitas yang tersebar di tempat yang terpisah. Namun, orang cenderung memilih fasilitas yang paling aksesibel. Yang dimaksud dengan 'paling aksesibel' adalah: (Rushton, 1979: 32)

1. Total jarak yang ditempuh minimum.
2. Jarak terjauh yang ditempuh adalah minimum.
3. Jumlah penduduk sekitar fasilitas selalu lebih besar dari jumlah tertentu (misal: pusat perbelanjaan).
4. Jumlah penduduk sekitar fasilitas selalu lebih kecil dari jumlah tertentu (misal: puskesmas).

Karenanya terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang turut mempengaruhi apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan di dalam mencapai dan menuju arah suatu lokasi di tinjau dari lokasi lain di sekitarnya (Tarigan, 2006:78). Menurut Tarigan tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut.

Berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi aksesibilitas tersebut, maka dalam suatu analisis tentang kota

atau rencana kota dikenal standar lokasi (*standard for location requirement*) atau standar jarak (Jayadinata, 1999: 160) seperti terlihat pada tabel:

Tabel 4.1 Standar Jarak Dalam Kota

No	Prasarana	Jarak Dari Tempat Tinggal (Berjalan Kaki)
1.	Pusat Tempat Kerja	20 menit s.d 30 menit
2.	Pusat Kota (Pasar dan sebagainya)	30 menit s.d 45 menit
3.	Pasar Lokal	3/4 km atau 10 menit
4.	Sekolah Dasar (SD) dan Tarnan	3/4 km atau 10 menit
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 1/2 km atau 20 menit
6.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	20 atau 30 menit

Sumber : Chapin dalam Jayadinata (1999)

4.4 Tinjauan Fasilitas Sosial

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dinilai sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu untuk pemenuhan kebutuhan tertentu (Mitchell, dalam Rivai A, 1991:30). Dalam pengertian lain jika dikaitkan dengan pemukiman, maka fasilitas adalah suatu aktivitas atau materi yang berfungsi melayani kebutuhan individu atau kelompok individu dalam suatu lingkungan kehidupan. Secara sistematis aktivitas atau materi tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok utama yaitu fasilitas sosial dan fasilitas

fisik. Meskipun berbeda, namun kedua fasilitas tersebut memiliki satu ikatan satu sama lain. Fasilitas sosial dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan kebutuhan masyarakat yang bersifat memberikan kepuasan sosial, mental dan spiritual, yang antara lain terdiri atas fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas rekreasi, fasilitas peribadatan, fasilitas olah-raga, fasilitas perbelanjaan, fasilitas pemerintahan serta fasilitas pemakaman. Fasilitas sosial ini merupakan bagian yang sangat penting dan paling essensial serta dibutuhkan dalam setiap lingkungan pemukiman yang baik. Sedangkan fasilitas fisik dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan kebutuhan masyarakat yang bersifat fisik yang mencakup utilitas umum (Sujarto; 1989:170-171).

Dalam Permendagri No.1 tahun 1987 dijelaskan bahwa prasarana kota terdiri atas 3 kelompok utama yaitu utilitas umum, prasarana lingkungan dan fasilitas sosial. Dijelaskan pula bahwa ke-3 komponen fasilitas infrastruktur tersebut merupakan komponen penunjang yang sangat penting dalam mendukung kualitas kehidupan lingkungan permukiman. Komponen tersebut terdiri atas :

1. Utilitas umum merupakan fasilitas-fasilitas atau bangunan-bangunan yang dibutuhkan guna mendukung sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun oleh adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta, yang terdiri atas : jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan angkutan umum, sarana kebersihan (pembuangan sampah), pemadam kebakaran.
2. Prasarana lingkungan merupakan kelengkapan lingkungan yang mendukung perumahan, yang terdiri atas : jalan,

saluran air kotor atau pembuangan limbah, saluran air bersih atau drainase (saluran pembuangan air hujan).

3. Fasilitas sosial merupakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman, yang terdiri atas : fasilitas kesehatan, pendidikan, olahraga, peribadatan, rekreasi, ruang terbuka, perbelanjaan, serta pemakaman umum.

Keberhasilan keberadaan suatu fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan, dapat dilihat dari tingkatan bagaimana minat dan kesediaan para penghuni perumahan dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Apabila banyak diantara mereka yang mencari fasilitas diluar pemukiman tersebut padahal fasilitas tersebut fungsinya sama, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang tersedia tidak dapat menjawab kebutuhan mereka (Golany, 1976:111)

4.4.1 Fasilitas Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar serta terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk menumbuhkan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU Sisdiknas Tahun 2003). Berdasarkan definisi fasilitas sosial yang telah diuraikan di atas, maka fasilitas pendidikan dapat didefinisikan sebagai aktifitas atau materi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat akan kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan sosial, mental, dan spiritual melalui perwujudan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menjadikan peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Melalui pendidikan akan meningkatkan pengetahuan dan memberikan pengalaman-pengalaman kolektif yang akan mempertemukan berbagai kelompok penduduk. Mempertemukan disini tidak hanya sekedar menyediakan sarana untuk kontak kelompok penduduk, tetapi juga mengurangi perbedaan dalam perkembangan pengetahuan (Bossert,1978, dalam Rivai,1991:54). Dalam kaitannya dengan latar belakang penduduk yang semakin beraneka ragam, maka penyediaan fasilitas pendidikan ini harus dapat atau mampu menjawab kebutuhan yang beragam tersebut.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal, nonformal, dan informal diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Jenjang pendidikan formal terdiri atas :

1. Pendidikan Dasar Merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
2. Pendidikan Menengah Merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA),

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

3. Pendidikan Tinggi Merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Terdapat 4 (empat) jenis fasilitas pendidikan menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.378/KPTS/1987, yaitu :

1. Taman Kanak-Kanak : merupakan fasilitas pendidikan yang paling dasar yang diperuntukkan bagi anak-anak usia (5-6) tahun.
2. Sekolah Dasar : merupakan fasilitas pendidikan yang disediakan untuk anak - anak usia antara (6-12) tahun.
3. Sekolah Menengah Pertama : merupakan fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk melayani anak-anak lulusan Sekolah Dasar.
4. Sekolah Menengah Umum : merupakan fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk melayani anak-anak lulusan SMP.

4.4.2. Standar Sarana-Prasarana Pendidikan

Dalam perencanaan fasilitas pendidikan, ada beberapa standar yang sering digunakan, diantaranya standar dari Departemen Pekerjaan Umum dan Standar Departemen Pendidikan Nasional. Standar-standar tersebut hanya menggunakan jumlah penduduk pendukung sebagai indikator

dalam menentukan kebutuhan sekolah. Walaupun demikian standar umum seperti yang telah disebutkan di atas dapat digunakan sebagai titik awal dalam menentukan standar yang lebih bersifat lokal (Chaplin, 1995 : 385). Dalam hal penerapannya, standar ini harus disesuaikan dengan kondisi, situasi dan karakteristik khusus dari daerah yang bersangkutan.

Pada beberapa standar terdapat jarak jangkauan dan waktu tempuh maksimum dari tempat tinggal ke fasilitas pendidikan. Jarak jangkauan dan waktu tempuh maksimum ini ditetapkan berdasar kepada skala jarak dan waktu tempuh seseorang berjalan kaki (*walking distance scale*). Prinsip jarak jangkauan ini diadopsi dari prinsip *neighborhood unit* dalam perencanaan fasilitas sosial. Tujuannya adalah untuk mengurangi pergerakan yang menggunakan kendaraan bermotor. Dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia Bab IV mengenai Besaran Standar untuk Perencanaan Sarana Lingkungan juga disebutkan bahwa kawasan perumahan merupakan suatu lingkungan hunian yang perlu dilindungi dari gangguan-gangguan, seperti : gangguan suara, kotoran, udara, bau dan lain-lain. Kawasan perumahan harus bebas dari gangguan tersebut dan harus aman serta mudah mencapai pusat-pusat pelayanan serta tempat kerja.

4.4.2.1 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI

Standar sarana dan prasarana ini merupakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007. Standar mencakup sarana dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diatur

tersendiri dalam Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008. Yang diatur dalam kedua standar tersebut meliputi satuan : satuan pendidikan, luasan lahan, bangunan gedung, prasarana dan sarana yang harus dimiliki fasilitas pendidikan beserta ketentuannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) diatur hal-hal sebagai berikut :

1. Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Sedang untuk SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar ;
2. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru. Untuk satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SMP/MTs baru. Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan

- penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru.
3. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI. Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. Sedang untuk SMA tidak ditentukan wilayah pelayanannya dalam Permendiknas 24/2007
 4. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Satu SMK/MAK memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 48 rombongan belajar.
2. Penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK bagi satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1000 (seribu) jiwa dan yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok lain dalam jarak tempuh 3 (tiga) kilo meter melalui lintasan jalan kaki yang tidak membahayakan dapat menyimpangi standar sarana dan prasarana

4.4.2.2. Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Menurut Cipta Karya untuk Perumahan Sederhana

Struktur pemerintahan yang dipergunakan dalam standar perencanaan kebutuhan sarana kota menurut Cipta Karya untuk perumahan sederhana didasarkan pada jumlah penduduk : kelurahan (30.000 jiwa), kecamatan (120.000 jiwa). Pola sebaran penduduknya adalah rukun tetangga (250 jiwa), rukun warga (2.500 jiwa), kelurahan (30.000 jiwa), dan kecamatan (120.000 jiwa).

Tabel 4.2
Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota
Cipta Karya untuk Perumahan Sederhana

Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung(Jiwa)	Luas Tiap Unit (m)
Taman Kanak-Kanak	1000	800
Sekolah Dasar	1600	1800
MTP	6000	2400
MTA	6000	2400

Sumber : Keputusan Menteri PU No.20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun dalam Iskandar 2009

4.4.2.3. Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Departemen Dalam Negeri

Struktur pemerintahan yang digunakan dalam standar perencanaan kebutuhan sarana kota Depdagri ini di dasarkan pada jumlah penduduk : kelurahan (30.000 jiwa), kecamatan (200.000 jiwa). Pola sebaran penduduknya : rukun tetangga (250

jiwa), rukun warga (3000 jiwa), kelurahan (30.000 jiwa), kecamatan (200.000 jiwa), dan kota (1.000.000 jiwa).

Tabel 4.3 Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Departemen Dalam Negeri

Jenis Sarana Kota	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Luas Tiap Unit (m²)
Taman Kanak-Kanak	750	500
Sekolah Dasar	3000	4000
SMTK	30000	9600
SMTA	30000	9600

Sumber : Direktorat Tata Guna Tanah Ditjen Agraria Depdagri Atlas DKI Jakarta Raya, Tanah dan Kegiatan Pembangunan PUBL No.214 Tahun 1982 dalam LPPWK 1993 dalam Iskandar, 2009

4.4.2.4. Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Menurut Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum

Struktur pemerintahan yang digunakan dalam standar perencanaan kebutuhan sarana kota menurut Cipta Karya Departemen PU didasarkan pada jumlah penduduk: kelurahan (30.000 jiwa), kecamatan (120.000 jiwa), wilayah (480.000 jiwa), kota (1.000.000 jiwa). Pola sebaran penduduknya adalah RT (250 jiwa), RW (2500 jiwa), kelurahan (30.000 jiwa), kecamatan (120.000 jiwa), wilayah (480.000 jiwa), dan kota (1.000.000 jiwa).

Tabel 4.4
Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Pendidikan Cipta
Karya Departemen PU

Jenis Sarana Kota	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Jarak	Luas Lahan
Sekolah Dasar	1600	Mudah dicapai dan radius pencapaian maksimum 1000 m, dihitung dari unit terjauh	2000 m ²
SMTB	4800	Radius maksimum 1000 m	9000 m ²
SMTA	4800	Radius maksimum 3 km dari unit yang dilayaninya	12.500m ² (1 lt) 8000m ² (2 lt) 5000m ² (3 lt)

Sumber :Penyempurnaan terhadap Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Pendidikan Cipta Karya Departemen PU, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di Daerah Perkotaan, 2003

Selain pedoman di atas terdapat juga pedoman perencanaan gedung sekolah dari Departemen Pekerjaan Umum, dengan mempertimbangkan aspek-aspek :

1. Fasilitas sekolah menengah umum direncanakan dengan kecenderungan perkembangan kota, rencana induk kota, dan harus disetujui oleh pemerintah daerah setempat.
2. Kepadatan dan potensi penduduk (% penduduk usia sekolah) harus mendukung kegiatan pendidikan sehingga

- selain akan dapat menentukan lokasi sekolah juga harus dapat menentukan jenis dan tipe sekolah.
3. Radius pencapaian ditentukan oleh jarak capai/tempuh, faktor usia, kemampuan fisik siswa, dan sarana transportasi. Radius pencapaian dari sekolah menengah umum ditentukan maksimum 5 km atau 1 jam perjalanan (jalan kaki). Lokasi harus dihindarkan dari lalu lintas berkepadatan tinggi untuk menghindari kecelakaan dan kemacetan.
 4. Kondisi lingkungan sangat menentukan lokasi fisik sekolah. Lingkungan dibedakan dalam lingkungan alami, yaitu : geografi, topografi, klimatologi, flora dan fauna, dan lingkungan buatan seperti bangunan dan lingkungan masyarakat (sosial budaya dan sosial ekonomi). Syarat lokasi bangunan sekolah terhadap lingkungan adalah tercapainya : kenyamanan, ketenangan, kesehatan, dan keamanan.

Tabel 4.5
Kriteria Umum Penempatan Fasilitas Pendidikan
Menurut De Chiara dan Koppelman

Jenis Fasilitas	Daerah jangkauan(meter)	Karakteristik desain	Lokasi
Elementary school (SD)	400 s.d 800	Harus dapat diakses dengan berjalan kaki dari perumahan tanpa menyebrangi jalan. Jika ada jalan yang harus diseberangi, jalan tersebut	Dekat dengan kawasan pemukiman dan fasilitas umum lainnya

		harus <u>jalan</u> <u>lokal.</u>	
Junior High School(SMP)	800 s/d 1200	Harus jauh dari jalan arteri primer dan harus tersedia di jalan setapak dari area lain	Dekat dengan konsentrasi perumahan atau dekat dengan pemukiman
Senior High School (SMA)	1200 s/d 1600	Harus dekat dengan kawasan taman dan jauh dari kebisingan	Terletak di pusat unruk memudahkan akses dan dekat dengan fasilitas umum lainnya

Sumber : Chiara dalam Iskandar, 2009.

Standar lokasi sekolah yang dinyatakan **De Chiara** dan **Koppelman** (1975:24) dengan kriteria umumnya meliputi radius daerah jangkauan, karakteristik desain, dan lokasi yang dianjurkan pada setiap tingkatan pendidikan Rinciannya ada pada tabel 3.4 di atas. Menurut De Chiara dan Koppelman, suatu sekolah menengah yang terdiri dari kombinasi antara sekolah dan taman komunitas sebaiknya diletakkan di tengah-tengah lingkungan perumahan untuk memudahkan akses. De Chiara menyatakan standar aksesibilitas untuk sekolah menengah, yaitu : dapat ditempuh berjalan kaki dengan jarak maksimum antara (1,6 s.d 2,4) km sedangkan bila menggunakan kendaraan bermotor maksimum 4 km

Lebih lanjut Chiara menjelaskan bahwa pada wilayah berkepadatan tinggi, lokasi sekolah harus berada dalam area pada *walking distance* maksimum, sedangkan pada wilayah

berkepadatan rendah, lokasi sekolah dapat berada di luar area pada *walking distance* maksimum tetapi harus terdapat layanan angkutan. Jose Sert (Gallion, 1959: 282), dalam konsep *Neighborhood Unit* menempatkan *elementary school* di tiap pusat *Neighborhood Unit* beradius $\frac{1}{4}$ mil (400 meter) dan dapat dicapai dengan berjalan kaki, dalam 2 buah *Neighborhood Unit* terdapat satu buah *junior high school* (SMP) yang jarak tempuhnya tidak lebih dari 1 mil (1600 meter), dan dalam 4 buah *Neighborhood Unit* terdapat satu buah *senior high school* (SMU) yang jarak tempuhnya tidak melebihi $1 \frac{1}{2}$ mil (2400 meter)

Udjianto (dalam Agustin, 2006:17) konsep *Neighborhood Unit* aspek jarak dan waktu untuk fasilitas masyarakat dibagi ke dalam lima kategori seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Jarak dan Waktu Tempuh dari Tempat Tinggal Ke Lokasi Fasilitas Masyarakat

No	Kategori	Jarak (meter)	Waktu Tempuh (menit)
1	Sangat Dekat	0 - 300	0 - 5
2	Dekat	300 - 600	5 - 10
3	Sedang	600 - 1200	10 - 20
4	Cukup Jauh	1200 - 1300	20 - 40
5	Jauh	1300 >	40 >

Sumber : Udjianto dalam Agustin, 2006

4.5. Pemilihan Kriteria Dalam Evaluasi

Kajian pemetaan sekolah yang dilakukan mempunyai tujuan, sasaran dan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Kesemuanya dikonstruksikan guna memberikan solusi terhadap masalah akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan di kota Bandung. Harapannya tidak lain untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan.

Pemetaan sekolah dilakukan dengan melakukan analisa sebaran sekolah yang ada di kota Bandung baik jenjang pendidikan dasar (SD, SMP) maupun pendidikan menengah (SMA, SMK) dikaitkan dengan dinamika kependudukan dan kewilayahan. Agar langkah analisa sebaran yang dilakukan dapat memberikan informasi yang bernilai bagi pengambil kebijakan bidang pendidikan di kota Bandung, digunakan beberapa kriteria yang ditetapkan berdasarkan asumsi dan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kriteria-kriteria tersebut adalah :

1. Kecukupan (*Adequacy*)

Kriteria kecukupan (*adequacy*) akan melihat apakah kapasitas sekolah di kota Bandung di setiap jenjang pendidikan dapat menampung semua kebutuhan penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan.

2. Keefektifan Pelayanan Pendidikan

Kriteria keefektifan pelayanan pendidikan akan melihat sejauhmana lokasi fasilitas sekolah menjangkau wilayah layanan pendidikan sebagaimana diharapkan. Daerah jangkauan layanan tidak dapat dideliniasi. Oleh karena itu, digunakan asumsi-asumsi untuk membentuk daerah jangkauan layanan fasilitas sekolah. Asumsi-asumsi tersebut yaitu : (1) Pengguna fasilitas sekolah merupakan

penduduk yang berada pada jarak jangkauan pencapaian maksimum fasilitas sekolah di masing-masing jenjang pendidikan (2) Seluruh lokasi fasilitas sekolah memiliki aksesibilitas yang sama ke semua arah. Dengan demikian daerah jangkauan layanan akan dideliniasi tanpa melihat adanya akses jaringan jalan atau hambatan menuju fasilitas sekolah.

3. Keefektifan Pemanfaatan Fasilitas Layanan Pendidikan

Keefektifan pemanfaatan fasilitas layanan pendidikan akan melihat seberapa besar pemanfaatan fasilitas sekolah yang tersebar di kota Bandung oleh penduduk kota Bandung.

BAB V

ANALISA DATA

Bab ini akan menguraikan data yang diperoleh beserta hasil analisa data yang dilakukan sesuai dengan kerangka dan metode analisa yang telah ditetapkan sebelumnya

Analisa data akan diawali dengan deskripsi mengenai kondisi eksisting sekolah di kota Bandung sesuai dengan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 14 UU 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kajian ini yang diuraikan adalah jenjang pendidikan dasar (SD, SMP) dan pendidikan menengah (SMA, SMK).

Output analisis terhadap kondisi eksisting akan memberikan informasi mengenai ketersediaan ruang kelas dan daya tampung dengan cara melihat data dan profil sekolah. Di samping itu kondisi eksisting juga akan memunculkan gambaran indikator pemerataan pendidikan di kota Bandung.

Analisis akan dilakukan dengan mengacu pada Rencana Struktur Ruang sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031. Kota Bandung dibagi menjadi 8 SWK (Sub Wilayah Kota) yang terdiri dari :

1. SWK Bojonagara, mencakup Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
2. SWK Cibeunying, mencakup Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;

3. SWK Tegallega, mencakup Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar;
4. SWK Karees yang mencakup Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
5. SWK Arcamanik, mencakup Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
6. SWK Ujung Berung, mencakup Kecamatan Ujung Berung, Cibiru, Cinambo, Panyileukan;
7. SWK Kordon, mencakup Kecamatan Bandung Kidul dan Buah Batu; dan
8. SWK Gedebage, mencakup Kecamatan Gedebage dan Rancasari.

5.1. Kondisi Eksisting Sekolah di Kota Bandung

5.1.1. Kondisi Sekolah, Siswa, Kelas dan Guru di Kota Bandung

Jumlah sekolah di kota Bandung pada tahun 2015 berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak 820 sekolah ;
2. Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak 232 sekolah ;
3. Sekolah Menengah Atas (Negeri dan Swasta) sebanyak 135 sekolah ;
4. Sekolah Menengah Atas Kejuruan (Negeri dan Swasta) sebanyak 126 sekolah.

Adapun uraian detail jumlah sekolah tiap SWK Kota Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Jumlah Sekolah Tiap Sub Wilayah Kota (SWK)
Kota Bandung

NO	SWK	KECAMATAN	SD		JML	SMP		JML	SMA		JML	SMK		JML
			N	S		N	S		N	S		N	S	
1	Bojonagara	Kec. Sukajadi	29	10	39	1	3	4	1	4	5	0	2	2
		Kec. Sukasari	23	6	29	3	8	11	0	3	3	0	3	3
		Kec. Cicendo	30	14	44	3	15	18	2	8	10	2	7	9
		Kec. Andir	19	18	37	4	15	19	2	14	16	0	4	4
2	Cibeunying	Kec. Cidadap	11	6	17	1	5	6	0	3	3	0	2	2
		Kec. Coblong	36	8	44	2	10	12	3	10	13	0	3	3
		Kec. Bandung Wetan	5	15	20	4	8	12	1	5	6	1	1	2
		Kec. Sumur Bandung	18	9	27	2	7	9	2	5	7	1	5	6
		Kec. Cibeunying Kaler	16	4	20	1	5	6	0	5	5	0	9	9
		Kec. Cibeunying Kidul	37	6	43	2	5	7	2	1	3	1	3	4
3	Tegallega	Kec. Bandung Kulon	32	9	41	0	6	6	0	3	3	0	3	3
		Kec. Babakan Ciparay	37	7	44	3	2	5	1	0	1	0	0	0
		Kec. Bojong Loa Kaler	15	5	20	2	6	8	1	5	6	0	4	4
		Kec. Bojong Loa Kidul	16	7	23	1	8	9	0	4	4	0	6	6
4	Karees	Kec. Astananyar	30	6	36	1	5	6	0	2	2	0	6	6
		Kec. Regol	28	9	37	4	8	12	1	5	6	0	3	3
		Kec. Lengkong	17	12	29	2	11	13	3	9	12	4	14	18
		Kec. Kiaracondong	38	3	41	2	6	8	2	3	5	0	11	11
5	Arcamanik	Kec. Batununggal	30	5	35	3	3	6	0	0	0	1	1	2
		Kec. Arcamanik	18	7	25	1	9	10	0	3	3	0	2	2
		Kec. Antapani	19	3	22	2	3	5	1	1	2	0	1	1
6	Ujungberung	Kec. Mandalajati	20	2	22	1	2	3	0	2	2	0	1	1
		Kec. Ujungberung	18	1	19	2	8	10	1	4	5	0	4	4
		Kec. Cibiru	23	1	24	1	5	6	1	5	6	0	5	5
		Kec. Cinambo	6	0	6	0	2	2	0	0	0	0	2	2
7	Kordon	Kec. Panyileukan	8	2	10	0	6	6	0	1	1	0	2	2
		Kec. Bandung Kidul	12	3	15	1	2	3	0	1	1	0	1	1
		Kec. Buah Batu	23	3	26	2	4	6	1	2	3	5	4	9
8	Gedebage	Kec. Gedebage	9	1	10	1	0	1	1	0	1	1	1	2
		Kec. Rancasari	13	2	15	2	1	3	1	0	1	0	0	0
JUMLAH			636	184	820	54	178	232	27	108	135	16	110	126

Sumber : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2015, diolah

Data jumlah sekolah di atas kemudian disandingkan dengan data jumlah siswa yang ada saat ini di kota Bandung sesuai Dapodik Kota Bandung per 15 Desember 2015, maka akan didapatkan gambaran sebagai berikut :

Tabel 5.2
Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa
Tiap Sub Wilayah Kota (SWK)
Kota Bandung

NO	SWK	KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH				JUMLAH SISWA			
			SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Bojonagara	Kec. Sukajadi	39	4	5	2	9.285	1.722	1.841	780
		Kec. Sukasari	29	11	3	3	8.098	6.031	1.033	775
		Kec. Cicendo	44	18	10	9	11.153	6.729	5.228	4.574
		Kec. Andir	37	19	16	4	10.442	7.957	4.222	2.874
2	Cibeunying	Kec. Cidadap	17	6	3	2	4.210	2.044	249	403
		Kec. Coblong	44	12	13	3	11.024	6.035	6.252	1.056
		Kec. Bandung Wetan	20	12	6	2	6.549	6.600	3.412	1.451
		Kec. Sumur Bandung	27	9	7	6	6.446	4.301	3.188	2.651
		Kec. Cibeunying Kaler	20	6	5	9	5.446	3.526	1.604	5.406
		Kec. Cibeunying Kidul	43	7	3	4	10.244	4.894	2.644	2.519
3	Tegallega	Kec. Bandung Kulon	41	6	3	3	11.944	2.341	480	1.063
		Kec. Babakan Ciparay	44	5	1	-	11.510	3.821	1.055	-
		Kec. Bojong Loa Kaler	20	8	6	4	5.945	4.972	2.020	970
		Kec. Bojong Loa Kidul	23	9	4	6	8.010	2.044	456	1.312
		Kec. Astananyar	36	6	2	6	9.227	1.842	405	3.401
4	Karees	Kec. Regol	37	12	6	3	9.896	8.545	3.149	2.107
		Kec. Lengkong	29	13	12	18	8.628	5.550	5.853	8.913
		Kec. Kiaracondong	41	8	5	11	11.270	5.265	2.957	3.833
		Kec. Batununggal	35	6	-	2	8.721	4.428	-	1.326
5	Arcamanik	Kec. Arcamanik	25	10	3	2	8.933	3.210	513	1.042
		Kec. Antapani	22	5	2	1	6.677	2.814	1.224	49
		Kec. Mandalajati	22	3	2	1	6.465	1.488	353	321
6	Ujungberung	Kec. Ujungberung	19	10	5	4	7.382	5.814	1.935	385
		Kec. Cibiru	24	6	6	5	8.752	1.804	2.234	1.110
		Kec. Cinambo	6	2	-	2	2.092	214	-	158
		Kec. Panyileukan	10	6	1	2	3.918	1.224	134	645
7	Kordon	Kec. Bandung Kidul	15	3	1	1	3.795	1.466	305	55
		Kec. Buah Batu	26	6	3	9	7.640	3.692	1.312	7.248
8	Gedebage	Kec. Gedebage	10	1	1	2	2.452	206	977	2.502
		Kec. Rancasari	15	3	1	-	6.758	3.092	1.358	-
JUMLAH			820	232	135	126	232.912	113.671	56.393	58.929

Sumber : Dapodik Kota Bandung 2015, diolah

Dari data di di atas akan didapatkan hasil analisis berupa informasi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan berupa :

1. Perbandingan Antar Jenjang Pendidikan
2. Rasio Siswa Per Sekolah

Perbandingan Antar Jenjang Pendidikan (PAJ) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara jumlah sekolah pada jenjang lebih rendah dengan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.

Adapun cara untuk menghitung PAJ dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PAJ = \frac{\text{Jumlah sekolah pd jenjang pend tertentu}}{\text{Jumlah sekolah pd jenjang pend yg lebih tinggi}} \times 100$$

Berikut analisis perbandingan antar jenjang pendidikan (PAJ) tiap SWK Kota Bandung :

Tabel 5.3
Perbandingan Antar Jenjang Pendidikan
Tiap Sub Wilayah Kota Bandung

NO	SWK	KECAMATAN	PAJ	
			SD/SMP	SMP/SMA
1	Bojonagara	Kec. Sukajadi	975	80
		Kec. Sukasari	264	367
		Kec. Cicendo	244	180
		Kec. Andir	195	119
2	Cibeunying	Kec. Cidadap	283	200
		Kec. Coblong	367	92
		Kec. Bandung Wetan	167	200
		Kec. Sumur Bandung	300	129
		Kec. Cibeunying Kaler	333	120
		Kec. Cibeunying Kidul	614	233
3	Tegalega	Kec. Bandung Kulon	683	200
		Kec. Babakan Ciparay	880	500

		Kec. Bojong Loa Kaler	250	133
		Kec. Bojong Loa Kidul	256	225
		Kec. Astananyar	600	300
4	Karees	Kec. Regol	308	200
		Kec. Lengkong	223	108
		Kec. Kiaracondong	513	160
		Kec. Batununggal	583	-
5	Arcamanik	Kec. Arcamanik	250	333
		Kec. Antapani	440	250
		Kec. Mandalajati	733	150
6	Ujungberung	Kec. Ujungberung	190	200
		Kec. Cibiru	400	100
		Kec. Cinambo	300	-
		Kec. Panyileukan	167	600
7	Kordon	Kec. Bandung Kidul	500	300
		Kec. Buah Batu	433	200
8	Gedebage	Kec. Gedebage	1.000	100
		Kec. Rancasari	500	300
RATA-RATA			432	203

Sumber : Dapodik Kota Bandung 2015, diolah

Dari tabel di atas, rata-rata perbandingan antar jenjang SD dan SMP adalah sebesar 432. Angka tersebut menunjukkan tingginya kesenjangan antara sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kota Bandung. Kesenjangan tersebut menunjukkan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Bandung yang masih kurang. Jika dilihat dari SWK, maka semua SWK di kota Bandung menunjukkan kurangnya fasilitas SMP.

Untuk beberapa kecamatan, skor PAJ sangat jauh melampaui rata-rata perbandingan antar jenjang SD dan SMP sebesar 432. Artinya jumlah SMP di kecamatan-kecamatan tersebut sangat kurang. Kecamatan-kecamatan dimaksud adalah :

1. Kecamatan Gedebage, SWK 8 Gedebage (skor PAJ = 1000);
2. Kecamatan Sukajadi, SWK 1 Bojonagara (skor PAJ = 975);

3. Kecamatan Babakan Ciparay, SWK 3 Tegalega (skor PAJ = 880);
4. Kecamatan Mandalajati, SWK 5 Arcamanik (skor PAJ = 773);
5. Kecamatan Bandung Kulon, SWK 3 Tegalega (skor PAJ = 683);
6. Kecamatan Cibeunying Kidul, SWK 2 Cibeunying (skor PAJ = 614)
7. Kecamatan Astanaanyar, SWK 3 Tegalega (skor PAJ = 600);

Sedangkan rata-rata perbandingan antar jenjang SMP dan SMA menunjukkan angka sebesar 203. Dengan demikian dilihat dari sisi indikator perbandingan antar jenjang pendidikan (PAJ), jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kota Bandung pun relatif masih kurang. Jika dilihat dari wilayah SWK, maka akan terlihat variasi jumlah fasilitas pendidikan tingkat SMA dan SMK. Beberapa Kecamatan menunjukkan angka yang melampaui jauh rata-rata perbandingan jenjang SMP dan SMA/SMK sebesar 203. Kecamatan-kecamatan dimaksud adalah :

1. Kecamatan Panyileukan, SWK 6 Ujungberung (skor PAJ = 600)
2. Kecamatan Babakan Ciparay, SWK 3 Tegalega (skor PAJ = 500);
3. Kecamatan Sukasari, SWK 1 Bojonagara (skor PAJ = 367)
4. Kecamatan Arcamanik, SWK 5 Arcamanik (skor PAJ = 333);
dan
5. Kecamatan Astanaanyar, SWK 3 Tegalega (skor PAJ = 300);
6. Kecamatan Bandung Kidul, SWK 7 Kordon (skor PAJ = 300);
dan
7. Kecamatan Rancasari, SWK 8 Gedebage (skor PAJ = 300);

Biasanya data pada tabel 5.3 di atas kemudian disandingkan secara langsung pada jumlah siswa pada jenjang SD/SMP dan SMP/SMA di masing-masing kecamatan. Hasilnya akan menjadi bias, karena konklusinya dapat diinterpretasikan tidak seluruhnya jumlah siswa yang mengikuti jenjang pendidikan di SD/SMP yang melanjutkan ke SMP/SMA. Tim Pengkaji mengesampingkan cara seperti ini mengingat untuk hal tersebut ada metode yang dinilai lebih valid yakni Angka Melanjutkan (AM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Disamping itu ada faktor lain yang harus dipertimbangkan seperti preferensi siswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi tidak di wilayah kecamatannya, tidak sesuai dengan keinginan/kemampuannya, atau memang tidak tersedia sekolah pada jenjang dimaksud.

Rasio murid per sekolah di definisikan sebagai perbandingan antar jumlah murid dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan sekolah di suatu daerah. Semakin tinggi angka rasio, berarti tingkat kepadatan sekolah makin tinggi. Pada umumnya terdapat suatu pola bahwa makin tinggi jenjang pendidikan makin padat jumlah murid di sekolah. Kondisi ini juga menunjukkan makin tinggi jenjang pendidikan, makin kurang jumlah sekolahnya.

Rasio murid per sekolah dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$R-M/S = \frac{\text{jumlah murid pada jenjang pend tertentu}}{\text{jumlah sekolah pada jenjang pend tertentu}}$$

Berikut rasio murid per sekolah di Kota Bandung :

Tabel 5.4
Rasio Murid Per Sekolah Tiap Sub Wilayah Kota Bandung

NO	SWK	KECAMATAN	RASIO SEKOLAH			
			SD	SMP	SMA	SMK
1	Bojonagara	Kec. Sukajadi	238	431	368	390
		Kec. Sukasari	279	548	344	258
		Kec. Cicendo	253	374	523	508
		Kec. Andir	282	419	264	719
2	Cibeunying	Kec. Cidadap	248	341	83	202
		Kec. Coblong	251	503	481	352
		Kec. Bandung Wetan	327	550	569	726
		Kec. Sumur Bandung	239	478	455	442
		Kec. Cibeunying Kaler	272	588	321	601
		Kec. Cibeunying Kidul	238	699	881	630
3	Tegalega	Kec. Bandung Kulon	291	390	160	354
		Kec. Babakan Ciparay	262	764	1055	0
		Kec. Bojong Loa Kaler	297	622	337	243
		Kec. Bojong Loa Kidul	348	227	114	219
		Kec. Astananyar	256	307	203	567
4	Karees	Kec. Regol	267	712	525	702
		Kec. Lengkong	298	427	488	495
		Kec. Kiaracondong	275	658	591	348
		Kec. Batununggal	249	738	0	663
5	Arcamanik	Kec. Arcamanik	357	321	171	521
		Kec. Antapani	304	563	612	49
		Kec. Mandalajati	294	496	177	321
6	Ujungberung	Kec. Ujungberung	389	581	387	96
		Kec. Cibiru	365	301	372	222
		Kec. Cinambo	349	107	0	79
		Kec. Panyileukan	392	204	134	323
7	Kordon	Kec. Bandung Kidul	253	489	305	55
		Kec. Buah Batu	294	615	437	805
8	Gedebage	Kec. Gedebage	245	206	977	1251
		Kec. Rancasari	451	1031	1358	0
RATA-RATA			295	490	423	405

Sumber : Dapodik Kota Bandung 2015, diolah

Tabel di atas memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Rata-rata jumlah siswa per sekolah untuk tingkat SD sebesar 295, untuk tingkat SMP sebesar 490, untuk tingkat SMA sebesar 423 dan untuk tingkat SMK sebesar 405.
2. Kesemuanya menunjukkan bahwa di Kota Bandung baik sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP) maupun jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK) menunjukkan kepadatan yang cukup tinggi.
3. Beberapa kecamatan menunjukkan angka rasio murid per sekolah yang sangat mencolok khususnya pada tingkat SMP, SMA dan SMK.
 - a. Untuk tingkat SMP, beberapa kecamatan rasio murid per sekolahnya sangat tinggi. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah : Rancasari (SWK 8 Gedebage, rasio 1.031), Babakan Ciparay (SWK 3 Tegalega, rasio 764), Batununggal (SWK 4 Karees, rasio 738), Regol (SWK 4 Karees, rasio 712) dan Buahbatu (SWK 7 Kordon, rasio 615) ;
 - b. Untuk tingkat SMA, kecamatan-kecamatan yang rasio murid per sekolahnya sangat tinggi adalah : Rancasari (SWK 8 Gedebage, rasio 1.358), Babakan Ciparay (SWK 3 Tegalega, rasio 1.055), Gedebage (SWK 8 Gedebage, rasio 977), Cibeunying Kidul (SWK 2 Cibeunying, rasio 881), dan Antapani (SWK 5 Arcamanik, rasio 612) ;
 - c. Untuk tingkat SMK, kecamatan-kecamatan yang rasio murid per sekolahnya sangat tinggi adalah : Gedebage (SWK 8 Gedebage, rasio 1251), Buahbatu (SWK 7 Kordon, rasio 805), Bandung Wetan (SWK 2 Cibeunying, rasio 726), Andir (SWK 1 Bojonagara, rasio 719), dan Regol (SWK 4 Karees, rasio 702)

4. Pada umumnya terdapat suatu pola bahwa makin tinggi jenjang pendidikan makin padat jumlah murid di sekolah. Kondisi ini juga menunjukkan makin tinggi jenjang pendidikan, makin kurang jumlah sekolahnya. Namun di kota Bandung tidaklah demikian kondisinya. Untuk SMA nilai rata-ratanya lebih rendah dari SMP yaitu 423 murid. Begitu juga untuk SMK yang nilai rata-ratanya di bawah SMP yakni 405 murid.

Guna lebih mendapatkan gambaran yang komprehensif, data jumlah sarana prasarana, dalam hal ini ruang kelas akan ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.4
Jumlah Kelas Tiap Jenjang Pendidikan Tiap
Sub Wilayah Kota Bandung

NO	SWK	KECAMATAN	RUANG KELAS			
			SD	SMP	SMA	SMK
1	Bojonagara	Kec. Sukajadi	242	52	58	30
		Kec. Sukasari	238	140	35	29
		Kec. Cicendo	308	203	179	89
		Kec. Andir	267	224	147	20
2	Cibeunying	Kec. Cidadap	121	48	9	6
		Kec. Coblong	317	176	154	48
		Kec. Bandung Wetan	194	196	121	67
		Kec. Sumur Bandung	166	154	97	89
		Kec. Cibeunying Kaler	134	101	37	113
		Kec. Cibeunying Kidul	195	106	80	62
3	Tegallega	Kec. Bandung Kulon	221	50	21	6
		Kec. Babakan Ciparay	179	81	30	0
		Kec. Bojong Loa Kaler	134	132	62	29
		Kec. Bojong Loa Kidul	179	64	20	23
		Kec. Astananyar	187	62	15	112
4	Karees	Kec. Regol	311	216	81	46
		Kec. Lengkong	258	180	139	287
		Kec. Kiaracandong	190	149	84	142
		Kec. Batununggal	182	101	0	34

5	Arcamanik	Kec. Arcamanik	216	90	21	35
		Kec. Antapani	141	68	36	4
		Kec. Mandalajati	96	28	16	3
6	Ujungberung	Kec. Ujungberung	89	132	59	13
		Kec. Cibiru	136	64	81	31
		Kec. Cinambo	46	7	0	7
		Kec. Panyileukan	68	44	12	20
7	Kordon	Kec. Bandung Kidul	73	49	15	7
		Kec. Buah Batu	134	106	51	118
8	Gedebage	Kec. Gedebage	59	1	29	62
		Kec. Rancasari	98	70	32	0
JUMLAH			5.179	3.094	1.721	1.532

Sumber : Dapodik Kota Bandung 2015, diolah

Selain jumlah kelas sebagaimana terurai dalam tabel 5.4 di atas, jumlah guru (PNS dan Non PNS) akan ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.5
Jumlah Guru Tiap Jenjang Pendidikan Tiap
Sub Wilayah Kota Bandung

NO	SWK	KECAMATAN	JUMLAH GURU			
			SD	SMP	SMA	SMK
1	Bojonagara	Kec. Sukajadi	507	101	171	87
		Kec. Sukasari	460	379	94	106
		Kec. Cicendo	562	439	494	461
		Kec. Andir	541	431	491	213
2	Cibeunying	Kec. Cidadap	239	117	51	51
		Kec. Coblong	652	347	643	100
		Kec. Bandung Wetan	397	395	313	152
		Kec. Sumur Bandung	391	246	287	286
		Kec. Cibeunying Kaler	277	167	198	381
		Kec. Cibeunying Kidul	524	236	216	192
3	Tegalega	Kec. Bandung Kulon	590	131	61	88
		Kec. Babakan Ciparay	488	186	72	-
		Kec. Bojong Loa Kaler	272	224	187	103
		Kec. Bojong Loa Kidul	382	142	77	139
		Kec. Astananyar	440	111	47	285

4	Karees	Kec. Regol	552	432	227	160
		Kec. Lengkong	504	354	577	843
		Kec. Kiaracondong	558	242	289	394
		Kec. Batununggal	441	248	-	167
5	Arcamanik	Kec. Arcamanik	522	217	79	89
		Kec. Antapani	355	165	120	16
		Kec. Mandalajati	348	78	41	23
6	Ujungberung	Kec. Ujungberung	346	299	200	49
		Kec. Cibiru	381	115	210	102
		Kec. Cinambo	97	13	-	38
		Kec. Panyileukan	192	111	20	59
7	Kordon	Kec. Bandung Kidul	200	92	42	18
		Kec. Buah Batu	361	179	98	748
8	Gedebage	Kec. Gedebage	131	14	85	236
		Kec. Rancasari	298	161	82	-
JUMLAH			12.008	6.372	5.472	5.586

Sumber : Dapodik Kota Bandung 2015, diolah

Pengolahan data di atas akan menghasilkan informasi berupa :

1. Rasio Murid Per Kelas ;
2. Rasio Murid Per Guru ;
3. Rasio Kelas Per Guru ;
4. Rasio Guru Per Sekolah

Rasio murid per kelas didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan kelas di suatu sekolah atau daerah tertentu, di mana Semakin tinggi angka rasio, berarti tingkat kepadatan kelas makin tinggi.

Rasio murid per kelas dihitung berdasarkan rumus :

$$R-M/K : \frac{\text{jumlah murid pada jenjang pend tertentu}}{\text{jumlah kelas pada jenjang pend tertentu}}$$

Berikut rasio murid per kelas di kota Bandung :

Tabel 5.6
Rasio Murid Per Kelas Tiap Jenjang Pendidikan
Tiap Sub Wilayah Kota Bandung

NO	SWK	KECAMATAN	RASIO MURID-KELAS			
			SD	SMP	SMA	BMK
1	Bojonagara	Kec. Sukajadi	38	33	32	26
		Kec. Sukasari	34	43	30	27
		Kec. Cicendo	36	33	29	51
		Kec. Andir	39	36	29	144
2	Cibeunying	Kec. Cidadap	35	43	28	67
		Kec. Coblong	35	34	41	22
		Kec. Bandung Wetan	34	34	28	22
		Kec. Sumur Bandung	39	28	33	30
		Kec. Cibeunying Kaler	41	35	43	48
		Kec. Cibeunying Kidul	53	46	33	41
3	Tegalega	Kec. Bandung Kulon	54	47	23	177
		Kec. Babakan Ciparay	64	47	35	-
		Kec. Bojong Loa Kaler	44	38	33	33
		Kec. Bojong Loa Kidul	45	32	23	57
		Kec. Astananyar	49	30	27	30
4	Karees	Kec. Regol	32	40	39	46
		Kec. Lengkong	33	31	42	31
		Kec. Kiaracandong	59	35	35	27
		Kec. Batununggal	48	44	-	39
5	Arcamanik	Kec. Arcamanik	41	36	24	30
		Kec. Antapani	47	41	34	12
		Kec. Mandalajati	67	53	22	107
6	Ujungberung	Kec. Ujungberung	83	44	33	30
		Kec. Cibiru	64	28	28	36
		Kec. Cinambo	45	31	-	23
		Kec. Panyileukan	58	28	11	32

7	Kordon	Kec. Bandung Kidul	52	30	20	8
		Kec. Buah Batu	57	35	26	61
8	Gedebage	Kec. Gedebage	42	206	34	40
		Kec. Rancasari	69	44	42	-
RATA-RATA			48	43	29	43

Sumber : Dapodik Kota Bandung 2015, diolah

Mencermati data pada tabel 5.6 di atas, terungkap gambaran sebagai berikut :

1. Untuk tingkat SD, rasio rata-rata murid per kelas di kota Bandung adalah sebesar 48 murid/kelas. Rasio tertinggi ada di Kecamatan Ujungberung (SWK 6 Ujungberung, rasio 83), sementara yang terendah ada di Kecamatan Regol (SWK 4 Karees, rasio 32).
2. Untuk tingkat SMP, rasio rata-rata murid per kelas di kota Bandung adalah sebesar 43 murid/kelas. Rasio tertinggi ada di Kecamatan Gedebage (SWK 8 Gedebage, rasio 206), sementara yang terendah ada di Kecamatan Panyileukan (SWK 6 Ujungberung, rasio 28) dan Kecamatan Sumur Bandung (SWK 2 Cibeunying, rasio 28).
3. Untuk tingkat SMA, rasio rata-rata murid per kelas di kota Bandung adalah sebesar 29 murid/kelas. Rasio tertinggi ada di Kecamatan Cibeunying Kaler (SWK 2 Cibeunying, rasio 43), sementara yang terendah ada di Kecamatan Panyileukan (SWK 6 Ujungberung, rasio 11)
4. Untuk tingkat SMK, rasio rata-rata per kelas di kota Bandung adalah sebesar 43 murid/kelas. Rasio tertinggi ada di Kecamatan Bandung Kulon (SWK 3 Tegalega, rasio 177), sementara yang terendah ada di Kecamatan Bandung Kidul (SWK 7 Kordon, rasio 8)

Menyimak lebih dalam angka-angka di atas dan membandingkan tingkat rasio murid perkelas maka kondisi sekolah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.6 di atas bermakna banyak. Berdasarkan Permendiknas 24/2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk Sekolah Dasar, kapasitas maksimum ruang kelas 28 peserta didik;
2. Untuk Sekolah Menengah Pertama, kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik;
3. Untuk Sekolah Menengah Atas, kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik;

Sedangkan Permendiknas 40/ 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) mengatur bahwa kapasitas maksimum ruang kelas adalah 32 peserta didik.

Untuk tingkat SD terlihat bahwa tidak satu kecamatan pun yang dapat memenuhi ketercukupan siswa di kelas bila dibandingkan dengan standar sesuai Permendiknas 24/2007 di atas, yakni bahwa satu kelas dapat ditempati oleh 28 siswa. Sementara untuk tingkat SMP, ada beberapa kecamatan yang jumlah siswa per kelasnya di bawah standar Permendiknas 24/2007. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Astanaanyar, Bandung Kidul, Cinambo, Lengkong, Panyileukan, dan Sumur Bandung. Hal ini menggambarkan gejala kekurangan murid SMP yang secara implisit menunjukkan adanya gejala kelebihan ruang kelas. Artinya sarana dan prasana belum termanfaatkan secara

maksimal. Sementara untuk kecamatan lain jumlah siswa per kelasnya di atas standar Permendiknas 24/2007, yang secara implisit menunjukkan kurangnya ruang kelas. Kondisi terparah dialami oleh kecamatan Gedebage. Hal ini dikarenakan jumlah SMP yang ada di kecamatan tersebut hanya 1 (satu) sekolah saja yakni SMP Negeri 54.

Selanjutnya untuk tingkat SMA angka rasio rata-rata murid per kelas di kota Bandung 29 murid/kelas, atau di bawah standar Permendiknas 24/2007 yakni 32 orang per kelas. Beberapa kecamatan angkanya jauh di atas angka rasio rata-rata dan standar Permendiknas 24/2007. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Cibeunying Kaler, Rancasari, Lengkong, dan Coblong. Kondisi ini dapat diinterpretasikan adanya gejala kekurangan kelas ataupun menumpuknya jumlah siswa pada SMA di kecamatan-kecamatan tersebut yang tidak diikuti dengan kapasitas daya tampung kelas.

Untuk SMK, angka rasio rata-rata murid per kelas adalah 43 murid/ kelas. Kecamatan Bandung Kulon (SWK 3 Tegalega) , Andir (SWK 1 Bojonagara), dan Mandalajati (SWK 5 Arcamanik) mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan dimana jumlah murid per kelasnya masing-masing adalah 177, 144 dan 107. Sedangkan kecamatan Bandung Kidul (SWK 7 Kordon) jumlah murid per kelasnya sangat sedikit yakni hanya 8 orang / kelas.

Rasio murid per Guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Jika rasio tinggi, ini berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Banyaknya murid yang diajarkan akan mengurangi

daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran.

Rasio murid per Guru dihitung berdasarkan rumus :

$$R-M/G : \frac{\text{jumlah murid pada jenjang pend tertentu}}{\text{jumlah guru pada jenjang pend tertentu}}$$

Berikut rasio murid per Guru di kota Bandung :

Tabel 5.7
Rasio Murid Per Guru Tiap Jenjang Pendidikan
Per Kecamatan di Kota Bandung

NO	SWK	KECAMATAN	RASIO MURID-GURU			
			SD	SMP	SMA	SMK
1	Bojonagara	Kec. Sukajadi	18	17	11	9
		Kec. Sukasari	18	16	11	7
		Kec. Cicendo	20	15	11	10
		Kec. Andir	19	18	9	13
2	Cibeunying	Kec. Cidadap	18	17	5	8
		Kec. Coblong	17	17	10	11
		Kec. Bandung Wetan	16	17	11	10
		Kec. Sumur Bandung	16	17	11	9
		Kec. Cibeunying Kaler	20	21	8	14
3	Tegallega	Kec. Cibeunying Kidul	20	21	12	13
		Kec. Bandung Kulon	20	18	8	12
		Kec. Babakan Ciparay	24	21	15	-
		Kec. Bojong Loa Kaler	22	22	11	9
		Kec. Bojong Loa Kidul	21	14	6	9
4	Karees	Kec. Astananyar	21	17	9	12
		Kec. Regol	18	20	14	13
		Kec. Lengkong	17	16	10	11
		Kec. Kiaracondong	20	22	10	10
		Kec. Batununggal	20	18	-	8
5	Arcamanik	Kec. Arcamanik	17	15	6	12
		Kec. Antapani	19	17	10	3
		Kec. Mandalajati	19	19	9	14

6	Ujungberung	Kec. Ujungberung	21	19	10	8
		Kec. Cibiru	23	16	11	11
		Kec. Cinambo	22	16	-	4
		Kec. Panyileukan	20	11	7	11
7	Kordon	Kec. Bandung Kidul	19	16	7	3
		Kec. Buah Batu	21	21	13	10
8	Gedebage	Kec. Gedebage	19	15	11	11
		Kec. Rancasari	23	19	17	-
RATA-RATA			20	18	9	9

Sumber : Dapodik Kota Bandung 2015, diolah

Sebagaimana diketahui bahwa indikator rasio murid per guru dapat menunjukkan keefektifan seorang guru dibanding dengan jumlah siswa yang dilayani. Sesuai dengan angka-angka di atas dapat ditunjukkan berbagai indikasi pada setiap kecamatan sebagai berikut:

1. Untuk tingkat SD rata-rata rasio murid per guru adalah 20 murid. Artinya satu orang guru melayani 20 murid (1:20). Rasio tertinggi ada di kecamatan Babakan Ciparay (SWK 3 Tegalega) yakni 24 murid sementara rasio terendah ada di kecamatan Sumur Bandung (SWK 2 Cibeunying) yakni 16 murid atau 1:16 ;
2. Untuk tingkat SMP rata-rata rasio murid per guru adalah 18. Rasio tertinggi ada di kecamatan Bojongloa Kaler (SWK 3 Tegalega, rasio 22) dan Kiaracondong (SWK 4 Karees, rasio 22), sementara rasio terendah ada di kecamatan Panyileukan (SWK 6 Ujungberung) yakni 11 ;
3. Untuk tingkat SMA rata-rata rasio murid per guru adalah 9 murid per satu guru. Rasio tertinggi ada di kecamatan Rancasari (SWK 8 Gedebage) yakni 17, sementara rasio terendah ada di kecamatan Cidadap (SWK 2 Cibeunying) yakni 5 ;

4. Untuk tingkat SMK rata-rata rasio murid per guru adalah 9 murid per satu guru. Rasio tertinggi ada di kecamatan Cibeunying Kaler (SWK 2 Cibeunying) yakni 14, sementara rasio terendah ada di kecamatan Antapani (SWK 5 Arcamanik, rasio 3) dan kecamatan Bandung Kidul (SWK 7 Kordon, rasio 3).

Indikasi-indikasi di atas menunjukkan bahwa baik untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SMP) maupun pendidikan menengah (SMA, SMK) di kota Bandung jumlah guru sangat memadai. Bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, bisa disebutkan bahwa jumlah guru di kota Bandung “berkelimpahan”.

Rasio Kelas per Guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah kelas dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Kegunaannya adalah untuk mengetahui kekurangan / kelebihan guru yang mengajar di kelas pada suatu daerah tertentu. Makin tinggi nilai rasio, berarti makin banyak pula jumlah kelas yang harus diisi pelajaran oleh guru dan ini berarti juga konsentrasi mengajar guru makin terpecah.

Rasio Kelas per Guru dihitung berdasarkan rumus :

$$R-K/G \quad : \quad \frac{\text{jumlah kelas pada jenjang pend tertentu}}{\text{jumlah guru pada jenjang pend tertentu}}$$

Berikut rasio kelas per Guru di kota Bandung :

Tabel 5.8
Rasio Kelas Per Guru Tiap Jenjang Pendidikan
Tiap Sub Wilayah Kota Bandung

NO	SWK	KECAMATAN	RASIO KELAS-GURU			
			SD	SMP	SMA	SMK
1	Bojonagara	Kec. Sukajadi	0,48	0,51	0,34	0,34
		Kec. Sukasari	0,52	0,37	0,37	0,27
		Kec. Cicendo	0,55	0,46	0,36	0,19
		Kec. Andir	0,49	0,52	0,30	0,09
2	Cibeunying	Kec. Cidadap	0,51	0,41	0,18	0,12
		Kec. Coblong	0,49	0,51	0,24	0,42
		Kec. Bandung Wetan	0,49	0,50	0,39	0,44
		Kec. Sumur Bandung	0,42	0,63	0,34	0,31
		Kec. Cibeunying Kaler	0,48	0,60	0,19	0,30
		Kec. Cibeunying Kidul	0,37	0,45	0,37	0,32
3	Tegallega	Kec. Bandung Kulon	0,37	0,38	0,34	0,07
		Kec. Babakan Ciparay	0,37	0,44	0,42	-
		Kec. Bojong Loa Kaler	0,49	0,59	0,33	0,28
		Kec. Bojong Loa Kidul	0,47	0,45	0,26	0,17
		Kec. Astananyar	0,43	0,56	0,32	0,39
4	Karees	Kec. Regol	0,56	0,50	0,36	0,29
		Kec. Lengkong	0,51	0,51	0,24	0,34
		Kec. Kiaracondong	0,34	0,62	0,29	0,36
		Kec. Batununggal	0,41	0,41	-	0,20
5	Arcamanik	Kec. Arcamanik	0,41	0,41	0,27	0,39
		Kec. Antapani	0,40	0,41	0,30	0,25
		Kec. Mandalajati	0,28	0,36	0,39	0,13
6	Ujungberung	Kec. Ujungberung	0,26	0,44	0,30	0,27
		Kec. Cibiru	0,36	0,56	0,39	0,30
		Kec. Cinambo	0,47	0,54	-	0,12
		Kec. Panyileukan	0,35	0,40	0,60	0,34
7	Kordon	Kec. Bandung Kidul	0,37	0,53	0,36	0,39
		Kec. Buah Batu	0,37	0,59	0,52	0,16
8	Gedebage	Kec. Gedebage	0,45	0,07	0,34	0,26
		Kec. Rancasari	0,33	0,43	0,39	-
RATA-RATA			0,43	0,47	0,32	0,26

Sumber : Dapodik Kota Bandung 2015, diolah

Dari data rasio pada Tabel 5.8 menunjukkan bahwa rasio kelas terhadap guru pada tingkat SD, SMP, SMA dan SMK pada 30 Kecamatan di kota Bandung memiliki angka rasio kelas terhadap guru di bawah 1 atau < 1 . Kondisi ini menjelaskan bahwa pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah di kota Bandung SMP dan SMA di semua Kabupaten/Kota kegiatan belajar mengajar berjalan secara efektif.

Rasio Guru per Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah guru dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan guru yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu sekolah tertentu.

Rasio Guru per Sekolah dihitung berdasarkan rumus :

$$R-G/S = \frac{\text{jumlah guru pada jenjang pend tertentu}}{\text{jumlah sekolah pada jenjang pend tertentu}}$$

Berikut rasio Guru per Sekolah di kota Bandung :

Tabel 5.9
Rasio Sekolah Per Guru Tiap Jenjang Pendidikan
Tiap Sub Wilayah Kota Bandung

NO	SWK	KECAMATAN	RASIO GURU-SEKOLAH			
			SD	SMP	SMA	SMK
1	Bojonagara	Kec. Sukajadi	13,00	25,25	34,20	43,50
		Kec. Sukasari	15,86	34,45	31,33	35,33
		Kec. Cicendo	12,77	24,39	49,40	51,22
		Kec. Andir	14,62	22,68	30,69	53,25

2	Cibeunying	Kec. Cidadap	14,06	19,50	17,00	25,50
		Kec. Coblong	14,82	28,92	49,46	33,33
		Kec. Bandung Wetan	19,85	32,92	52,17	76,00
		Kec. Sumur Bandung	14,48	27,33	41,00	47,67
		Kec. Cibeunying Kaler	13,85	27,83	39,60	42,33
		Kec. Cibeunying Kidul	12,19	33,71	72,00	48,00
3	Tegalega	Kec. Bandung Kulon	14,39	21,83	20,33	29,33
		Kec. Babakan Ciparay	11,09	37,20	72,00	-
		Kec. Bojong Loa Kaler	13,60	28,00	31,17	25,75
		Kec. Bojong Loa Kidul	16,61	15,78	19,25	23,17
		Kec. Astananyar	12,22	18,50	23,50	47,50
4	Karees	Kec. Regol	14,92	36,00	37,83	53,33
		Kec. Lengkong	17,38	27,23	48,08	46,83
		Kec. Kiaracondong	13,61	30,25	57,80	35,82
		Kec. Batununggal	12,60	41,33	-	83,50
5	Arcamanik	Kec. Arcamanik	20,88	21,70	26,33	44,50
		Kec. Antapani	16,14	33,00	60,00	16,00
		Kec. Mandalajati	15,82	26,00	20,50	23,00
6	Ujungberung	Kec. Ujungberung	18,21	29,90	40,00	12,25
		Kec. Cibiru	15,88	19,17	35,00	20,40
		Kec. Cinambo	16,17	6,50	-	19,00
		Kec. Panyileukan	19,20	18,50	20,00	29,50
7	Kordon	Kec. Bandung Kidul	13,33	30,67	42,00	18,00
		Kec. Buah Batu	13,88	29,83	32,67	83,11
8	Gedebage	Kec. Gedebage	13,10	14,00	85,00	118,00
		Kec. Rancasari	19,87	53,67	82,00	-
RATA-RATA			15,15	27,20	39,01	39,50

Sumber : Dapodik Kota Bandung 2015, diolah

Adapun penjelasan data tabel 5.10 di atas adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata rasio guru per sekolah untuk tingkat SD adalah 15,15. Rasio tertinggi ada di kecamatan Arcamanik (SWK 5 Arcamanik, rasio 20,88), sedangkan rasio terendah ada di kecamatan Cibeunying Kidul (SWK 2 Cibeunying, rasio 12,19) ;

2. Rata-rata rasio guru per sekolah untuk tingkat SMP adalah 27,20. Rasio tertinggi ada di kecamatan Batununggal (SWK 4 Karees, rasio 41,33) ,sedangkan rasio terendah ada di kecamatan Cinambo (SWK 6 Ujungberung, rasio 6,50);
3. Rata-rata rasio guru per sekolah untuk tingkat SMA adalah 39,01. Rasio tertinggi ada di kecamatan Gedebage (SWK 8 Gedebage, rasio 85,00), sedangkan rasio terendah ada di kecamatan Cidadap (SWK 2 Cibeunying, rasio 17,00). Tingginya rasio guru per sekolah tingkat SMA di kecamatan Gedebage karena di wilayah tersebut hanya ada 1 (satu) SMA saja yakni SMA Negeri 27.
4. Rata-rata rasio guru per sekolah untuk tingkat SMK adalah 39,50. Rasio tertinggi ada di kecamatan Gedebage (SWK 8 Gedebage, rasio 118,00), sedangkan rasio terendah ada di kecamatan Ujungberung (SWK 6 Ujungberung ,12,25).

5.1.2. Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan

Dalam mengkaji tingkat pelayanan fasilitas pendidikan di Kota Bandung, maka diperlukan evaluasi terhadap pola distribusi fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK yang dilakukan dengan 3 analisis yaitu :

1. Analisis pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan,
2. Analisis daya tampung, dan
3. Analisis tingkat keterisian fasilitas pendidikan

5.1.2.1. Analisis Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Biasanya untuk menganalisis kebutuhan fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK adalah membandingkan jumlah penduduk dengan ketetapan dari standar yang berlaku dikurangi fasilitas yang telah ada. Adapun standar yang

digunakan bervariasi, mulai dari Permendiknas 24/2007 untuk SD, SMP dan SMA, Permendiknas 40/ 2008 untuk SMK, atau Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1722-2004. Namun perhitungan kebutuhan fasilitas pendidikan secara sederhana seperti itu tidak menggambarkan kondisi/ realitas kebutuhan yang sesungguhnya. Selain itu tim pengkaji berpendapat bahwa perhitungan seperti itu tidak berangkat dari pemahaman akan proses pendidikan secara utuh dan mengabaikan dinamika kependudukan.

Kajian ini akan menggunakan metode yang berangkat dari sebuah proses pendidikan dan dinamika kependudukan. Karenanya cara perhitungan akan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Menghitung rombongan belajar (rombel) yang harus terlayani. Caranya adalah dengan membandingkan jumlah penduduk usia sekolah sesuai tingkatannya dengan standar rombel yang berlaku. Dalam kajian ini digunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1722-2004 dimana satu rombel diisi oleh 40 siswa ;
2. Menghitung rentang kebutuhan fasilitas pendidikan. Disini diperbandingkan hasil rombel yang harus terlayani dengan standar rombel persekolah dari Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1722-2004 yakni 6 – 12 rombel untuk SD, 9 – 27 untuk SMP, dan 9 – 27 untuk SMA
3. Menghitung kebutuhan penambahan unit dengan mengurangi rentang kebutuhan fasilitas dengan fasilitas pendidikan eksisting

Adapun hasil perhitungan sebagaimana terurai pada tabel berikut:

Tabel 5.10
Analisis Pemenuhan Kebutuhan
Fasilitas Pendidikan Dasar (SD, SMP)
Tiap Kecamatan Kota Bandung

NO	KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH USIA SD	JUMLAH USIA SMP	FASILITAS SD					FASILITAS SMP				
		SD	SMP			Rentang Kebutuhan	MIN	MAX	KEB. MIN	KEB. MAX	Rentang Kebutuhan	MIN	MAX	KEB. MIN	KEB. MAX
1	Kec. Andir	37	19	14.178	6.717	354	66	30	29	(7)	168	19	6	(0)	(13)
2	Kec. Antapani	22	5	6.842	3.650	171	35	14	13	(8)	91	10	3	5	(2)
3	Kec. Arcamanik	25	10	6.184	3.432	155	32	13	7	(12)	86	10	3	(0)	(7)
4	Kec. Astananyar	36	6	5.412	3.067	135	29	11	(7)	(25)	77	9	3	3	(3)
5	Kec. Babakan Ciparay	44	5	11.270	5.979	282	54	23	10	(21)	149	17	6	12	1
6	Kec. Bandung Kidul	15	3	4.719	2.531	118	26	10	11	(5)	63	7	2	4	(1)
7	Kec. Bandung Kulon	41	6	12.978	7.519	324	61	27	20	(14)	188	21	7	15	1
8	Kec. Bandung Wetan	20	12	2.090	1.396	52	15	4	(5)	(16)	35	4	1	(8)	(11)
9	Kec. Batununggal	35	6	10.575	6.782	264	51	22	16	(13)	170	19	6	13	0
10	Kec. Bojong Loa Kaler	20	8	9.883	6.033	247	48	21	28	1	151	17	6	9	(2)
11	Kec. Bojong Loa Kidul	23	9	7.142	3.948	179	36	15	13	(8)	99	11	4	2	(5)
12	Kec. Buah Batu	26	6	7.155	4.105	179	36	15	10	(11)	103	11	4	5	(2)
13	Kec. Cibeunying Kaler	20	6	5.704	3.377	143	30	12	10	(8)	84	9	3	3	(3)
14	Kec. Cibeunying Kidul	43	7	9.961	5.785	249	48	21	5	(22)	145	16	5	9	(2)
15	Kec. Cibiru	24	6	7.225	3.362	181	37	15	13	(9)	84	9	3	3	(3)
16	Kec. Cicendo	44	18	9.089	4.847	227	45	19	1	(25)	121	13	4	(5)	(14)
17	Kec. Cidadap	17	6	4.763	2.595	119	27	10	10	(7)	65	7	2	1	(4)
18	Kec. Cinambo	6	2	1.995	1.054	50	15	4	9	(2)	26	3	1	1	(1)
19	Kec. Coblong	44	12	10.361	8.690	259	50	22	6	(22)	217	24	8	12	(4)
20	Kec. Gedebage	10	1	1.915	900	48	15	4	5	(6)	22	2	1	1	(0)
21	Kec. Kiaracondong	41	8	12.152	6.644	304	57	25	16	(16)	166	18	6	10	(2)
22	Kec. Lengkong	29	13	8.292	4.687	207	41	17	12	(12)	117	13	4	0	(9)
23	Kec. Mandalajati	22	3	5.536	2.914	138	30	12	8	(10)	73	8	3	5	(0)
24	Kec. Panyileukan	10	6	3.142	1.794	79	20	7	10	(3)	45	5	2	(1)	(4)
25	Kec. Rancasari	15	3	6.213	3.059	155	33	13	18	(2)	76	8	3	5	(0)
26	Kec. Regol	37	12	6.833	4.351	171	35	14	(2)	(23)	109	12	4	0	(8)
27	Kec. Sukajadi	39	4	6.583	4.902	165	34	14	(5)	(25)	123	14	5	10	1
28	Kec. Sukasari	29	11	6.252	4.167	156	33	13	4	(16)	104	12	4	1	(7)
29	Kec. Sumur Bandung	27	9	3.720	2.147	93	22	8	(5)	(19)	54	6	2	(3)	(7)
30	Kec. Ujungberung	19	10	6.369	3.488	159	33	13	14	(6)	87	10	3	(0)	(7)
JUMLAH		820	232	214.536	123.920	5.363	1.094	447	274	(373)	3.098	344	115	112	(117)

Sumber : Dapodik Kota Bandung 2015, Hasil Analisis 2015

Tabel 5.11
Analisis Pemenuhan Kebutuhan
Fasilitas Pendidikan Menengah (SMA)
Tiap Kecamatan Kota Bandung

NO	KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH SMA	JUMLAH USIA SMA	FASILITAS SMA				
				Rentang Kebutuhan	MIN 9	MAX 27	KEB. MIN	KEB. MAX
1	Kec. Andir	16	7.102	178	20	7	4	(9)
2	Kec. Antapani	2	3.650	91	10	3	8	1
3	Kec. Arcamanik	3	3.810	95	11	4	8	1
4	Kec. Astananyar	2	3.686	92	10	3	8	1
5	Kec. Babakan Ciparay	1	6.057	151	17	6	16	5
6	Kec. Bandung Kidul	1	2.808	70	8	3	7	2
7	Kec. Bandung Kulon	3	7.632	191	21	7	18	4
8	Kec. Bandung Wetan	6	1.431	36	4	1	(2)	(5)
9	Kec. Batununggal	0	8.135	203	23	8	23	8
10	Kec. Bojong Loa Kaler	6	6.861	172	19	6	13	0
11	Kec. Bojong Loa Kidul	4	3.848	96	11	4	7	(0)
12	Kec. Buah Batu	3	4.717	118	13	4	10	1
13	Kec. Cibeunying Kaler	5	3.746	94	10	3	5	(2)
14	Kec. Cibeunying Kidul	3	5.727	143	16	5	13	2
15	Kec. Cibiru	6	3.000	75	8	3	2	(3)
16	Kec. Cicendo	10	5.396	135	15	5	5	(5)
17	Kec. Cidadap	3	3.250	81	9	3	6	0
18	Kec. Cinambo	0	835	21	2	1	2	1
19	Kec. Coblong	13	11.486	287	32	11	19	(2)
20	Kec. Gedebage	1	876	22	2	1	1	(0)
21	Kec. Kiaracondong	5	6.527	163	18	6	13	1
22	Kec. Lengkong	12	2.726	68	8	3	(4)	(9)
23	Kec. Mandalajati	2	3.158	79	9	3	7	1
24	Kec. Panyileukan	1	1.940	49	5	2	4	1
25	Kec. Rancasari	1	3.253	81	9	3	8	2
26	Kec. Regol	6	4.458	111	12	4	6	(2)
27	Kec. Sukajadi	5	4.078	102	11	4	6	(1)
28	Kec. Sukasari	3	4.810	120	13	4	10	1
29	Kec. Sumur Bandung	7	2.036	51	6	2	(1)	(5)
30	Kec. Ujungberung	5	4.290	107	12	4	7	(1)
JUMLAH		135	131.328	3.283	365	122	230	(13)

Sumber : Dapodik Kota Bandung 2015, Hasil Analisis 2015

5.1.2.2. Analisis Daya Tampung

Kapasitas Sekolah merupakan ketersediaan fasilitas fisik yang diukur dengan kapasitas maksimal daya tampung siswa. Variabel ini diukur dalam satuan daya tampung siswa sesuai dengan kondisi daya tampung fasilitas sekolah di masing-masing Sub Wilayah Kota (SWK) yang ada di Kota Bandung.

Daya tampung fasilitas sekolah ini menggunakan data perbandingan jumlah penduduk usia sekolah SD (7-12 Tahun), SMP (13-15 Tahun) dan SMA/SMK (16-18 tahun) dengan asumsi partisipasi aktif penduduk usia sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK di kota Bandung 100% dengan daya tampung fasilitas pendidikan yang ada di kota Bandung. Untuk menilai terpenuhinya kebutuhan penduduk terhadap fasilitas pendidikan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$pk = \frac{dt}{Pus} \times 100\%$$

pk = persentase pemenuhan kebutuhan

dt = daya tampung atau kapasitas fasilitas pendidikan

Pus = jumlah penduduk usia sekolah

Berikut perhitungan daya tampung fasilitas sekolah eksisting :

Tabel 5.12
Analisis Daya Tampung Sekolah Eksisting

NO	SWK	KECAMATAN	Penduduk Usia Sekolah 2015			Jumlah Fasilitas Pendidikan Eksisting				Kapasitas Daya Tampung (Persen) Pada 2015			
			7-12 thn	13-15 thn	16-18 thn	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
						Jml Kelas	Jml Kelas	Jml Kelas	Jml Kelas				
1	Bojonagara	Kec. Sukajadi	6.583	4.902	4.078	242	52	58	30	147%	42%	47%	29%
		Kec. Sukasari	6.252	4.167	4.810	238	140	35	29	152%	134%	34%	24%
		Kec. Cicendo	9.089	4.847	5.396	308	203	179	89	136%	168%	148%	66%
		Kec. Andir	14.178	6.717	7.102	267	224	147	20	75%	133%	88%	11%
2	Cibeunying	Kec. Cidadap	4.763	2.595	3.250	121	48	9	6	102%	74%	14%	7%
		Kec. Coblong	10.361	8.690	11.486	317	176	154	48	122%	81%	71%	17%
		Kec. Bandung Wetan	2.090	1.396	1.431	194	196	121	67	371%	562%	347%	187%
		Kec. Sumur Bandung	3.720	2.147	2.036	166	154	97	89	178%	287%	181%	175%
		Kec. Cibeunying Kaler	5.704	3.377	3.746	134	101	37	113	94%	120%	44%	121%
		Kec. Cibeunying Kidul	9.961	5.785	5.727	195	106	80	62	78%	73%	55%	43%
3	Tegallega	Kec. Bandung Kulon	12.978	7.519	7.632	221	50	21	6	68%	27%	11%	3%
		Kec. Babakan Ciparay	11.270	5.979	6.057	179	81	30	0	64%	54%	20%	-
		Kec. Bojong Loa Kaler	9.883	6.033	6.861	134	132	62	29	54%	88%	41%	17%
		Kec. Bojong Loa Kidul	7.142	3.948	3.848	179	64	20	23	100%	65%	20%	24%
		Kec. Astananyar	5.412	3.067	3.686	187	62	15	112	138%	81%	20%	122%
4	Karees	Kec. Regol	6.833	4.351	4.458	311	216	81	46	182%	199%	74%	41%
		Kec. Lengkong	8.292	4.687	2.726	258	180	139	287	124%	154%	119%	421%
		Kec. Kiaracondong	12.152	6.644	6.527	190	149	84	142	63%	90%	51%	87%
		Kec. Batununggal	10.575	6.782	8.135	182	101	0	34	69%	60%	-	17%
5	Arcamanik	Kec. Arcamanik	6.184	3.432	3.810	216	90	21	35	140%	105%	24%	37%
		Kec. Antapani	6.842	3.650	3.650	141	68	36	4	82%	75%	39%	4%
		Kec. Mandalajati	5.536	2.914	3.158	96	28	16	3	69%	38%	22%	4%
6	Ujungberung	Kec. Ujungberung	6.369	3.488	4.290	89	132	59	13	56%	151%	68%	12%
		Kec. Cibiru	7.225	3.362	3.000	136	64	81	31	75%	76%	96%	41%
		Kec. Cinambo	1.995	1.054	835	46	7	0	7	92%	27%	-	34%
		Kec. Panyileukan	3.142	1.794	1.940	68	44	12	20	87%	98%	27%	41%
7	Kordon	Kec. Bandung Kidul	4.719	2.531	2.808	73	49	15	7	62%	77%	24%	10%
		Kec. Buah Batu	7.155	4.105	4.717	134	106	51	118	75%	103%	50%	100%
8	Gedebage	Kec. Gedebage	1.915	900	876	59	1	29	62	123%	4%	129%	283%
		Kec. Rancasari	6.213	3.059	3.253	98	70	32	0	63%	92%	42%	0%
JUMLAH/RATA-RATA			214.536	123.920	131.328	5.179	3.094	1.721	1.532	108%	111%	63%	66%

Sumber : Hasil Analisis 2015

Adapun interpretasi hasil data di atas adalah dengan teknik skoring. Teknik skoring menggunakan parameter penilaian yaitu skor 3 untuk kapasitas daya tampung "on-capacity" (90-100%), skor 2 untuk kapasitas daya tampung "over-capacity" (>100 %) dan skor 1 untuk kapasitas daya tampung "below-capacity" (<90%). Berikut hasil interpretasi data daya tampung sekolah eksisting

Tabel 5.13
Interpretasi Data Daya Tampung Sekolah Eksisting

NO	SWK	KECAMATAN	Interpretasi Data Hasil			
			SD	SMP	SMA	SMK
1	Bojonagara	Kec. Sukajadi	OVER-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
		Kec. Sukasari	OVER-CAPACITY	OVER-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
		Kec. Cicendo	OVER-CAPACITY	OVER-CAPACITY	OVER-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
		Kec. Andir	BELOW CAPACITY	OVER-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
2	Cibeunying	Kec. Cidadap	OVER-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
		Kec. Coblong	OVER-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
		Kec. Bandung Wetan	OVER-CAPACITY	OVER-CAPACITY	OVER-CAPACITY	OVER-CAPACITY
		Kec. Sumur Bandung	OVER-CAPACITY	OVER-CAPACITY	OVER-CAPACITY	OVER-CAPACITY
		Kec. Cibeunying Kaler	ON-CAPACITY	OVER-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	OVER-CAPACITY
		Kec. Cibeunying Kidul	BELOW CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
3	Tegalega	Kec. Bandung Kulon	BELOW CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	-
		Kec. Babakan Ciparay	BELOW CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
		Kec. Bojong Loa Kaler	BELOW CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
		Kec. Bojong Loa Kidul	ON-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
		Kec. Astananyar	OVER-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	OVER-CAPACITY
4	Karees	Kec. Regol	OVER-CAPACITY	OVER-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
		Kec. Lengkong	OVER-CAPACITY	OVER-CAPACITY	OVER-CAPACITY	OVER-CAPACITY
		Kec. Kiaracondong	BELOW CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
		Kec. Batununggal	BELOW CAPACITY	BELOW-CAPACITY	-	BELOW-CAPACITY

5	Arcamanik	Kec. Arcamanik	OVER-CAPACITY	OVER-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
		Kec. Antapani	BELOW CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
		Kec. Mandalajati	BELOW CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
6	Ujungberung	Kec. Ujungberung	BELOW CAPACITY	OVER-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
		Kec. Cibiru	BELOW CAPACITY	BELOW-CAPACITY	ON-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
		Kec. Cinambo	ON-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	-	BELOW-CAPACITY
		Kec. Panyileukan	BELOW CAPACITY	ON-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
7	Kordon	Kec. Bandung Kidul	BELOW CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	BELOW-CAPACITY
		Kec. Buah Batu	BELOW CAPACITY	OVER-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	ON-CAPACITY
8	Gedebage	Kec. Gedebage	OVER-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	OVER-CAPACITY	OVER-CAPACITY
		Kec. Rancasari	BELOW CAPACITY	ON-CAPACITY	BELOW-CAPACITY	-

Sumber : Hasil Analisis 2015

5.1.2.2. Analisis Tingkat Keterisian Fasilitas Pendidikan

Tujuan dari analisis tingkat keterisian yaitu mengetahui daya tampung atau kapasitas sekolah telah digunakan secara optimal atau apakah ada *over capacity* dan *undercapacity* dalam penerimaan murid. Analisis ini menggunakan perbandingan antara jumlah murid di tiap Kecamatan Kota Bandung dengan daya tampung atau kapasitas sekolah (kelas). Dalam menilai tingkat keterisian sekolah menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$tk = \frac{m}{dt} \times 100\%$$

tk = tingkat keterisian fasilitas pendidikan
m = jumlah murid
dt = daya tampung atau kapasitas fasilitas pendidikan

Adapun intepretasi hasil data di atas adalah dengan teknik skoring. Teknik skoring menggunakan parameter penilaian yaitu skor 3 untuk kapasitas daya tampung "Memadai" (90-100%), skor 2 untuk kapasitas daya tampung "Berlebih" (>100 %) dan skor 1 untuk kapasitas daya tampung "Kurang" (<90%)

Berikut hasil perhitungan keterisian fasilitas pendidikan di tiap sub wilayah kota Bandung :

Tabel 5.14
Tingkat Keterisian Fasilitas Pendidikan Eksisting

NO	SWK	KECAMATAN	Tingkat Keterisian 2015			
			SD	SMP	SMA	SMK
1	Bojonagara	Kec. Sukajadi	96%	79%	79%	65%
		Kec. Sukasari	85%	74%	74%	67%
		Kec. Cicendo	91%	73%	73%	128%
		Kec. Andir	98%	72%	72%	359%
2	Cibeunying	Kec. Cidadap	87%	69%	69%	168%
		Kec. Coblong	87%	101%	101%	55%
		Kec. Bandung Wetan	84%	70%	70%	54%
		Kec. Sumur Bandung	97%	82%	82%	74%
		Kec. Cibeunying Kaler	102%	108%	108%	120%
		Kec. Cibeunying Kidul	131%	83%	83%	102%
3	Tegallega	Kec. Bandung Kulon	135%	57%	57%	443%
		Kec. Babakan Ciparay	161%	88%	88%	-
		Kec. Bojong Loa Kaler	111%	81%	81%	84%
		Kec. Bojong Loa Kidul	112%	57%	57%	143%
		Kec. Astananyar	123%	68%	68%	76%
4	Karees	Kec. Regol	80%	97%	97%	115%
		Kec. Lengkong	84%	105%	105%	78%
		Kec. Kiaracondong	148%	88%	88%	67%
		Kec. Batununggal	120%	-	-	98%
5	Arcamanik	Kec. Arcamanik	103%	61%	61%	74%
		Kec. Antapani	118%	85%	85%	31%
		Kec. Mandalajati	168%	55%	55%	268%
6	Ujungberung	Kec. Ujungberung	207%	82%	82%	74%

		Kec. Cibiru	161%	69%	69%	90%
		Kec. Cinambo	114%	-	-	56%
		Kec. Panyileukan	144%	28%	28%	81%
7	Kordon	Kec. Bandung Kidul	130%	51%	51%	20%
		Kec. Buah Batu	143%	64%	64%	154%
8	Gedebage	Kec. Gedebage	104%	84%	84%	101%
		Kec. Rancasari	172%	106%	106%	-
RATA-RATA			120%	71%	71%	108%

Sumber : Hasil Analisis 2015

Adapun interpretasi keterisian fasilitas pendidikan terurai dalam tabel berikut:

Tabel 5.15
Tabel Intepretasi Keterisian Fasilitas Pendidikan Eksisting

NO	SWK	KECAMATAN	Intepretasi Data			
			SD	SMP	SMA	SMK
1	Bojonagara	Kec. Sukajadi	Memadai	Kurang	Kurang	Kurang
		Kec. Sukasari	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
		Kec. Cicendo	Memadai	Kurang	Kurang	
		Kec. Andir	Memadai	Kurang	Kurang	
2	Cibeunying	Kec. Cidadap	Kurang	Kurang	Kurang	
		Kec. Coblong	Kurang			Kurang
		Kec. Bandung Wetan	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
		Kec. Sumur Bandung	Memadai	Kurang	Kurang	Kurang
		Kec. Cibeunying Kaler		Kurang	Kurang	
		Kec. Cibeunying Kidul		Kurang	Kurang	
3	Tegalega	Kec. Bandung Kulon				
		Kec. Babakan Ciparay		Kurang	Kurang	-
		Kec. Bojong Loa Kaler		Kurang	Kurang	Kurang
		Kec. Bojong Loa Kidul		Kurang	Kurang	
		Kec. Astananyar		Kurang	Kurang	Kurang
4	Karees	Kec. Regol	Kurang			Kurang
		Kec. Lengkong	Kurang			Kurang
		Kec. Kiaracondong		Kurang	Kurang	Kurang
		Kec. Batununggal				Kurang
5	Arcamanik	Kec. Arcamanik		Kurang	Kurang	Kurang
		Kec. Antapani		Kurang	Kurang	
		Kec. Mandalajati		Kurang	Kurang	Kurang
6	Ujungberung	Kec. Ujungberung		Kurang	Kurang	Kurang
		Kec. Cibiru		Kurang	Kurang	Kurang
		Kec. Cinambo		Kurang	Kurang	Kurang
		Kec. Panyileukan		Kurang	Kurang	Kurang
7	Kordon	Kec. Bandung Kidul		Kurang	Kurang	
		Kec. Buah Batu		Kurang	Kurang	
8	Gedebage	Kec. Gedebage				
		Kec. Rancasari				

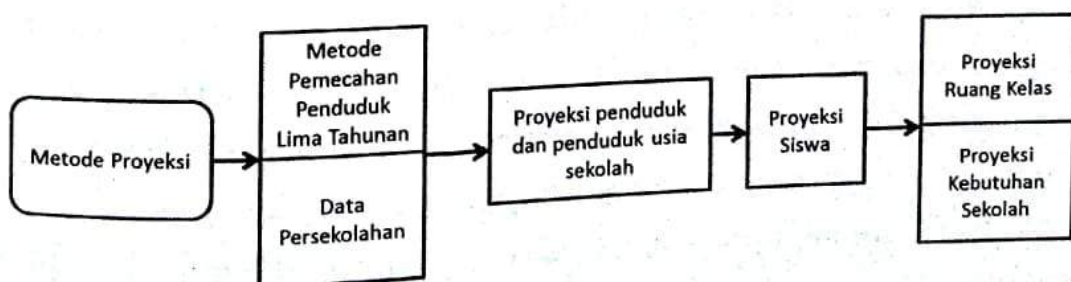
Sumber : Hasil Analisis 2015

5.2. Analisa Kependudukan di Kota Bandung

Analisa kependudukan sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan perencanaan pendidikan. Dalam suatu proses perencanaan pendidikan, proyeksi kebutuhan sekolah merupakan suatu tahap mempersiapkan kegiatan dimasa depan dalam bidang pembangunan sekolah. Proyeksi ini sangatlah penting agar apa yang akan dibutuhkan bisa dibuat secara tepat sesuai kondisi yang mendekati sebenarnya. Agar dapat dilakukan perencanaan pendidikan, komponen utamanya adalah **data**. Hal itu menyebabkan data yang baik dalam arti tepat waktu, dapat dipercaya, dan objektif menjadi penting untuk dipahami.

Untuk menyusun perencanaan pendidikan tidak hanya data eksisting yang diperlukan melainkan juga data tahun-tahun sebelumnya dan data proyeksi atau perkiraan data di tahun-tahun mendatang. Perencanaan pendidikan dengan metode proyeksi akan menghasilkan metode pemecahan penduduk lima tahunan, data persekolahan, proyeksi penduduk dan penduduk usia sekolah, proyeksi siswa, proyeksi ruang kelas serta proyeksi kebutuhan guru (Usman, 2006). Keterkaitan antara model proyeksi dengan hasil yang diperoleh seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar 5.1
Model Proyeksi dan Hasil Yang Diperoleh



Sumber : Usman, 2006

5.2.1. Pemecahan Penduduk Usia Lima Tahunan

Pemecahan penduduk usia lima-tahunan menjadi usia tahunan diperlukan dalam perencanaan pendidikan karena pada kenyataannya penduduk menurut usia sekolah dengan data penduduk usia yang tersedia dari Badan Pusat Statistik (BPS) tidaklah sama. Data penduduk yang ada pada penerbitan BPS di tingkat nasional maupun daerah menggunakan kelompok usia lima tahunan seperti 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19 tahun, 20-24 tahun dan seterusnya. Untuk keperluan pendidikan, penduduk yang digunakan adalah kelompok usia sekolah yaitu 4-5 tahun dan 4-6 tahun untuk TK, 6-7 tahun dan 7-12 tahun untuk tingkat SD, 13-15 tahun untuk tingkat SMP, 16-18 tahun untuk tingkat SMA/SMK, 19-24 tahun untuk tingkat Pendidikan Tinggi.

Untuk itu, diperlukan metode yang dapat memecah kelompok usia lima-tahunan menjadi kelompok usia sekolah. Ada beberapa metode untuk memecah kelompok usia lima-tahunan menjadi tahunan, namun dalam hal ini dipilih metode yang sesuai dengan kondisi Indonesia yaitu Sprague *Multiplier*.

Metode Sprague *Multiplier* adalah bilangan pengali Sprague yang disusun menurut cara tertentu untuk menghitung usia penduduk tahunan atau untuk memecah penduduk usia lima-tahunan menjadi usia tahunan (Balitbang Depdiknas, 2007). Dalam kaitan dengan data BPS yaitu usia 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, dan 15-19 tahun akan dipecah menjadi penduduk usia sekolah, misalnya usia 4-5 tahun, 5-6 tahun, 6-7 tahun dan kelompok usia yang diinginkan seperti usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun maka diperlukan metode tersebut. Angka bilangan pengali Sprague disajikan dalam bentuk tabel yang disebut Tabel Bilangan Pengali Sprague

(Sprague *Multiplier Table*) yang disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 5.16
Tabel Bilangan Pengali Sprague

Tabel	Usia	F-3	F-2	F-1	F0	F1	F2	F3
Tabel 1	Fa	-			0.3616	-0.2768	0.1488	-0.0336
	Fb	-			0.2640	-0.0960	0.0400	-0.0080
	Fc	-			0.1840	0.0400	-0.0320	0.0080
	Fd	-			0.1200	0.1360	-0.0720	0.0160
	Fe	-			0.0704	0.1968	-0.0848	0.0176
Tabel 2	Fa	-		0.0336	0.2272	-0.0752	0.0144	-
	Fb	-		0.0080	0.2320	-0.0480	0.0080	-
	Fc	-		-0.0800	0.2160	-0.0080	0.0000	-
	Fd	-		-0.0160	0.1840	0.0400	-0.0080	-
	Fe	-		-0.0176	0.1408	0.0912	-0.0144	-
Tabel 3	Fa	-	-0.0128	0.0848	0.1504	-0.0240	0.0016	-
	Fb	-	-0.0016	0.0144	0.2224	-0.0416	0.0064	-
	Fc	-	0.0064	-0.0336	0.2544	-0.0336	0.0064	-
	Fd	-	0.0064	-0.0416	0.2224	0.0144	-0.0016	-
	Fe	-	0.0016	-0.0240	0.1504	0.0848	-0.0128	-
Tabel 4	Fa	-	-0.0144	0.0912	0.1408	-0.0176	-	-
	Fb	-	-0.0080	0.0400	0.1840	-0.0160	-	-
	Fc	-	0.0000	-0.0080	0.2160	-0.0080	-	-
	Fd	-	0.0080	-0.0480	0.2320	0.0080	-	-
	Fe	-	0.0144	-0.0752	0.2272	0.0336	-	-
Tabel 5	Fa	0.0176	-0.0848	0.1968	0.0704	-	-	-
	Fb	0.0160	-0.0720	0.1360	0.1200	-	-	-
	Fc	0.0080	-0.0320	0.0400	0.1840	-	-	-
	Fd	-0.0080	0.0400	-0.0960	0.2640	-	-	-
	Fe	-0.0336	0.1488	-2768.0000	0.3616	-	-	-

Sumber : Balitbang Depdiknas, 2007

Tabel 1 Untuk menghitung kelompok usia 0-4 tahun selain usia 0-4 perlu juga diketahui kelompok usia 5-9 tahun, 10-14 tahun dan 15-19 tahun

Tabel 2 Untuk menghitung kelompok usia 5-9 tahun selain 5-9 tahun perlu juga diketahui kelompok usia 0-4 tahun, 10-14 tahun dan 15-19 tahun

Tabel 3 Untuk menghitung kelompok usia 10-14 tahun sampai 70-74 tahun selain diketahui usia yang dihitung juga perlu diketahui dua kelompok sebelumnya dan dua kelompok sesudahnya.

Tabel 4 Untuk menghitung kelompok usia 75-79 tahun

selain usia 75-79 tahun perlu juga diketahui kelompok usia 65-69 tahun, 70-74 tahun dan 80-84 tahun

Tabel 5 Untuk menghitung kelompok usia 80-84 tahun selain usia 80-84 tahun perlu juga diketahui kelompok usia 65-69 tahun, 70-74 tahun, 75-79 tahun .

Rumus untuk menghitung tabel adalah sebagai berikut :

Rumus I

$$Fa = S1a \times F0 + S2a \times F1 + S3a \times F2 + S4a \times F3$$

Keterangan:

Fa adalah penduduk menurut usia tahunan yang pertama

F0 adalah penduduk kelompok usia yang akan dipecah

F1 adalah penduduk kelompok usia berikutnya yang pertama sesudah F0

F2 adalah penduduk kelompok usia berikutnya yang kedua sesudah F0

F3 adalah penduduk kelompok usia berikutnya yang ketiga sesudah F0

S1a adalah bilangan pengali Srague yang pertama untuk usia a tahun

S2a adalah bilangan pengali Srague yang kedua untuk usia a tahun

S3a adalah bilangan pengali Srague yang ketiga untuk usia a tahun

S4a adalah bilangan pengali Srague yang keempat untuk usia a tahun

$$Fb = S1b \times F0 + S2b \times F1 + S3b \times F2 + S4b \times F3$$

Keterangan:

Fb adalah penduduk menurut usia tahunan yang pertama

F0 adalah penduduk kelompok usia yang akan dipecah

F1 adalah penduduk kelompok usia berikutnya yang pertama sesudah F0

F2 adalah penduduk kelompok usia berikutnya yang kedua sesudah F0

F3 adalah penduduk kelompok usia berikutnya yang ketiga sesudah F0

S1b adalah bilangan pengali Srague yang pertama untuk usia b tahun

S2b adalah bilangan pengali Srague yang kedua untuk usia b tahun

S3b adalah bilangan pengali Srague yang ketiga untuk usia b tahun

S4b adalah bilangan pengali Srague yang ketiga untuk usia b tahun

$$F_c = S_{1c} \times F_0 + S_{2c} \times F_1 + S_{3c} \times F_2 + S_{4c} \times F_3$$

Keterangan:

Fc adalah penduduk menurut usia tahunan yang pertama

F0 adalah penduduk kelompok usia yang akan dipecah

F1 adalah penduduk kelompok usia berikutnya yang pertama sesudah F0

F2 adalah penduduk kelompok usia berikutnya yang kedua sesudah F0

F3 adalah penduduk kelompok usia berikutnya yang ketiga sesudah F0

S1c adalah bilangan pengali Srague yang pertama untuk usia c tahun

S2c adalah bilangan pengali Srague yang kedua untuk usia c tahun

S3c adalah bilangan pengali Srague yang ketiga untuk usia c tahun

S4c adalah bilangan pengali Srague yang ketiga untuk usia c tahun

$$F_d = S_{1d} \times F_0 + S_{2d} \times F_1 + S_{3d} \times F_2 + S_{4d} \times F_3$$

Keterangan:

Fd adalah penduduk menurut usia tahunan yang pertama

F0 adalah penduduk kelompok usia yang akan dipecah

F1 adalah penduduk kelompok usia berikutnya yang pertama sesudah F0

F2 adalah penduduk kelompok usia berikutnya yang kedua sesudah F0

F3 adalah penduduk kelompok usia berikutnya yang ketiga sesudah F0

S1d adalah bilangan pengali Srague yang pertama untuk usia d tahun

S2d adalah bilangan pengali Srague yang kedua untuk usia d tahun

S3d adalah bilangan pengali Srague yang ketiga untuk usia d tahun

S4d adalah bilangan pengali Srague yang ketiga untuk usia d tahun

$$Fe = S1e \times F0 + S2e \times F1 + S3e \times F2 + S4e \times F3$$

Keterangan:

Fe adalah penduduk menurut usia tahunan yang pertama

F0 adalah penduduk kelompok usia yang akan dipecah

F1 adalah penduduk kelompok usia berikutnya yang pertama sesudah F0

F2 adalah penduduk kelompok usia berikutnya yang kedua sesudah F0

F3 adalah penduduk kelompok usia berikutnya yang ketiga sesudah F0

S1e adalah bilangan pengali Srague yang pertama untuk usia e tahun

S2e adalah bilangan pengali Srague yang kedua untuk usia e tahun

S3e adalah bilangan pengali Srague yang ketiga untuk usia e tahun

S4e adalah bilangan pengali Srague yang ketiga untuk usia e tahun

Rumus pertama ini khusus dipakai untuk menghitung penduduk kelompok usia 0-4 tahun.

Rumus II

$$Fa = S1a \times F-1 + S2a \times F0 + S3a \times F1 + S4a \times F2$$

$$Fb = S1b \times F-1 + S2b \times F0 + S3b \times F1 + S4b \times F2$$

$$Fc = S1c \times F-1 + S2c \times F0 + S3c \times F1 + S4c \times F2$$

Dst.

Rumus kedua ini khusus dipakai untuk menghitung penduduk kelompok usia 5-9 tahun.

Rumus III

$$Fa = S1a \times F-2 + S2a \times F-1 + S3a \times F0 + S4a \times F1 + S5a \times F2$$

$$Fb = S1b \times F-2 + S2b \times F-1 + S3b \times F0 + S4b \times F1 + S5b \times F2$$

$$Fc = S1c \times F-2 + S2c \times F-1 + S3c \times F0 + S4c \times F1 + S5c \times F2$$

Dst.

Rumus ketiga ini khusus dipakai untuk menghitung semua kelompok usia kecuali 2 kelompok usia pertama (0-4 tahun dan 5-9 tahun) dan 2 kelompok usia yang terakhir (75-79 tahun dan 80-84 tahun) dari data penduduk yang dimiliki.

Rumus IV

$$Fa = S1a \times F-2 + S2a \times F-1 + S3a \times F0 + S4a \times F1$$

$$Fb = S1b \times F-2 + S2b \times F-1 + S3b \times F0 + S4b \times F1$$

$$Fc = S1c \times F-2 + S2c \times F-1 + S3c \times F0 + S4c \times F1$$

Dst.

Rumus keempat ini khusus dipakai untuk menghitung kelompok sebelum kelompok usia terakhir yang ada, misalnya kelompok usia terakhir adalah 80-84 tahun.

Rumus V

$$Fa = S1a \times F-3 + S2a \times F-2 + S3a \times F-1 + S4a \times F0$$

$$Fb = S1b \times F-3 + S2b \times F-2 + S3b \times F-1 + S4b \times F0$$

$$Fc = S1c \times F-3 + S2c \times F-2 + S3c \times F-1 + S4c \times F0$$

Dst.

Rumus kelima ini khusus dipakai untuk menghitung kelompok usia yang terakhir dari penduduk yang ada, misalnya kelompok usia terakhir adalah 80-84 tahun. Untuk memudahkan penggunaan rumus dan tabel bilangan pengali Sprague, disajikan tabel bilangan pengali Sprague berdasarkan usia yang akan dihitung pada Tabel 5.19.

Tabel 5.17
Tabel Bilangan Pengali Sprague Berdasarkan
Usia yang Akan Dihitung

Usia	Kelompok Usia					
	0-4 tahun	5-9 tahun	10-14 tahun	15-19 tahun	20-24 tahun	25-29 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 tahun	0.3616	-0.2768	0.1488	-0.0336		
1 tahun	0.2640	-0.0960	0.0400	-0.0080		
2 tahun	0.1840	0.0400	-0.0320	0.0080		
3 tahun	0.1200	0.1360	-0.0720	0.0160		
4 tahun	0.0704	0.1968	-0.0848	0.0176		
5 tahun	0.0336	0.2272	-0.0752	0.0144		
6 tahun	0.0080	0.2320	-0.0480	0.0080		
7 tahun	-0.0800	0.2160	-0.0080	0.0000		
8 tahun	-0.0160	0.1840	0.0400	-0.0080		
9 tahun	-0.0176	0.1408	0.0912	-0.0144		
10 tahun	-0.0128	0.0848	0.1504	-0.0240	0.0016	
11 tahun	-0.0016	0.0144	0.2224	-0.0416	0.0064	
12 tahun	0.0064	-0.0336	0.2544	-0.0336	0.0064	
13 tahun	0.0064	-0.0416	0.2224	0.0144	-0.0016	
14 tahun	0.0016	-0.0240	0.1504	0.0848	-0.0128	
15 tahun		-0.0128	0.0848	0.1504	-0.0240	0.0016
16 tahun		-0.0016	0.0144	0.2224	-0.0416	0.0064
17 tahun		0.0064	-0.0336	0.2544	-0.0336	0.0064
18 tahun		0.0064	-0.0416	0.2224	0.0144	-0.0016
19 tahun		0.0016	-0.0240	0.1504	0.0848	-0.0128

Usia	Kelompok Usia				
	60-64 tahun	65-69 tahun	70-74 tahun	75-79 tahun	80-84 tahun
-1	-2	-3	-4	-5	-6
70 tahun	-0.0128	0.0848	0.1504	-0.0240	0.0016
71 tahun	-0.0016	0.0144	0.2224	-0.0416	0.0064
72 tahun	0.0064	-0.0336	0.2544	-0.0336	0.0064
73 tahun	0.0064	-0.0416	0.2224	0.0144	-0.0016
74 tahun	0.0016	-0.0240	0.1504	0.0848	-0.0128
75 tahun		-0.0144	0.0912	0.1408	-0.0176
76 tahun		-0.0080	0.0400	0.1840	-0.0160
77 tahun		0.0000	-0.0080	0.2160	-0.0080
78 tahun		0.0080	-0.0480	0.2320	0.0080
79 tahun		0.0144	-0.0752	0.2272	0.0336
80 tahun		0.0176	-0.0848	0.1968	0.0704
81 tahun		0.0160	-0.0720	0.1360	0.1200
82 tahun		0.0080	-0.0320	0.0400	0.1840
83 tahun		-0.0080	0.0400	-0.0960	0.2640
84 tahun		-0.0336	0.1488	-0.2768	0.3616

Sumber : Balitbang Depdiknas, 2007

Pemecahan penduduk lima tahunan dilakukan dengan terlebih dahulu dengan menentukan jumlah penduduk menurut kelompok umur. Kajian ini hendak mengetahui jumlah penduduk

menurut kelompok umur 4 (empat) tahun ke depan yakni tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Dalam kajian ini data jumlah penduduk menurut kelompok umur yang ada adalah tahun 2013 sampai tahun 2014. Oleh karena itu untuk mencari jumlah penduduk tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 bisa digunakan angka pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk.

Penyajian data jumlah penduduk menurut kelompok umur akan ditampilkan berdasarkan kecamatan di kota Bandung. Berikut data jumlah penduduk menurut kelompok umur berdasarkan kecamatan di kota Bandung :

Tabel 5.18
Data Penduduk Menurut Kelompok Umur
Per Kecamatan Kota Bandung

NO	KECAMATAN	0-4 thn		5-9 thn		10-14 thn		15-19 thn		20-24 thn		25-29 thn	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	Kec. Andir	9.596	9.886	12.706	13.090	10.679	11.001	11.150	11.487	11.309	11.650	8.015	8.257
2	Kec. Antapani	5.368	5.428	5.799	5.864	5.948	6.015	5.978	6.045	6.336	6.407	6.390	6.462
3	Kec. Arcamanik	5.865	6.031	5.471	5.626	5.170	5.316	5.943	6.111	6.017	6.187	5.994	6.163
4	Kec. Astananyar	5.079	5.132	5.085	5.138	4.616	4.665	5.904	5.966	6.139	6.204	7.060	7.134
5	Kec. Babakan Ciparay	12.295	12.487	10.246	10.406	9.668	9.819	9.769	9.922	9.808	9.961	9.877	10.031
6	Kec. Bandung Kidul	4.144	4.216	4.271	4.346	3.931	4.000	4.463	4.541	4.539	4.619	5.273	5.366
7	Kec. Bandung Kulon	13.008	13.340	10.707	10.980	11.626	11.923	12.134	12.444	12.525	12.845	10.777	11.052
8	Kec. Bandung Wetan	597	615	1.231	1.268	2.045	2.107	2.274	2.343	2.612	2.691	2.429	2.502
9	Kec. Batununggal	9.426	9.510	9.198	9.280	9.822	9.909	12.974	13.089	11.469	11.571	10.043	10.132
10	Kec. Bojong Loa Kaler	10.716	10.916	8.700	8.862	8.952	9.119	10.861	11.063	10.862	10.977	10.727	10.927
11	Kec. Bojong Loa Kidul	7.467	7.633	6.048	6.182	6.309	6.449	6.161	6.298	6.158	6.462	6.691	6.839
12	Kec. Buah Batu	4.561	4.637	6.017	6.117	6.168	6.270	7.519	7.644	7.990	8.122	8.950	9.098
13	Kec. Cibeunying Kaler	4.652	4.724	4.813	4.887	5.096	5.175	5.964	6.056	5.562	5.648	5.067	5.145
14	Kec. Cibeunying Kidul	7.914	8.023	7.877	7.986	9.166	9.292	9.276	9.404	8.858	8.980	8.394	8.510
15	Kec. Cibiru	5.297	5.340	6.359	6.410	5.907	5.955	4.992	5.032	5.018	5.058	4.875	4.914
16	Kec. Cicendo	8.094	8.219	8.302	8.430	7.574	7.691	8.655	8.789	9.273	9.416	10.091	10.247
17	Kec. Cidadap	3.829	3.914	4.491	4.591	3.788	3.872	5.103	5.217	5.475	5.597	4.876	4.985
18	Kec. Cinambo	1.405	1.435	1.455	1.486	1.796	1.835	1.376	1.406	1.427	1.458	1.619	1.654
19	Kec. Coblong	9.904	10.117	7.797	7.965	11.091	11.330	18.065	18.454	19.387	19.805	12.627	12.899
20	Kec. Gedebage	1.773	1.829	1.726	1.780	1.485	1.532	1.399	1.443	1.694	1.747	1.737	1.791
21	Kec. Kiaracondong	11.315	11.486	10.239	10.394	10.777	10.940	10.672	10.833	11.831	12.010	11.790	11.968
22	Kec. Lengong	4.492	4.555	4.630	4.695	8.419	8.538	4.696	4.762	3.888	3.943	5.714	5.795
23	Kec. Mandalajati	5.849	5.919	5.243	5.306	4.642	4.698	5.074	5.135	4.945	5.005	5.342	5.406
24	Kec. Panyileukan	2.458	2.506	2.639	2.690	2.737	2.790	3.072	3.131	2.863	2.918	2.706	2.758
25	Kec. Rancasari	5.113	5.213	5.701	5.812	4.924	5.020	5.202	5.303	5.521	5.629	5.690	5.801
26	Kec. Regol	7.953	8.014	5.605	5.660	6.751	6.818	7.250	7.322	7.256	6.756	5.882	5.940
27	Kec. Sukajadi	8.435	8.596	3.461	3.527	7.928	8.079	7.280	7.419	14.059	14.327	11.989	12.217
28	Kec. Sukasari	8.489	8.602	5.530	5.603	6.117	6.198	7.748	7.851	8.367	8.478	7.686	7.788
29	Kec. Sumur Bandung	3.402	3.421	2.952	2.969	3.546	3.566	3.455	3.474	4.248	4.272	3.453	3.472
30	Kec. Ujungberung	6.337	6.508	6.165	6.331	5.048	5.184	6.573	6.750	5.704	5.857	5.017	5.152

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2013 dan 2014, hasil analisis 2015

Angka pertumbuhan penduduk adalah kenaikan jumlah penduduk tiap tahunnya. Angka pertumbuhan penduduk ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AP_n = \frac{S_{n-1} - S_{n-2}}{S_{n-2}} \times 100\%$$

dimana :

- AP_n = Angka pertumbuhan penduduk tahun ke - n
 S_{n-1} = Penduduk tahun ke n - 1
 S_{n-2} = Penduduk tahun ke n - 2

Proyeksi jumlah penduduk dihitung dengan menggunakan rumus:

$$PUS_n = PUS_{n-1} \times \left(1 + \left(\frac{APPUS_{n-1}}{100} \right) \right)$$

dimana :

- PUS_n = Proyeksi penduduk tahun ke - n
 PUS_{n-1} = Penduduk tahun ke n - 1
 $APPUS_{n-1}$ = Angka pertumbuhan penduduk tahun ke n-1 sampai ke n - 2

Data pada tabel 5.13, kemudian diproses dengan menggunakan kedua rumus di atas sehingga menghasilkan data proyeksi jumlah penduduk menurut kelompok umur 4 (empat) tahun ke depan yakni tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Display data proyeksi jumlah penduduk menurut kelompok umur secara berturut-turut terurai dalam rangkaian tabel di bawah ini :

Tabel 5.19
Data Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur
0 - 4 dan 5 - 9 tahun Per Kecamatan Kota Bandung

NO	KECAMATAN	0-4 thn				5-9 thn			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Kec. Andir	10.185	10.493	10.810	11.136	13.486	13.893	14.313	14.746
2	Kec. Antapani	5.489	5.550	5.612	5.675	5.930	5.996	6.063	6.131
3	Kec. Arcamanik	6.202	6.377	6.558	6.743	5.785	5.949	6.117	6.290
4	Kec. Astananyar	5.186	5.240	5.294	5.350	5.192	5.246	5.301	5.356
5	Kec. Babakan Ciparay	12.682	12.880	13.081	13.285	10.569	10.734	10.901	11.071
6	Kec. Bandung Kidul	4.289	4.364	4.440	4.517	4.422	4.498	4.576	4.656
7	Kec. Bandung Kulon	13.680	14.030	14.388	14.755	11.260	11.548	11.842	12.145
8	Kec. Bandung Wetan	634	653	672	693	1.306	1.346	1.386	1.428
9	Kec. Batununggal	9.595	9.680	9.767	9.854	9.363	9.446	9.530	9.615
10	Kec. Bojong Loa Kaler	11.120	11.327	11.539	11.754	9.027	9.196	9.368	9.542
11	Kec. Bojong Loa Kidul	7.803	7.976	8.153	8.335	6.319	6.460	6.604	6.750
12	Kec. Buah Batu	4.714	4.793	4.873	4.954	6.219	6.323	6.428	6.535
13	Kec. Cibeunying Kaler	4.797	4.871	4.947	5.023	4.963	5.039	5.117	5.197
14	Kec. Cibeunying Kidul	8.134	8.246	8.359	8.474	8.096	8.207	8.321	8.435
15	Kec. Cibiru	5.383	5.427	5.471	5.516	6.462	6.514	6.567	6.621
16	Kec. Cicendo	8.346	8.475	8.606	8.739	8.560	8.692	8.827	8.963
17	Kec. Cidadap	4.001	4.090	4.180	4.273	4.693	4.797	4.904	5.012
18	Kec. Cinambo	1.466	1.497	1.529	1.562	1.518	1.550	1.583	1.617
19	Kec. Coblong	10.335	10.557	10.784	11.016	8.136	8.311	8.490	8.673
20	Kec. Gedebage	1.887	1.946	2.008	2.071	1.836	1.894	1.954	2.016
21	Kec. Kiaracondong	11.660	11.836	12.015	12.196	10.551	10.711	10.872	11.037
22	Kec. Lengkong	4.619	4.684	4.749	4.816	4.761	4.828	4.895	4.964
23	Kec. Mandalajati	5.990	6.062	6.134	6.207	5.370	5.434	5.499	5.565
24	Kec. Panyileukan	2.555	2.605	2.656	2.708	2.743	2.796	2.851	2.906
25	Kec. Rancasari	5.315	5.419	5.525	5.633	5.926	6.042	6.160	6.280
26	Kec. Regol	8.075	8.137	8.200	8.263	5.703	5.747	5.791	5.836
27	Kec. Sukajadi	8.760	8.927	9.098	9.271	3.594	3.663	3.733	3.804
28	Kec. Sukasari	8.717	8.833	8.950	9.069	5.678	5.753	5.830	5.907
29	Kec. Sumur Bandung	3.440	3.459	3.479	3.498	2.986	3.002	3.019	3.036
30	Kec. Ujungberung	6.684	6.864	7.049	7.239	6.502	6.677	6.857	7.043

Sumber : Hasil analisis 2015

Tabel 5.20
Data Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur
10 - 14 dan 15 - 19 tahun Per Kecamatan Kota Bandung

NO	KECAMATAN	10-14 thn				15-19 thn			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Kec. Andir	11.333	11.676	12.029	12.392	11.834	12.192	12.560	12.940
2	Kec. Antapani	6.082	6.150	6.219	6.288	6.113	6.181	6.250	6.320
3	Kec. Arcamanik	5.466	5.621	5.780	5.944	6.284	6.462	6.645	6.833
4	Kec. Astananyar	4.714	4.763	4.813	4.863	6.028	6.091	6.155	6.219
5	Kec. Babakan Ciparay	9.972	10.128	10.286	10.447	10.077	10.234	10.394	10.556
6	Kec. Bandung Kidul	4.069	4.140	4.212	4.285	4.620	4.700	4.782	4.865
7	Kec. Bandung Kulon	12.227	12.539	12.859	13.188	12.762	13.087	13.421	13.764
8	Kec. Bandung Wetan	2.171	2.236	2.303	2.373	2.414	2.486	2.561	2.639
9	Kec. Batununggal	9.997	10.086	10.176	10.267	13.206	13.323	13.442	13.562
10	Kec. Bojong Loa Kaler	9.289	9.463	9.639	9.819	11.269	11.480	11.694	11.912
11	Kec. Bojong Loa Kidul	6.592	6.739	6.889	7.042	6.438	6.581	6.727	6.877
12	Kec. Buah Batu	6.374	6.481	6.589	6.698	7.771	7.901	8.033	8.166
13	Kec. Cibeunying Kaler	5.255	5.336	5.419	5.503	6.150	6.245	6.342	6.440
14	Kec. Cibeunying Kidul	9.420	9.550	9.681	9.815	9.534	9.665	9.798	9.933
15	Kec. Cibiru	6.003	6.052	6.101	6.151	5.073	5.114	5.156	5.197
16	Kec. Cicendo	7.810	7.930	8.053	8.177	8.925	9.063	9.203	9.345
17	Kec. Cidadap	3.958	4.046	4.136	4.227	5.333	5.451	5.572	5.696
18	Kec. Cinambo	1.874	1.914	1.955	1.997	1.436	1.467	1.498	1.530
19	Kec. Coblong	11.574	11.823	12.077	12.337	18.851	19.256	19.670	20.093
20	Kec. Gedebage	1.580	1.630	1.682	1.735	1.489	1.536	1.584	1.634
21	Kec. Kiaracondong	11.105	11.273	11.444	11.616	10.997	11.163	11.332	11.503
22	Kec. Lengkung	8.658	8.779	8.902	9.027	4.829	4.897	4.965	5.035
23	Kec. Mandalajati	4.754	4.811	4.869	4.927	5.196	5.259	5.322	5.385
24	Kec. Panyileukan	2.844	2.900	2.957	3.014	3.192	3.254	3.318	3.383
25	Kec. Rancasari	5.118	5.218	5.320	5.424	5.407	5.512	5.620	5.730
26	Kec. Regol	6.870	6.923	6.976	7.030	7.378	7.435	7.492	7.549
27	Kec. Sukajadi	8.233	8.390	8.551	8.714	7.561	7.705	7.852	8.002
28	Kec. Sukasari	6.281	6.364	6.449	6.535	7.956	8.061	8.169	8.277
29	Kec. Sumur Bandung	3.586	3.606	3.626	3.646	3.493	3.513	3.533	3.552
30	Kec. Ujungberung	5.324	5.468	5.615	5.767	6.932	7.119	7.311	7.509

Sumber : Hasil analisis 2015

Tabel 5.21
Data Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur
20 - 24 dan 25 - 29 tahun Per Kecamatan Kota Bandung

NO	KECAMATAN	20-24 thn				25-29 thn			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Kec. Andir	12.002	12.365	12.738	13.123	8.507	8.764	9.028	9.301
2	Kec. Antapani	6.479	6.551	6.624	6.698	6.534	6.607	6.681	6.756
3	Kec. Arcamanik	6.362	6.542	6.727	6.918	6.337	6.517	6.701	6.891
4	Kec. Astananyar	6.269	6.334	6.400	6.467	7.208	7.284	7.360	7.436
5	Kec. Babakan Ciparay	10.117	10.275	10.435	10.598	10.188	10.347	10.508	10.672
6	Kec. Bandung Kidul	4.699	4.781	4.864	4.948	5.459	5.554	5.651	5.749
7	Kec. Bandung Kulon	13.173	13.509	13.854	14.207	11.334	11.623	11.920	12.224
8	Kec. Bandung Wetan	2.772	2.856	2.942	3.031	2.577	2.655	2.735	2.818
9	Kec. Batununggal	11.674	11.778	11.883	11.989	10.222	10.313	10.405	10.498
10	Kec. Bojong Loa Kaler	11.182	11.391	11.603	11.820	11.131	11.339	11.550	11.766
11	Kec. Bojong Loa Kidul	6.606	6.753	6.903	7.056	6.991	7.146	7.305	7.468
12	Kec. Buah Batu	8.257	8.395	8.535	8.677	9.250	9.404	9.560	9.720
13	Kec. Cibeunying Kaler	5.735	5.824	5.914	6.006	5.225	5.305	5.388	5.471
14	Kec. Cibeunying Kidul	9.104	9.229	9.356	9.485	8.627	8.746	8.866	8.989
15	Kec. Cibiru	5.099	5.140	5.182	5.224	4.954	4.994	5.035	5.076
16	Kec. Cicendo	9.561	9.709	9.859	10.011	10.405	10.566	10.729	10.895
17	Kec. Cidadap	5.721	5.848	5.978	6.111	5.096	5.209	5.324	5.443
18	Kec. Cinambo	1.489	1.521	1.553	1.587	1.689	1.725	1.762	1.800
19	Kec. Coblong	20.231	20.666	21.110	21.564	13.176	13.460	13.749	14.045
20	Kec. Gedebage	1.802	1.859	1.918	1.978	1.848	1.906	1.966	2.028
21	Kec. Kiaracondong	12.192	12.376	12.563	12.753	12.149	12.332	12.519	12.708
22	Kec. Lengkong	3.998	4.054	4.111	4.169	5.876	5.959	6.042	6.127
23	Kec. Mandalajati	5.065	5.126	5.187	5.249	5.471	5.536	5.602	5.669
24	Kec. Panyileukan	2.975	3.033	3.092	3.153	2.812	2.867	2.923	2.980
25	Kec. Rancasari	5.739	5.851	5.966	6.082	5.914	6.030	6.148	6.268
26	Kec. Regol	6.808	6.860	6.913	6.966	5.986	6.031	6.078	6.124
27	Kec. Sukajadi	14.600	14.879	15.163	15.453	12.450	12.688	12.930	13.177
28	Kec. Sukasari	8.591	8.705	8.821	8.939	7.892	7.997	8.103	8.211
29	Kec. Sumur Bandung	4.296	4.320	4.344	4.368	3.491	3.511	3.530	3.550
30	Kec. Ujungberung	6.015	6.177	6.344	6.515	5.291	5.434	5.580	5.731

Sumber : Hasil analisis 2015

Setelah diketahui proyeksi jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, selanjutnya

dihitung pemecahan penduduk lima tahunan dengan menggunakan tabel Sprague sebagaimana tertera dalam tabel 5.12. Terkait dengan ruang lingkup kajian, maka proyeksi dibatasi hanya tahun 2016 dan 2017.

Yang akan dihitung adalah :

- a. proyeksi jumlah penduduk usia Sekolah Dasar, yakni 7 – 12 tahun ;
- b. proyeksi jumlah penduduk usia Sekolah Menengah Pertama, yakni 13 – 15 tahun ; dan
- c. proyeksi jumlah penduduk usia Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan, yakni 16 – 18 tahun.

5.2.1.1. Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar

Proyeksi jumlah penduduk usia sekolah dasar 7 – 12 tahun dengan menggunakan tabel Sprague menghasilkan data sebagaimana terurai dalam tabel berikut :

Tabel 5.22
Data Proyeksi Penduduk Usia 7 – 12 tahun
Tahun 2016 Per Kecamatan Kota Bandung

		2016						
		7 Tahun	8 Tahun	9 Tahun	10 Tahun	11 Tahun	12 Tahun	7-12 Tahun
1	Kecamatan Astanaanyar	676	1.023	993	958	914	905	5.468
2	Kecamatan Bojongloa Kaler	1.004	1.797	1.793	1.801	1.814	1.858	10.068
3	Kecamatan Bojongloa Kidul	703	1.278	1.289	1.312	1.348	1.370	7.301
4	Kecamatan Regol	535	1.145	1.190	1.257	1.344	1.414	6.885
5	Kecamatan Babakan Ciparay	1.207	2.092	2.061	2.039	2.026	2.020	11.446
6	Kecamatan Bandung Kulon	1.272	2.297	2.334	2.393	2.475	2.539	13.309
7	Kecamatan Andir	1.272	2.297	2.334	2.393	2.475	2.539	14.606
8	Kecamatan Cicendo	2.068	2.758	2.661	2.527	2.352	2.240	9.229
9	Kecamatan Sukajadi	1.136	1.709	1.667	1.619	1.560	1.537	6.709
		10	805	1.013	1.297	1.679	1.905	6.709

10	Kecamatan Sukasari	485	1.107	1.119	1.152	1.204	1.267	6.335
11	Kecamatan Cidadap	677	935	894	841	773	749	4.869
12	Kecamatan Coblong	856	1.679	1.785	1.919	2.063	2.281	10.584
13	Kecamatan Cibeunying Kaler	656	1.013	1.021	1.027	1.029	1.047	5.793
14	Kecamatan Cibeunying Kidul	1.037	1.683	1.742	1.810	1.886	1.941	10.098
15	Kecamatan Sumur Bandung	343	613	640	675	721	748	3.741
16	Kecamatan Bandung Wetan	221	307	346	387	430	463	2.153
17	Kecamatan Antapani	802	1.211	1.218	1.225	1.230	1.233	6.919
18	Kecamatan Arcamanik	730	1.166	1.145	1.124	1.099	1.096	6.359
19	Kecamatan Ujung Berung	849	1.281	1.215	1.140	1.045	1.011	6.541
20	Kecamatan Cibiru	925	1.313	1.300	1.279	1.251	1.217	7.284
21	Kecamatan Panyileukan	372	563	565	567	565	571	3.203
22	Kecamatan Mandalajati	650	1.053	1.021	989	953	936	5.603
23	Kecamatan Kiaracondong	1.276	2.143	2.167	2.204	2.257	2.288	12.336
24	Kecamatan Cinambo	200	326	345	367	394	405	2.038
25	Kecamatan Batununggal	1.185	1.880	1.888	1.893	1.885	1.938	10.669
26	Kecamatan Buah Batu	930	1.283	1.283	1.273	1.250	1.255	7.274
27	Kecamatan Bandung Kidul	589	886	866	843	814	803	4.801
28	Kecamatan Rancasari	830	1.190	1.152	1.105	1.047	1.011	6.334
29	Kecamatan Lengkong	598	1.125	1.327	1.559	1.837	1.963	8.409
30	Kecamatan Gedebage	240	370	359	347	335	324	1.975

Sumber : Hasil analisis 2015

Tabel 5.23
Data Proyeksi Penduduk Usia 7 - 12 tahun
Tahun 2017 Per Kecamatan Kota Bandung

No	Kecamatan	2017						
		7 Tahun	8 Tahun	9 Tahun	10 Tahun	11 Tahun	12 Tahun	7-12 Tahun
1	Kecamatan Astanaanyar	683	1.034	1.003	968	923	914	5.526
2	Kecamatan Bojongloa Kaler	1.023	1.831	1.827	1.834	1.848	1.893	10.256
3	Kecamatan Bojongloa Kidul	719	1.306	1.318	1.341	1.378	1.401	7.464
4	Kecamatan Regol	539	1.154	1.199	1.267	1.354	1.425	6.938
5	Kecamatan Babakan Ciparay	1.226	2.125	2.093	2.071	2.058	2.052	11.625
6	Kecamatan Bandung Kulon	1.304	2.356	2.394	2.454	2.538	2.603	13.649
7	Kecamatan Andir	2.131	2.841	2.741	2.603	2.423	2.308	15.047
8	Kecamatan Cicendo	1.154	1.735	1.693	1.644	1.585	1.561	9.372
9	Kecamatan Sukajadi	10	820	1.032	1.322	1.711	1.941	6.837
10	Kecamatan Sukasari	492	1.122	1.134	1.168	1.220	1.284	6.420
11	Kecamatan Cidadap	692	956	914	860	790	765	4.977
12	Kecamatan Coblong	875	1.715	1.824	1.960	2.108	2.330	10.812
13	Kecamatan Cibeunying Kaler	666	1.028	1.036	1.043	1.045	1.063	5.882
14	Kecamatan Cibeunying Kidul	1.051	1.706	1.766	1.834	1.912	1.968	10.237
15	Kecamatan Sumur Bandung	345	617	644	679	725	752	3.762
16	Kecamatan Bandung Wetan	227	316	357	399	443	476	2.218
17	Kecamatan Antapani	811	1.225	1.232	1.238	1.244	1.247	6.996
18	Kecamatan Arcamanik	750	1.199	1.177	1.155	1.130	1.127	6.539
19	Kecamatan Ujung Berung	872	1.315	1.248	1.170	1.073	1.038	6.717
20	Kecamatan Cibiru	932	1.324	1.311	1.289	1.261	1.226	7.343
21	Kecamatan Panyileukan	380	574	577	578	576	582	3.265
22	Kecamatan Mandalajati	658	1.066	1.034	1.001	964	947	5.670
23	Kecamatan Kiaracondong	1.296	2.175	2.200	2.237	2.291	2.322	12.522
24	Kecamatan Cinambo	204	333	353	375	403	414	2.081
25	Kecamatan Batununggal	1.196	1.897	1.904	1.910	1.902	1.956	10.764
26	Kecamatan Buah Batu	946	1.304	1.305	1.295	1.271	1.276	7.396
27	Kecamatan Bandung Kidul	600	901	882	858	828	817	4.885
28	Kecamatan Rancasari	846	1.213	1.174	1.126	1.067	1.031	6.458

29	Kecamatan Lengkong	606	1.141	1.346	1.581	1.863	1.990	8.527
30	Kecamatan Gedebage	248	382	370	358	345	334	2.038

Sumber : Hasil analisis 2015

Tabel 5.24
Data Proyeksi Penduduk Usia 7 - 12 tahun
Tahun 2018 Per Kecamatan Kota Bandung

No	Kecamatan	2018						
		7 Tahun	8 Tahun	9 Tahun	10 Tahun	11 Tahun	12 Tahun	7-12 Tahun
1	Kecamatan Astanaanyar	690	1.045	1.014	978	933	924	5.583
2	Kecamatan Bojongloa Kaler	1.042	1.865	1.861	1.869	1.882	1.928	10.447
3	Kecamatan Bojongloa Kidul	735	1.335	1.347	1.371	1.409	1.432	7.629
4	Kecamatan Regol	543	1.162	1.209	1.276	1.365	1.436	6.991
5	Kecamatan Babakan Ciparay	1.245	2.158	2.126	2.104	2.090	2.084	11.806
6	Kecamatan Bandung Kulon	1.337	2.416	2.455	2.517	2.603	2.670	13.997
7	Kecamatan Andir	2.195	2.927	2.824	2.682	2.496	2.378	15.502
8	Kecamatan Cicendo	1.171	1.762	1.719	1.670	1.609	1.585	9.517
9	Kecamatan Sukajadi	10	836	1.052	1.347	1.744	1.978	6.968
10	Kecamatan Sukasari	498	1.137	1.149	1.183	1.237	1.301	6.505
11	Kecamatan Cidadap	707	977	934	879	808	782	5.088
12	Kecamatan Coblong	893	1.752	1.863	2.002	2.153	2.380	11.044
13	Kecamatan Cibeunying Kaler	677	1.044	1.052	1.059	1.061	1.080	5.973
14	Kecamatan Cibeunying Kidul	1.066	1.730	1.791	1.860	1.938	1.995	10.378
15	Kecamatan Sumur Bandung	347	620	647	683	729	757	3.783
16	Kecamatan Bandung Wetan	234	325	367	411	457	491	2.285
17	Kecamatan Antapani	820	1.238	1.246	1.252	1.258	1.261	7.074
18	Kecamatan Arcamanik	772	1.233	1.211	1.188	1.162	1.159	6.724
19	Kecamatan Ujung Berung	896	1.351	1.282	1.202	1.102	1.066	6.898
20	Kecamatan Cibiru	940	1.334	1.321	1.300	1.272	1.236	7.403
21	Kecamatan Panyileukan	387	585	588	589	587	593	3.329
22	Kecamatan Mandalajati	666	1.079	1.046	1.013	976	959	5.737

23	Kecamatan Kiaracondong	1.315	2.208	2.233	2.271	2.326	2.358	12.711
24	Kecamatan Cinambo	208	340	360	383	411	422	2.126
25	Kecamatan Batununggal	1.206	1.914	1.921	1.927	1.919	1.973	10.860
26	Kecamatan Buah Batu	962	1.326	1.326	1.316	1.292	1.297	7.519
27	Kecamatan Bandung Kidul	610	917	897	873	842	831	4.970
28	Kecamatan Rancasari	862	1.237	1.197	1.148	1.088	1.051	6.585
29	Kecamatan Lengkong	615	1.157	1.365	1.603	1.889	2.018	8.646
30	Kecamatan Gedebage	256	394	382	369	356	345	2.102

Sumber : Hasil analisis 2015

5.2.1.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama

Penduduk usia sekolah dasar adalah mereka yang berusia antara 13 – 15 tahun. Proyeksi jumlah penduduk usia SMP dengan menggunakan tabel Sprague menghasilkan data sebagaimana berikut :

Tabel 5.25
Data Proyeksi Penduduk Usia 13 – 15 tahun
Tahun 2016- 2017 Per Kecamatan Kota Bandung

	Kecamatan	2016				2017			
		13 Tahun	14 Tahun	15 Tahun	13-15 Tahun	13 Tahun	14 Tahun	15 Tahun	13-15 Tahun
1	Kecamatan Astanaanyar	952	1034	1112	3099	962	1045	1124	3131
2	Kecamatan Bojongloa Kaler	1942	2048	2156	6146	1978	2087	2196	6261
3	Kecamatan Bojongloa Kidul	1365	1343	1328	4036	1395	1373	1357	4126
4	Kecamatan Regol	1449	1459	1477	4384	1460	1470	1488	4418
5	Kecamatan Babakan Ciparay	2019	2023	2031	6073	2051	2054	2062	6167
6	Kecamatan Bandung Kulon	2565	2568	2578	7711	2630	2634	2644	7908
7	Kecamatan Andir	2242	2315	2363	6920	2309	2385	2435	7129
8	Kecamatan Cicendo	1571	1642	1708	4921	1596	1667	1735	4997

9	Kecamatan Sukajadi	1858	1651	1487	4996	1893	1683	1515	5091
10	Kecamatan Sukasari	1335	1405	1482	4222	1352	1424	1502	4279
11	Kecamatan Cidadap	796	887	970	2652	813	907	991	2711
12	Kecamatan Coblong	2595	2964	3318	8877	2651	3028	3389	9068
13	Kecamatan Cibeunying Kaler	1089	1144	1196	3429	1106	1162	1214	3482
14	Kecamatan Cibeunying Kidul	1960	1954	1951	5864	1987	1981	1978	5945
15	Kecamatan Sumur Bandung	743	718	698	2159	747	722	702	2171
16	Kecamatan Bandung Wetan	477	479	482	1438	491	494	497	1481
17	Kecamatan Antapani	1232	1230	1228	3690	1246	1244	1241	3732
18	Kecamatan Arcamanik	1126	1177	1226	3529	1158	1210	1260	3629
19	Kecamatan Ujung Berung	1075	1198	1309	3582	1104	1230	1345	3678
20	Kecamatan Cibiru	1175	1130	1084	3389	1185	1140	1092	3417
21	Kecamatan Panyileukan	587	610	631	1829	599	622	644	1865
22	Kecamatan Mandalajati	950	983	1015	2949	962	995	1027	2984
23	Kecamatan Kiaracondong	2278	2246	2220	6744	2313	2280	2254	6846
24	Kecamatan Cinambo	389	358	329	1077	398	366	336	1100
25	Kecamatan Batununggal	2085	2285	2472	6842	2104	2305	2494	6903
26	Kecamatan Buah Batu	1309	1393	1470	4173	1331	1416	1495	4242
27	Kecamatan Bandung Kidul	822	859	895	2575	836	874	910	2620
28	Kecamatan Rancasari	1014	1041	1063	3118	1034	1061	1084	3179
29	Kecamatan Lengkong	1846	1575	1331	4752	1872	1597	1350	4819
30	Kecamatan Gedebage	315	309	303	928	325	319	313	957

Sumber : Hasil analisis 2015

Tabel 5.26
Data Proyeksi Penduduk Usia 13 - 15 tahun
Tahun 2018 Per Kecamatan Kota Bandung

No	Kecamatan	2018			
		13 Tahun	14 Tahun	15 Tahun	13-15 Tahun
1	Kecamatan Astanaanyar	972	1056	1136	3164
2	Kecamatan Bojongloa Kaler	2015	2125	2237	6377
3	Kecamatan Bojongloa Kidul	1426	1403	1388	4217
4	Kecamatan Regol	1471	1481	1499	4452
5	Kecamatan Babakan Ciparay	2083	2086	2095	6264
6	Kecamatan Bandung Kulon	2698	2701	2712	8110
7	Kecamatan Andir	2379	2457	2508	7344

8	Kecamatan Cicendo	1620	1693	1761	5075
9	Kecamatan Sukajadi	1930	1715	1544	5188
10	Kecamatan Sukasari	1371	1443	1522	4336
11	Kecamatan Cidadap	831	927	1013	2771
12	Kecamatan Coblong	2708	3093	3462	9263
13	Kecamatan Cibeunying Kaler	1123	1180	1233	3536
14	Kecamatan Cibeunying Kidul	2014	2008	2005	6027
15	Kecamatan Sumur Bandung	751	770	705	2227
16	Kecamatan Bandung Wetan	506	427	512	1445
17	Kecamatan Antapani	1260	1258	1255	3773
18	Kecamatan Arcamanik	1191	1245	1296	3732
19	Kecamatan Ujung Berung	1134	1263	1381	3778
20	Kecamatan Cibiru	1194	1149	1101	3444
21	Kecamatan Panyileukan	610	634	656	1901
22	Kecamatan Mandalajati	973	1007	1040	3020
23	Kecamatan Kiaracondong	2348	2314	2288	6950
24	Kecamatan Cinambo	406	373	344	1123
25	Kecamatan Batununggal	2123	2326	2516	6965
26	Kecamatan Buah Batu	1353	1440	1520	4313
27	Kecamatan Bandung Kidul	850	889	926	2666
28	Kecamatan Rancasari	1054	1082	1105	3242
29	Kecamatan Lengkong	1898	1620	1369	4887
30	Kecamatan Gedebage	336	329	323	988

Sumber : Hasil analisis 2015

5.2.1.3. Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan

Penduduk usia sekolah dasar adalah mereka yang berusia antara 16 – 18 tahun. Proyeksi jumlah penduduk usia SMA/SMK dengan menggunakan tabel Sprague menghasilkan data sebagaimana berikut :

Tabel 5.27
Data Proyeksi Penduduk Usia 16 – 18 tahun
Tahun 2016 Per Kecamatan Kota Bandung

NO	KECAMATAN	2016			
		16 Tahun	17 Tahun	18 Tahun	16-18 Tahun
1	Kec. Andir	2.399	2.439	2.479	7.317
2	Kec. Antapani	1.223	1.226	1.241	3.691
3	Kec. Arcamanik	1.278	1.315	1.325	3.918
4	Kec. Astananyar	1.198	1.257	1.270	3.725
5	Kec. Babakan Ciparay	2.044	2.053	2.055	6.151
6	Kec. Bandung Kidul	934	960	962	2.857
7	Kec. Bandung Kulon	2.585	2.602	2.639	7.826
8	Kec. Bandung Wetan	481	487	505	1.474
9	Kec. Batununggal	2.669	2.781	2.757	8.208
10	Kec. Bojong Loa Kaler	2.273	2.351	2.364	6.989
11	Kec. Bojong Loa Kidul	1.315	1.308	1.310	3.934
12	Kec. Buah Batu	1.551	1.611	1.634	4.796
13	Kec. Cibeunying Kaler	1.249	1.280	1.275	3.804
14	Kec. Cibeunying Kidul	1.946	1.936	1.924	5.806
15	Kec. Cibiru	1.032	999	993	3.024
16	Kec. Cicendo	1.780	1.836	1.864	5.480
17	Kec. Cidadap	1.053	1.118	1.151	3.322
18	Kec. Cinambo	299	279	276	853
19	Kec. Coblong	3.666	3.947	4.120	11.733
20	Kec. Gedebage	297	298	310	904
21	Kec. Kiaracondong	2.192	2.193	2.241	6.625
22	Kec. Lengkong	1.077	883	804	2.764
23	Kec. Mandalajati	1.052	1.074	1.069	3.196
24	Kec. Panyileukan	653	665	660	1.978
25	Kec. Rancasari	1.087	1.108	1.122	3.316
26	Kec. Regol	1.497	1.504	1.491	4.492
27	Kec. Sukajadi	1.291	1.283	1.582	4.156
28	Kec. Sukasari	1.564	1.632	1.677	4.874
29	Kec. Sumur Bandung	671	669	707	2.047
30	Kec. Ujungberung	1.429	1.497	1.479	4.405
JUMLAH		43.788	44.592	45.285	133.664

Sumber : Hasil analisis 2015

Tabel 5.28
Data Proyeksi Penduduk Usia 16 - 18 tahun
Tahun 2017 Per Kecamatan Kota Bandung

NO	KECAMATAN	2017			
		16 Tahun	17 Tahun	18 Tahun	16-18 Tahun
1	Kec. Andir	2.472	2.513	2.554	7.538
2	Kec. Antapani	1.237	1.240	1.255	3.732
3	Kec. Arcamanik	1.314	1.352	1.363	4.029
4	Kec. Astananyar	1.210	1.270	1.283	3.763
5	Kec. Babakan Ciparay	2.075	2.085	2.087	6.248
6	Kec. Bandung Kidul	951	977	979	2.906
7	Kec. Bandung Kulon	2.651	2.669	2.706	8.026
8	Kec. Bandung Wetan	496	502	521	1.518
9	Kec. Batununggal	2.693	2.806	2.782	8.281
10	Kec. Bojong Loa Kaler	2.316	2.395	2.408	7.119
11	Kec. Bojong Loa Kidul	1.344	1.337	1.340	4.021
12	Kec. Buah Batu	1.577	1.638	1.661	4.876
13	Kec. Cibeunying Kaler	1.269	1.300	1.294	3.863
14	Kec. Cibeunying Kidul	1.973	1.963	1.950	5.886
15	Kec. Cibiru	1.041	1.007	1.001	3.049
16	Kec. Cicendo	1.807	1.864	1.893	5.564
17	Kec. Cidadap	1.076	1.143	1.176	3.396
18	Kec. Cinambo	305	285	282	872
19	Kec. Coblong	3.745	4.031	4.209	11.985
20	Kec. Gedebage	306	307	319	933
21	Kec. Kiaracondong	2.225	2.226	2.275	6.725
22	Kec. Lengkong	1.092	896	815	2.803
23	Kec. Mandalajati	1.065	1.087	1.082	3.234
24	Kec. Panyileukan	666	678	673	2.017
25	Kec. Rancasari	1.108	1.129	1.144	3.381
26	Kec. Regol	1.509	1.515	1.503	4.527
27	Kec. Sukajadi	1.315	1.307	1.612	4.235
28	Kec. Sukasari	1.585	1.654	1.700	4.939
29	Kec. Sumur Bandung	675	673	711	2.059
30	Kec. Ujungberung	1.468	1.538	1.519	4.524
JUMLAH		44.566	45.387	46.094	136.048

Sumber : Hasil analisis 2015

5.2.2. Proyeksi Siswa

Proyeksi siswa dihitung berdasarkan target yang ditentukan yaitu disesuaikan dengan target APK rata rata kota Bandung. APK rata rata kota Bandung didasarkan pada target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bandung 2013-2018.

Berikut data APK Kota Bandung tahun 2015, 2016 dan 2018 untuk tiap jenjang pendidikan :

Tabel 5.29
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bandung 2015 - 2018

TAHUN	SD	SMP	SMA
2015	87,22%	97,40%	99,50%
2016	89,25%	97,60%	99,60%
2017	90,00%	98,00%	99,80%
2018	92,00%	99,00%	100%

Sumber : Renstra Disdik Kota Bandung 2013 -2018, diolah

Dengan asumsi APK tiap Kecamatan di kota Bandung sama dengan proyeksi APK rata-rata Kota Bandung sebagaimana tertera pada tabel 5.29, maka dapat diproyeksikan siswa sekolah tiap jenjang pendidikan di kota Bandung tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 5.30
Proyeksi Siswa Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Bandung

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa 2015	APK 2016	Jumlah Siswa 2016	Jumlah Siswa 2015	APK 2016	Jumlah Siswa 2016
1	Andir	14.606	89,25%	13.036	3.099	97,60%	3.025
2	Antapani	6.919	89,25%	6.175	6.146	97,60%	5.998
3	Arcamanik	6.359	89,25%	5.675	4.036	97,60%	3.939
4	Astanaanyar	5.468	89,25%	4.881	4.384	97,60%	4.279

5	Babakan Ciparay	11.446	89,25%	10.216	6.073	97,60%	5.927
6	Bandung Kidul	4.801	89,25%	4.285	7.711	97,60%	7.526
7	Bandung Kulon	13.309	89,25%	11.878	6.920	97,60%	6.754
8	Bandung Wetan	2.153	89,25%	1.922	4.921	97,60%	4.803
9	Batununggal	10.669	89,25%	9.522	4.996	97,60%	4.876
10	Bojongloa Kaler	10.068	89,25%	8.985	4.222	97,60%	4.121
11	Bojongloa Kidul	7.301	89,25%	6.516	2.652	97,60%	2.589
12	Buahbatu	7.274	89,25%	6.492	8.877	97,60%	8.664
13	Cibeunying Kaler	5.793	89,25%	5.170	3.429	97,60%	3.347
14	Cibeunying Kidul	10.098	89,25%	9.013	5.864	97,60%	5.724
15	Cibiru	7.284	89,25%	6.501	2.159	97,60%	2.107
16	Cicendo	9.229	89,25%	8.237	1.438	97,60%	1.404
17	Cidadap	4.869	89,25%	4.346	3.690	97,60%	3.602
18	Cinambo	2.038	89,25%	1.819	3.529	97,60%	3.444
19	Coblong	10.584	89,25%	9.446	3.582	97,60%	3.496
20	Gedebage	1.975	89,25%	1.763	3.389	97,60%	3.308
21	Kiaracondong	12.336	89,25%	11.010	1.829	97,60%	1.785
22	Lengkong	8.409	89,25%	7.505	2.949	97,60%	2.878
23	Mandalajati	5.603	89,25%	5.000	6.744	97,60%	6.582
24	Panyileukan	3.203	89,25%	2.859	1.077	97,60%	1.051
25	Rancasari	6.334	89,25%	5.653	6.842	97,60%	6.678
26	Regol	6.885	89,25%	6.145	4.173	97,60%	4.073
27	Sukajadi	6.709	89,25%	5.988	2.575	97,60%	2.513
28	Sukasari	6.335	89,25%	5.654	3.118	97,60%	3.044
29	Sumur Bandung	3.741	89,25%	3.339	4.752	97,60%	4.638
30	Ujungberung	6.541	89,25%	5.837	928	97,60%	906
Jumlah/rata-rata		218.341	89,25%	194.869	126.107	97,60%	123.081

Sumber : Hasil analisis 2015

5.2.3. Proyeksi Kebutuhan Sekolah dan Ruang Kelas

5.2.3.1. Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas Berdasarkan Perhitungan

Proyeksi kebutuhan ruang kelas berdasarkan perhitungan dianggap lebih tepat karena akan dapat melihat kebutuhan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Proyeksi ini didasarkan pada jumlah penduduk usia sekolah masing-masing jenjang pendidikan.

Perhitungan kebutuhan ruang kelas memakai rumus sebagai berikut :

$$BRKt = \frac{PSt}{\left(\frac{S}{K}\right) \times \left(\frac{K}{RK}\right)} - (RKL + RKS)$$

Dimana :

- BRKt = Jumlah kebutuhan ruang kelas seluruhnya tahun ke t
PSt = Proyeksi siswa pada tahun t
(S/K) = Rasio siswa perkelas
(K/RK) = Rasio kelas per ruang kelas
RKL = Jumlah ruang kelas lama yang sudah ada
RKS = Jumlah ruang kelas yang sedang dibangun atau yang telah dibangun tetapi belum digunakan.

Data pada tabel 5.30 kemudian diproses dengan rumus di atas menghasilkan proyeksi kebutuhan kelas sebagai berikut :

Tabel 5.31
Proyeksi Kebutuhan Kelas Jenjang
Pendidikan Dasar (SD, SMP) Tahun 2016
Di Kota Bandung

NO	KECAMATAN	SISWA SD 2016	SISWA SMP 2016	Rasio Kelas SD	Rasio Kelas SMP	RUANG KELAS		KEB. R KELAS 2016	
		89,25%	97,60%			SD	SMP	SD	SMP
1	Kec. Andir	13.430	6.754	1,3	1,1	267	224	(12)	(71)
2	Kec. Antapani	6.244	3.602	1,5	1,2	141	68	(34)	
3	Kec. Arcamanik	5.836	3.444	1,3	1,2	216	90	(107)	(18)
4	Kec. Astananyar	4.932	3.025	1,6	0,9	187	62	(109)	
5	Kec. Babakan Ciparay	10.375	5.927	1,8	1,4	179	81	(33)	
6	Kec. Bandung Kidul	4.360	2.513	1,7	1,1	73	49	(10)	
7	Kec. Bandung Kulon	12.182	7.526	1,7	1,4	221	50	(44)	
8	Kec. Bandung Wetan	1.980	1.404	1,2	1,0	194	196	(153)	(161)
9	Kec. Batununggal	9.607	6.678	1,6	1,3	182	101	(28)	
10	Kec. Bojong Loa Kaler	9.153	5.998	1,2	1,1	134	132	51	
11	Kec. Bojong Loa Kidul	6.661	3.939	1,4	1,2	179	64	(57)	
12	Kec. Buah Batu	6.601	4.073	1,6	1,0	134	106	(33)	(4)
13	Kec. Cibeunying Kaler	5.250	3.347	1,2	1,0	134	101	(25)	(17)
14	Kec. Cibeunying Kidul	9.137	5.724	1,7	1,2	195	106	(57)	
15	Kec. Cibiru	6.554	3.308	1,9	0,9	136	64	(48)	
16	Kec. Cicendo	8.364	4.803	1,2	1,1	308	203	(133)	(94)
17	Kec. Cidadap	4.442	2.589	1,2	1,4	121	48	(31)	(2)
18	Kec. Cinambo	1.858	1.051	1,3	1,3	46	7	(10)	
19	Kec. Cobleng	9.649	8.664	1,1	1,0	317	176	(97)	
20	Kec. Gedebage	1.819	906	1,4	6,0	59	1	(26)	
21	Kec. Kiaracandong	11.176	6.582	1,8	1,0	190	149	(37)	
22	Kec. Lengkong	7.610	4.638	1,1	1,0	258	180	(83)	(64)
23	Kec. Mandalajati	5.060	2.878	2,1	1,5	96	28	(37)	

24	Kec. Panyileukan	2.914	1.785	1,8	1,1	68	44	(26)	(3)
25	Kec. Rancasari	5.764	3.044	1,8	1,3	98	70	(16)	(11)
26	Kec. Regol	6.192	4.279	1,1	1,1	311	216	(164)	(119)
27	Kec. Sukajadi	6.102	4.876	1,3	1,0	242	52	(128)	70
28	Kec. Sukasari	5.730	4.121	1,2	1,3	238	140	(114)	(61)
29	Kec. Sumur Bandung	3.357	2.107	1,3	0,9	166	154	(100)	(95)
30	Kec. Ujungberung	5.995	3.496	2,3	1,1	89	132	(25)	(53)
Jumlah/Rata-rata		198.333	123.081	1,5	1,3	5.179	3.094		

Sumber : Hasil analisis 2015

Data pada tabel 5.31 di atas menunjukkan variatifnya kebutuhan ruang kelas tiap kecamatan tahun 2016. Untuk tingkat SD, semua kecamatan menunjukkan kelebihan ruang kelas dibandingkan dengan siswa potensial SD tahun 2016. Kecamatan dengan kelebihan ruang yang tertinggi ada di kecamatan Regol dan yang kelebihan ruang terendah ada di kecamatan Andir.

Namun kondisi tersebut tidak berlaku untuk tingkat SMP. Beberapa kecamatan menunjukkan indikasi kekurangan kelas. Yang terbanyak kekurangan kelas ada di kecamatan Bandung Kulon (84 ruang kelas), dan yang paling sedikit kecamatan Gedebage (3 ruang kelas). Sedangkan kecamatan yang mengalami kelebihan ruang kelas tertinggi ada di kecamatan Bandung Wetan dan yang kelebihan ruang kelas terendah ada di kecamatan Panyileukan.

Tabel 5.32
Proyeksi Kebutuhan Kelas Jenjang
Pendidikan Menengah (SMA) Tahun 2016
Di Kota Bandung

NO	KECAMATAN	BISWA	RUANG	KEB. R
		SMA		
		2016	SMA	2016
		99,60%		SMA
1	Kec. Andir	7.287	147	25
2	Kec. Antapani	3.676	36	51
3	Kec. Arcamanik	3.903	21	77
4	Kec. Astananyar	3.710	15	55
5	Kec. Babakan Ciparay	6.127	30	114
6	Kec. Bandung Kidul	2.845	15	56
7	Kec. Bandung Kulon	7.795	21	184
8	Kec. Bandung Wetan	1.468	121	85
9	Kec. Batununggal	8.175	0	0
10	Kec. Bojong Loa Kaler	6.961	62	59
11	Kec. Bojong Loa Kidul	3.918	20	111
12	Kec. Buah Batu	4.777	51	76
13	Kec. Cibeunying Kaler	3.789	37	13
14	Kec. Cibeunying Kidul	5.783	80	74
15	Kec. Cibiru	3.012	81	4
16	Kec. Cicendo	5.458	179	47
17	Kec. Cidadap	3.309	9	48
18	Kec. Cinambo	850	0	0
19	Kec. Coblong	11.686	154	70
20	Kec. Gedebage	900	29	5
21	Kec. Kiaracondong	6.599	84	56
22	Kec. Lengkong	2.753	139	47
23	Kec. Mandalajati	3.183	16	75
24	Kec. Panyileukan	1.970	12	87
25	Kec. Rancasari	3.303	32	51
26	Kec. Regol	4.474	81	19
27	Kec. Sukajadi	4.139	58	20
28	Kec. Sukasari	4.855	35	71
29	Kec. Sumur Bandung	2.039	97	43
30	Kec. Ujungberung	4.388	59	55
Jumlah/Rata-rata		133.129	1721	

Tabel 5.32 di atas menunjukkan untuk jenjang pendidikan menengah yakni SMA, hampir semua kecamatan di kota Bandung menunjukkan indikasi kekurangan jumlah kelas. Kekurangan kelas tertinggi ada di kecamatan Bandung Kulon (184 kelas) dan yang terendah ada di kecamatan Cibeunying Kaler (13 kelas). Kelebihan kelas hanya ada di 6 (enam) kecamatan saja yakni Bandung Wetan, Cibiru, Cicendo, Gedebage, Lengkong dan Sumur Bandung.

5.3. Jangkauan Pelayanan Sekolah

Identifikasi jangkauan pelayanan sekolah pada wilayah studi dilakukan untuk melihat karakteristik peserta didik yang memanfaatkan sekolah tersebut. Analisis ini dimaksudkan untuk menjawab seberapa luas jangkauan daerah pelayanan pada masing-masing sekolah. Hal tersebut dilakukan karena sekolah di kota Bandung tidak hanya melayani lingkungan wilayahnya saja, terutama sekolah-sekolah di daerah perbatasan kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang. Di samping itu analisis ini pun ditujukan untuk mendapatkan pola kecenderungan pemanfaatan sekolah oleh masyarakat kota Bandung. Apakah pemanfaatan sekolah sebagaimana yang disinyalir oleh Walter Christaller yang menyebutkan bahwa naluri manusia untuk memenuhi kebutuhannya didasarkan atas kedekatan lokasi (preferensi spasial)?

Dikarenakan keterbatasan waktu kajian dan data yang dimiliki, identifikasi jangkauan pelayanan sekolah akan dibatasi pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di kota Bandung.

Berikut distribusi asal siswa pada SMPN yang ada di kota Bandung:

Tabel 5.33
Distribusi Asal Peserta Didik SMPN di kota Bandung

RAYON	NAMA SMP	Kec	JUMLAH SISWA	ASAL SISWA			
				Ring 0	Ring 1	Ring 2	Ring 3
A	SMPN 3	Regol	901	166	454	185	96
	SMPN 10	Regol	1.100	218	449	163	270
	SMPN 11	Regol	1.355	452	242	412	249
	SMPN 21	Bbk Ciparay	873	469	239	17	148
	SMPN 24	Bjloa Kaler	1.307	721	465	45	76
	SMPN 25	Astanaanyar	916	190	477	66	183
	SMPN 33	Bjloa Kaler	1.060	534	418	49	59
	SMPN 36	Bbk Ciparay	1.252	581	421	59	191
	SMPN 38	Bjloa Kidul	1.197	436	93	9	659
	SMPN 39	Bbk Ciparay	837	246	420	7	164
	SMPN 43	Regol	1.010	243	204	424	139
JUMLAH			11.808	4.256	3.882	1.436	2.234
B	SMPN 1	Cicendo	1.211	212	255	559	185
	SMPN 6	Andir	986	212	293	399	82
	SMPN 9	Cicendo	1.383	295	276	591	221
	SMPN 12	Sukasari	1.582	455	379	566	182
	SMPN 15	Sukasari	905	167	384	60	294
	SMPN 23	Andir	849	309	294	163	83
	SMPN 26	Sukajadi	880	300	293	1	286
	SMPN 29	Sukasari	1.205	547	233	6	419
	SMPN 32	Andir	904	375	216	220	93
	SMPN 41	Andir	1.108	494	159	343	112
	SMPN 47	Cicendo	1.012	351	141	14	506
SMPN 52	Cidadap	1.068	795	74	72	127	
JUMLAH			13.093	4.512	2.997	2.994	2.590
C	SMPN 16	Cibeunying Kaler	972	169	594	112	97
	SMPN 19	Coblong	933	486	267	29	151
	SMPN 22	Cibeunying Kidul	868	621	15	224	8
	SMPN 27	Cibeunying Kidul	1.799	605	263	824	107
	SMPN 35	Coblong	1.004	691	105	63	145
JUMLAH			5.576	2.572	1.244	1.252	508

Kajian Pemetaan Sekolah
 Berbasis Kependudukan dan
 Kewilayahan Kota Bandung - 2015

D	SMPN 02	Sumur Bandung	937	69	14	630	224
	SMPN 05	Sumur Bandung	957	92	15	635	215
	SMPN 07	Bandung Wetan	1.034	51	33	841	109
	SMPN 14	Bandung Wetan	949	36	10	853	50
	SMPN 40	Bandung Wetan	1.378	243	113	868	154
	SMPN 44	Bandung Wetan	960	77	44	611	228
JUMLAH			6.215	568	229	4.438	980
E	SMPN 08	Ujung Berung	1.070	196	357	354	163
	SMPN 17	Arcamanik	1.346	351	796	20	179
	SMPN 30	Kiaracondong	1.203	672	117	336	78
	SMPN 37	Kiaracondong	1.202	923	102	158	19
	SMPN 45	Antapani	1.112	600	389	108	15
	SMPN 46	Cibiru	1.126	643	59	138	286
	SMPN 49	Antapani	924	138	507	68	121

Melihat data tabel 5.33 di atas secara umum wilayah jangkauan SMPN di kota Bandung ternyata melayani sampai luar kota Bandung. Meski secara total jumlah asal siswa yang berasal dari luar kota Bandung masih relatif sedikit yakni 15 %, namun di beberapa SMPN menunjukkan indikasi besarnya proporsi jumlah siswa luar kota Bandung. Kondisi ini terjadi terutama pada SMPN yang letak lokasinya berada pada kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan kota/ kabupaten sekitar kota Bandung seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi. Berikut tabel distribusi asal peserta didik SMPN yang lokasinya terletak di perbatasan :

Tabel 5.34
Distribusi Asal Peserta Didik SMPN
Yang Berlokasi di Perbatasan Kota Bandung

NAMA SMP	Kecamatan	JUMLAH SISWA	ASAL SISWA			
			Ring 0	Ring 1	Ring 2	Ring 3
SMPN 26	Sukajadi	880	300	293	1	286
SMPN 29	Sukasari	1.205	547	233	6	419
SMPN 38	Bjloa Kidul	1.197	436	93	9	659
SMPN 46	Cibiru	1.126	643	59	138	286
SMPN 47	Cicendo	1.012	351	141	14	506
SMPN 48	Rancasari	1.173	416	503	30	224
SMPN 50	Ujung Berung	1.269	789	72	328	80
SMPN 51	Rancasari	1.760	683	499	349	229
SMPN 52	Cidadap	1.068	795	74	72	127
SMPN 53	Mandalajati	653	387	143	17	106
JUMLAH		11.343	5.347	2.110	964	2.922
PERSENTASE			47%	19%	8%	26%

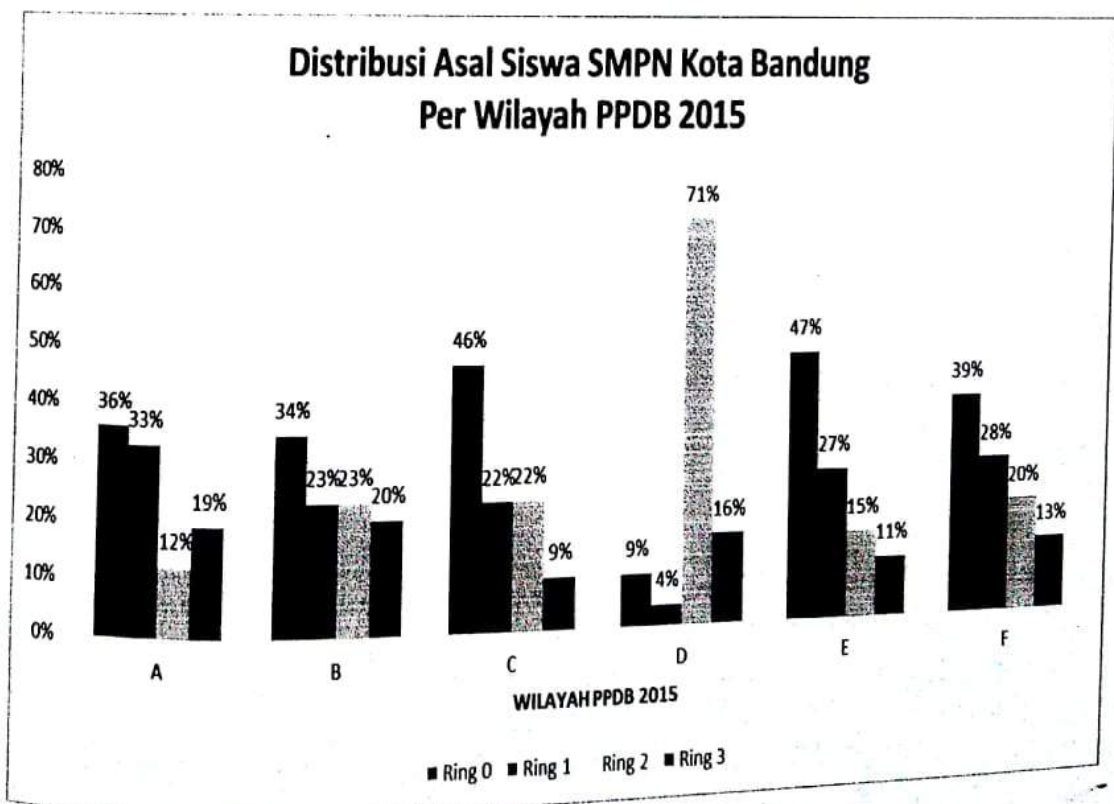
Sumber : Dapodik Disdik Kota Bandung dan Hasil Analisis, 2015

Pada SMPN yang lokasinya berada di wilayah perbatasan, jumlah asal siswa yang berasal dari luar kota Bandung cukup mendominasi. Bahkan lebih banyak dibanding dengan siswa yang

satu wilayah PPDB (Ring 1) maupun kecamatan lain di kota Bandung (Ring 2).

Tabel 5.33 juga memperlihatkan fenomena menarik lainnya. Mari kita perhatikan SMPN yang notabene lokasinya berada di pusat kota yakni wilayah D. Siswa yang bersekolah di wilayah D 71 % berasal dari Ring 2 yakni bukan asal kecamatan di mana sekolah tersebut berada, bukan kecamatan satu wilayah PPDB 2015, namun dari kecamatan lainnya se-kota Bandung. Disusul kemudian 16 % berasal dari luar daerah kota Bandung (Ring 3). Sementara siswa yang domisilinya asal kecamatan dimana lokasi sekolah berada hanya 9 %, dan yang domisilinya berada pada satu wilayah PPDB 2015 4 %.

Grafik 5.1.
Distribusi Asal Siswa SMPN Kota Bandung
Per Wilayah PPDB 2015



Sumber : Hasil Analisis, 2015

Grafik 5.1 di atas semakin memperjelas adanya penumpukan/konsentrasi siswa Ring 2 di SMPN yang lokasinya notabene berada pada kawasan pusat kota Bandung. Hal ini terjadi karena walaupun dalam PPDB 2015 diterapkan sistem rayonisasi, namun belum sepenuhnya diterapkan karena calon peserta didik masih diberikan kebebasan untuk memilih sekolah yang dikehendakinya di semua wilayah kota Bandung.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan. Selanjutnya kesimpulan-kesimpulan tersebut akan diberikan rekomendasi baik yang bersifat kebijakan maupun teknis.

6.1. Temuan Kajian

Yang dimaksud dengan temuan kajian adalah hasil identifikasi dan analisis yang tidak terkait secara langsung dengan tujuan, sasaran dan ruang lingkup kajian karena masih merupakan potret eksisting dan belum didasarkan pada perspektif kependudukan dan kewilayahan. Namun demikian hasil identifikasi dan analisis tersebut merupakan indikator pemerataan dan perluasan akses pendidikan.

1. Rata-rata perbandingan antar jenjang SD dan SMP di kota Bandung adalah sebesar 432. Angka tersebut menunjukkan tingginya kesenjangan antara sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kota Bandung. Kesenjangan tersebut menunjukkan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Bandung yang masih kurang. Sedangkan rata-rata perbandingan antar jenjang SMP dan SMA menunjukkan angka sebesar 203. Dengan demikian dilihat dari sisi indikator perbandingan antar jenjang pendidikan (PAJ), jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kota Bandung pun relatif masih kurang.

2. Rata-rata jumlah siswa per sekolah untuk tingkat SD sebesar 295, untuk tingkat SMP sebesar 490, untuk tingkat SMA sebesar 423 dan untuk tingkat SMK sebesar 405. Kesemuanya menunjukkan bahwa di Kota Bandung baik sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP) maupun jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK) menunjukkan kepadatan yang cukup tinggi.
3. Rasio murid per kelas di kota Bandung menunjukkan fakta sebagai berikut :
 - a. Angka rata-rata rasio murid per kelas di kota Bandung untuk tingkat SD adalah 48, SMP 43, SMA 29 dan SMK 43. Jika mengacu pada ketentuan Permendiknas 24/2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Permendiknas 40/ 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) maka untuk tingkat SD rasio murid per kelasnya tidak sesuai dengan standar yang ditentukan.
 - b. Untuk tingkat SMP, secara keseluruhan di kota Bandung tingkat rasio murid per kelasnya tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Ada beberapa kecamatan yang jumlah siswa per kelasnya di bawah standar Permendiknas 24/2007. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Astanaanyar, Bandung Kidul, Cinambo, Lengkong, Panyileukan, dan Sumur Bandung. Hal ini menggambarkan gejala kekurangan

murid SMP yang secara implisit menunjukkan adanya gejala kelebihan ruang kelas. Artinya sarana dan prasana belum termanfaatkan secara maksimal. Sementara untuk kecamatan lain jumlah siswa per kelasnya di atas standar Permendiknas 24/2007, yang secara implisit menunjukkan kurangnya ruang kelas. Kondisi terparah dialami oleh kecamatan Gedebage. Hal ini dikarenakan jumlah SMP yang ada di kecamatan tersebut hanya 1 (satu) sekolah saja yakni SMP Negeri 54.

- c. Untuk tingkat SMA angka rasio rata-rata murid per kelas di kota Bandung 29 murid/kelas, atau di bawah standar Permendiknas 24/2007 yakni 32 orang per kelas. Beberapa kecamatan angkanya jauh di atas angka rasio rata-rata dan standar Permendiknas 24/2007. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Cibeunying Kaler, Rancasari, Lengkong, dan Coblong. Kondisi ini dapat diinterpretasikan adanya gejala kekurangan kelas ataupun menumpuknya jumlah siswa pada SMA di kecamatan-kecamatan tersebut yang tidak diikuti dengan kapasitas daya tampung kelas.
- d. Untuk SMK, angka rasio rata-rata murid per kelas adalah 43 murid/ kelas. Kecamatan Bandung Kulon (SWK 3 Tegalega) , Andir (SWK 1 Bojonagara), dan Mandalajati (SWK 5 Arcamanik) mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan dimana jumlah murid per kelasnya masing-masing adalah 177, 144 dan 107. Sedangkan kecamatan Bandung Kidul (SWK 7 Kordon)

jumlah murid per kelasnya sangat sedikit yakni hanya 8 orang / kelas

4. Dilihat dari rasio murid - guru baik untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SMP) maupun pendidikan menengah (SMA, SMK) di kota Bandung, jumlah guru sangat memadai. Bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, bisa disebutkan bahwa jumlah guru di kota Bandung "berkelimpahan"
5. Rasio kelas terhadap guru pada tingkat SD, SMP, SMA dan SMK pada 30 Kecamatan di kota Bandung memiliki angka rasio kelas terhadap guru di bawah 1 atau < 1 . Kondisi ini menjelaskan bahwa pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah di kota Bandung SMP dan SMA di semua Kabupaten/Kota kegiatan belajar mengajar berjalan secara efektif

6.2. Kesimpulan

1. Terkait temuan kajian, dapat disimpulkan bahwa masih ada sejumlah permasalahan terkait pemerataan dan perluasan akses pendidikan di kota Bandung. Masalah tersebut terkait dengan :
 - a. kurangnya jumlah fasilitas pendidikan berupa sekolah tingkat SMP dan SMA di Kota Bandung. Masih ada kecamatan yang secara potensi jumlah siswa usia sekolah cukup tinggi namun belum dibangun sekolah yang sesuai dengan tingkatannya, seperti di Kecamatan Batununggal untuk tingkat SMA/SMK.

- b. tidak merata dan sesuai standar rasio siswa per kelas baik untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SMP) maupun menengah (SMA, SMK).
- c. Jumlah guru di kota Bandung sudah termasuk memadai jika dihitung dari sisi rasio murid – guru (sisi kuantitas), namun belum dihitung dari kualitas seperti pendidikan tertinggi guru dan kelayakan mengajar.

2. Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Jumlah ketersediaan fasilitas pendidikan dasar dan menengah di kota Bandung masih jauh dari angka yang ideal (Permendiknas 24/2007 dan 40/2008). Bahkan dengan mengacu pada standar yang non ideal pun (Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1722-2004) masih kurang. Dengan jumlah penduduk sebanyak ± 2.470.802 jiwa pada tahun 2015, dan jumlah penduduk usia sekolah SD, SMP, SMA/SMK masing-masing sebesar 214.536 orang; 123.920 orang; dan 131.328 kekurangan fasilitas pendidikan berupa sekolah yang dibutuhkan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

TINGKAT	Kebutuhan Minimal (Sesuai standar minimum Rombel)	Kebutuhan Maksimal (Sesuai standar maksimum Rombel)
SD	- 274	+ 373
SMP	- 112	+ 117
SMA/ SMK	- 230	+ 13

Angka tersebut di atas tentu akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia sekolah di kota Bandung. Perhitungan proyeksi anak usia sekolah

tahun-tahun berikutnya akan mengubah kebutuhan minimal dan maksimal jumlah sekolah.

Kurangnya jumlah sekolah ataupun ruang kelas di atas atas asumsi bahwa fasilitas eksisting berada dalam kondisi baik. Artinya, tidak memperhitungkan kondisi fisik eksisting bangunan apakah membutuhkan perbaikan karena rusak ringan ataupun rusak berat.

3. Kapasitas Daya Tampung Sekolah

Kapasitas daya tampung sekolah berkorelasi dengan ketersediaan fasilitas sekolah. Untuk tahun 2015, rata-rata kapasitas daya tampung SD dan SMP sudah melebihi daya tampung. Sementara untuk SMA dan SMK rata-rata kapasitas daya tampung di bawah kapasitas.

4. Tingkat Keterisian Fasilitas Pendidikan

Rata-rata tingkat keterisian sekolah di kota Bandung tahun 2015 pada tingkat SD sudah berlebih. Untuk SMA dan SMK rata-rata tingkat keterisian sekolah kurang, sedangkan SMK tingkat keterisian sekolahnya berlebih.

5. Jangkauan Pelayanan Sekolah

Dikarenakan keterbatasan waktu dan data yang tersedia, analisis data jangkauan pelayanan sekolah hanya terbatas pada SMP Negeri yang ada di kota Bandung. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum wilayah jangkauan SMPN di kota Bandung ternyata melayani sampai luar kota Bandung. Secara total jumlah siswa yang berasal dari luar kota Bandung masih relatif sedikit yakni 15 %. Namun demikian pada SMPN yang lokasinya di perbatasan kabupaten/ kota lain, jumlah siswa yang berasal dari luar kota Bandung mencapai angka 26%.

6.3. Rekomendasi

Terkait temuan kajian dan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa rekomendasi yang kiranya perlu untuk ditindaklanjuti pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan Kota Bandung. Adapun rekomendasi kami bagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni Rekomendasi Kebijakan, Rekomendasi Teknis dan Rekomendasi Lintas Sektoral:

6.3.1. Rekomendasi Kebijakan

Dengan memperbandingkan dan menyandingkan hasil temuan serta analisa yang dilakukan dengan kebijakan bidang pendidikan, terutama yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2013 – 2018 dan dokumen kebijakan pendidikan nasional ada beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung 2013 – 2018 dengan Renstra Kemdikbud 2015 - 2019
2. Melakukan kebijakan penataan ulang sekolah termasuk penataan rombongan belajar di masing-masing sekolah dengan memperhatikan SPM Bidang Pendidikan
3. Melakukan kebijakan penataan ulang tenaga pendidik dengan memperhatikan SPM Bidang Pendidikan
4. Melakukan penataan sistem penerimaan peserta didik baru dengan pemberlakuan sistem rayonisasi (kewilayahan) murni secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendidikan (sarana dan prasarana) di tiap wilayah
5. Memberlakukan sistem kuota khususnya bagi siswa SMP dan SMA/SMK yang tempat tinggalnya berada di luar kota

Bandung. Hal ini bukan dalam rangka membatasi akses pendidikan ataupun diskriminasi, namun untuk melaksanakan secara konsekuen urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana masing-masing pemerintah kota/ kabupaten mempunyai kewajiban memberikan pelayanan pendidikan kepada warganya masing-masing. Artinya Pemerintah Kota Bandung berkewajiban untuk memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada penduduk kota Bandung. Adalah kewajiban konstitusional pemerintah kota/ kabupaten asal siswa luar kota Bandung untuk memberikan pelayanan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Tim pengkaji berpendapat tidaklah sesuai dengan konteks dan asas-asas otonomi daerah jika pemerintah kota Bandung harus bertambah bebannya dengan “mengurusi” penduduk usia sekolah yang bukan penduduk kota Bandung.

6. Membuat zona sabuk pengaman (*safety belt zone*) di sekolah-sekolah negeri daerah perbatasan guna pelaksanaan sistem kuota bagi siswa luar sekolah Bandung. Hal ini untuk memberikan sekaligus membatasi ruang bagi siswa asal luar kota Bandung untuk masuk ke sekolah-sekolah di pusat kota Bandung

6.3.2. Rekomendasi Teknis

1. Agar dilakukan validasi dan pemutakhiran (*update*) data kependidikan di kota Bandung, baik data yang ada di Dinas Pendidikan Kota maupun data yang ada di sekolah-sekolah tiap jenjang pendidikan. Hasil validasi dan pemutakhiran data tersebut diupayakan agar dapat diakses secara *on-line*

- oleh setiap pemangku kepentingan pendidikan di kota Bandung ;
2. Dilakukan perhitungan menyeluruh terhadap indikator-indikator pemerataan dan perluasan akses pendidikan, indikator peningkatan mutu, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan serta indikator efisiensi internal pendidikan dengan basis data yang sudah valid dan mutakhir (*update*), agar didapatkan gambaran utuh potret situasi dan kondisi pendidikan terkini di kota Bandung
 3. Melakukan kajian khusus mengenai proyeksi kebutuhan pendidikan kota Bandung dengan basis data kependudukan yang sudah valid dan mutakhir (*update*)
 4. Dilakukan kajian evaluasi SPM Bidang Pendidikan dengan basis data yang sudah valid dan mutakhir (*update*)
 5. Melakukan pembangunan unit sekolah baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) atas dasar perhitungan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Pendidikan dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung

Rekomendasi Lintas Sektor

Rekomendasi lintas sektoral disertakan dalam kajian ini dikarenakan perlu adanya sinergitas data dan informasi terkait kependudukan dan kewilayahan yang di luar kewenangan/urusan bidang pendidikan.

1. Dilakukan validasi dan pemutakhiran (*update*) data kependudukan di kota Bandung khususnya menyangkut penduduk usia sekolah (untuk Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung)

2. Dilakukan pendampingan bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung oleh dinas terkait terutama dalam hal rencana pembangunan USB dan RKB di kota Bandung (untuk Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karja, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Badan Litbang Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Teknik Proyeksi Pendidikan*, Jakarta.

Banghard W. Frank, Trull Albert Jr., 1973. *Educational Planning*, The Macmillan Company, New York.

Chappin Jr., F. Stuart, Edward J Kaiser, David R. Godschalk, 1995. *Urban Land Use Planning*, The University of Illinois, Illinois.

Chiara, Joseph De, Lee Kopplemen. 1975. *Urban Planning and Design Criteria*, Second Edition. New York-Toronto, London Melbourne: Van Nostrand Reinhold Company.

Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 2003; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah*, CV. Eko Jaya, Jakarta.

Domu, Ichdar, 2009. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*, Program Studi Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado.

Emzir, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gallion, Arthur B., 1959. *The Urban Pattern, City Planning and Design*, D. Van Nostrad Company, Inc, Canada.

Golany, Gideon. 1976. *Social Planning, New Town Planning: Principle and Practice*, New York: John Willey and Son.

